

SEMINAR NASIONAL

Prosiding

**STRATEGI ADAPTASI
UMAT HINDU DALAM
MENGHADAPI TANTANGAN
KEKINIAN**

UNHI Denpasar, April 2021



**UNHI PRESS
2021**

PROCEEDING BOOK OF
**STRATEGI ADAPTASI UMAT HINDU
DALAM MENGHADAPI TANTANGAN
KEKINIAN**

UNHI DENPASAR, April 2021



UNHI PRESS

PROCEEDING BOOK OF

STRATEGI ADAPTASI UMAT HINDU

DALAM MENGHADAPI TANTANGAN

KEKINIAN

Organizing Committee:

Head of Organizer : I Ketut Suda

Deputy of Head Organizer : I Wayan Suka Yasa

Secretary : I Wayan Subrata
Ida Bagus Gede Yudha Triguna

Treasurer : Ida Bagus Dharmika

Secretariat Division : Ni Made Sukrawati
Dr. Wayan Paramartha

Steering Committee : Dr. Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag
I Gusti Bagus Wirawan
Ni Made Indiani

Reviewers :

Ida Bagus Gede Yudha Triguna

I Wayan Suka Yasa

I Ketut Suda

Wayan Paramartha

Dr. Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag

Editorial Board :

I Wayan Subrata

Ni Made Indiani

Ida Bagus Dharmika

I Gusti Bagus Wirawan

Ni Made Sukrawati

Editor :

I Wayan Wahyudi

Setting / Layout :

Ida Bagus Putu Eka Suadnyana

I Wayan Wahyudi

Publisher :

UNHI PRESS

Editorial Staff :

UNHI PRESS

Jl. Sangalangit, Tembau Penatih, Denpasar-Bali

Telp. (0361) 464700/464800

Email : unhipress@unhi.ac.id

SAMBUTAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Om Swastyastu

Pertama-tama izinkan saya selaku pimpinan Pascasarja UNHI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara webinar atas kegiatan akademik yang telah diselenggarakan meskipun kita sedang diliputi oleh suasana pandemi Covid-19, yakni wabah yang sangat berbahaya. Kegiatan webinar memang merupakan bagian dari kegiatan tri dharma perguruan tinggi, yang wajib dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan tinggi. Webinar yang mengusung tema "Strategi Adaptasi Umat Hindu dalam Menghadapi Tantangan Kekinian ini" memang sangat menarik. Sebab di tengah menggeliatnya, revolusi industri 4.0, dan *society 5.0* justru kita dihadapkan pada wabah yang mematikan, yakni pandemi Covid-19, yang membuat masyarakat mengalami pembatasan dalam melakukan berbagai aktivitas (bekerja, belajar, dan beribadah) dari rumah yang lazim disebut *work from home (WFH)*.

Di tengah kondisi yang serba terbatas ini, panitia penyelenggara webinar mampu berkreasi dan berinovasi dalam merumuskan berbagai pemikiran yang dapat disumbangkan kepada masyarakat dalam menghadapi dinamika yang sedang terjadi ini, maka baik selaku pribadi maupun selaku pimpinan lembaga, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia webinar dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini. Webinar yang menampilkan 12 makalah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam melakukan strategi adaptasi dalam menghadapi dinamika yang sedang terjadi.

Dengan mengutip tulisan dalam makalahnya Prof. Yudha bahwa dalam satu dasawarsa terakhir, wacana sosial dihentakkan dengan lahirnya revolusi industri keempat (4.0) sebagai lingkungan sosial dan budaya baru yang mesti diadaptasi seluruh masyarakat dunia, termasuk umat Hindu. Partisipasi umat Hindu dalam revolusi industri 4.0 menentukan eksistensi dan pemosisiannya pada tatanan masyarakat global, juga lebih spesifik terhadap daya saing dalam kontestasi keagamaan. Padahal umat Hindu masih berkuat dengan minimnya infrastruktur serta sumber daya yang dibutuhkan dalam penguasaan teknologi informasi, bahkan tingkat melek internet relatif rendah jika dilihat dari indikator demografis dan geografis masyarakatnya. Pandemi *Covid-19* yang masih berlangsung hingga saat ini, seolah-olah mempercepat akselerasi dan transisi masyarakat ke dalam revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan semakin massifnya aktivitas berbasis internet.

Di tengah keterbatasan infrastruktur yang ada, dan keterbatasan kemampuan masyarakat kita, termasuk masyarakat Hindu dalam mengakselerasi teknologi, khususnya teknologi informasi kemudian muncul tantangan baru yang harus dihadapi, yakni merebaknya wabah pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Menghadapi dinamika masyarakat dalam konteks kekinian ini tentu memerlukan strategi adaptasi yang tepat bagi masyarakat agar bisa terhindar dari berbagai kesulitan yang dihadapi. Oleh karenanya, sekali lagi kami menyambut gembira atas penyelenggaraan webinar ini, sehingga dengan berbagai tulisan yang ditampilkan dalam prosiding ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyusun strategi untuk mengatasi berbagai kendala kehidupan yang dihadapi, baik secara individu maupun secara kelompok.

Sebagai Direktur Pascasarjana UNHI, saya sangat berterima kasih dan mendukung penuh kegiatan webinar ini. Semoga prosiding ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, khususnya para pemegang kebijakan, terutama untuk dijadikan pijakan dalam mengambil berbagai keputusan terkait upaya menghadapi berbagai kesulitan dan kompleksitas kehidupan yang berkembang akhir-akhir ini. Demikian sambutan singkat ini sekali lagi selamat atas terbitnya prosiding ini dan semoga bermanfaat.

Om Santih, Santih, Santih, OM

Denpasar, 3 April 2021

Direktur Pascasarjana, UNHI

Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Prosiding hasil webinar ini merupakan kompilasi makalah yang ditulis oleh beberapa orang peserta, yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana, Universitas Hindu Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-29. Webinar yang mengusung tema "Strategi Adaptasi Umat Hindu dalam Menhadapi Tantangan Kekinian" ini menampilkan tiga pembicara utama, yakni Ibu Wayan Pujiastuti, S.H., M.Si (Asesor SDM Aparatur Ahli Madya dan Plt. Sekreatris Ditjen Bimas Hindu, Kementerian Agama RI), Prof. Dr. I Nengah Bawa Atmadja, M.A (Guru Besar bidang Antropologi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja) dan Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna, M.S (Guru Besar bidang Sosiologi Agama, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar). Terdapat 12 (dua belas) makalah yang dihimpun dari pemikiran kritis, para akademisi dan para peneliti fenomena sosial, budaya, dan agama dalam menghadapi revolusi industri 4.0, *society 5.0*, di era pandemi Covid-19 ini.

Webinar ini dimaksudkan untuk menggali berbagai perspektif kalangan akademisi, dan birokrat pemerintahan dalam mengamati, dan kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan atas adaptasi yang dilakukan masyarakat Bali terhadap berbagai fenomena sosial, budaya, dan kehidupan keberagamaan di era revolusi industri 4.0, *society 5.0*, dan pandemi Covid-19 sekaligus sebagai upaya kontemplasi bagi Program Pascasarjana UNHI, dalam merancang kegiatan tri dharma perguruan tinggi untuk satu tahun kedepan. Melalui beraneka tulisan dalam prosiding ini para pembaca dapat menyimak berbagai adaptasi yang harus dilakukan masyarakat dalam mengartikulasikan kompleksitas kehidupan sosial, budaya, dan kehidupan keberagamaan dalam konteks kekinian.

Miasalnya, Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna, M.S secara gamlang mengungkapkan tentang strategi adaptasi umat Hindu dalam menghadapi era baru, sebagai refleksi sosiologi Hindu menghadapi revolusi industri 4.0, pandemi covid-19, dan *society 5.0*. Dalam tulisannya tersebut Prof. Yudha menegaskan bahwa manusia adalah penulis sejarahnya sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya pada setiap fase kehidupan. Perubahan lingkungan yang dihadapi, sesungguhnya hanya menyajikan berbagai momentum refleksivitas untuk memutuskan bagaimana ia harus bertindak. Pada gilirannya, manusia juga yang menentukan pilihan tindakannya dengan segenap potensi, sumber daya, dan kapasitas pribadinya. Kekenyalan dan keluwesan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan tergantung pada kapasitas keagenan yang ia miliki.

Kemudian Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si. dalam tulisannya yang berjudul: ”Brahma Rahasya: Pikiran-Sadar Penghalau Kegelapan Batin” mengungkapkan bahwa orang bijak Hindu mengajari kita *sadhana telu*. *Sadhana telu* itu adalah tiga disiplin spiritual untuk dapat mengatasi penderitaan (*duhka telu*), apa pun bentuknya. Tiga disiplin spiritual itu bertujuan untuk pertama-tama agar kita memiliki pandangan yang benar: empirik, rasional, dan testimoni teks suci. Dengan itu kita diharapkan memiliki pandangan dunia spiritual yang membumi pada diri: sadar akan jati diri (*matutur ikang atma ri jatinya*). Tiga *sadhana* itu adalah: *Jnana bhyudreka*: memiliki pengetahuan ketuhanan, kesemestaan, dan kemanusiaan yang mendalam, holistik; *Indriya yoga marga*: berlatih mengendalikan diri dengan yoga; *Tresna dosa ksaya*: penghindari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita terikat oleh dosa-dosa (*Wrehaspati Tattwa*; Djapa, 2013).

Demikian halnya Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si dan Dr. I Wayan Subrata, M.Ag, telah mengungkap secara jernih mengenai strategi adaptasi dan edukasi, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Adapun strategi yang ditawarkan Prof. Suda dan Dr. Subrata kepada masyarakat dalam mengedukasi diri dan melakukan adaptasi terkait dengan dinamika kehidupan keberagaman di era pandemi Covid-19 antara lain, *pertama*, jangan terjebak pada diskursus yang dibangun media massa *mainstream* dalam menanggapi isu-isu penanganan pandemi Covid-19. Sebab secara umum politik keredaksian pertimbangannya berada di sekitar profit dan legitimasi kuasa negara. *Kedua*, bagi mereka yang berada dalam sistem, misalnya sistem pendidikan formal (sekolah, kampus, dan staf media massa), harus aktif dan kreatif mengedukasi masyarakat dalam hal melakukan adaptasi dan literasi terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebab perubahan di dunia ini bukan sebuah keniscayaan. *Ketiga*, mengembalikan fungsi pendidikan, yakni pendidikan harus dibangun berlandaskan nilai-nilai objektivitas, keilmiahan (*scientific*), dan kebijaksanaan (*virtue*).

Sebanyak 11 makalah yang disajikan oleh para pemakalah pendamping juga sangat menarik untuk dibaca, karena semuanya berbicara tentang strategi adaptasi umat Hindu dalam menghadapi tantangan pada era kekinian. Jika dicermati secara komprehensif keseluruhan makalah yang dituangkan dalam prosiding ini merefleksikan keprihatinan, kepedulian, dan sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya umat Hindu di Bali untuk melakukan adaptasi dan sekaligus edukasi diri dalam menghadapi dinamika masyarakat memasuki era revolusi industri 4.0, *society 5.0*, di tengah merebaknya pandemi Covid-19.

Terlaksananya webinar dengan tema ”Strategi Adaptasi Umat Hindu dalam Menghadapi Tantangan dalam Konteks Kekinian” ini tidak luput dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini ijin kami atas nama panitia

penyelenggara webinar menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor Universitas Hindu Indonesia yang telah memfasilitas webinar ini, sehingga dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. Ucapan terima kasih dan doa serupa kami sampaikan pula kepada Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia, atas dukungannya, baik moral maupun material, sehingga webinar ini dapat terselenggara sesuai yang direncanakan. Demikian pula kepada para pemakalah utama, yakni Ibu Wayan Pujiastuti, S.H., M.Si. (Asesor SDM Aparatur Ahli Madya dan juga sebagai Plt. Sekretaris Ditjen Bimas Rindu Kementerian Agama RI); Prof. Dr. I Nengah Bawa Atmadja, M.A (Guru Besar bidang Antropologi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja); dan Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna, M.S (Guru Besar bidang Sosiologi Agama, Universitas Hindu Indonesia) melalui kesempatan ini kami juga sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasinya dalam pelaksanaan webinar ini.

Webinar ini juga dapat terselenggara dengan baik, karena dukungan dan bantuan pihak-pihak lain, seperti panitia penyelenggara, pegawai TU, dan Bapak/Ibu dosen di lingkungan Program Pascasarjana UNHI. Oleh karena itu melalui kesempatan ini ijin pula kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada bapak/ibu para dosen yang telah berkenan menulis makalah dalam prosiding ini kami atas nama panitia juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhirnya, dengan rasa kerendahan hati ijin kami mengantarkan prosiding ini ke hadapan sidang pembaca yang budiman semoga ada manfaatnya.

Om Santih, Santih, Santih, OM

Denpasar, 3 April 2021

Panitia

Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si

DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia.....	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix

BAB.I

Strategi Adaptasi Umat Hindu Memasuki Era Baru: Refleksi Sosiologi Hindu Menyikapi Revolusi Industri 4.0, Pandemi <i>Covid- 19</i> , Dan <i>Society 5.0</i>	1
---	---

(Prof. Dr. IBG Yudha Triguna, MS)

Brahma Rahasya: Pikiran-Sadar Penghalau Keggelapan Batin.....	11
---	----

(I Wayan Suka Yasa)

Adaptasi dan Edukasi Masyarakat dalam Aktivitas Keberagamaan Hindu di Era Pandemi Covid-19	24
--	----

(I Ketut Suda, I Wayan Subrata)

BAB.II

Flexibilitas Pembelajaran Jarak Jauh Sebagai Adaptasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	37
---	----

(Ni Made Indiani)

Efisiensi Penguburan Jenazah Covid-19 Pada Lintas Budaya Di China, Jakarta, Dan Bali	49
--	----

(I Wayan Watra, Dan I Wayan Martha)

Kautilya Arthashastra: Strategi Hindu Mambangun Masyarakat Antikorupsi	53
---	----

(Dr. Drs. I Wayan Sukarma, M.Si)

BAB.III

Ekosentrisme: <i>Mapag Toya</i> Sebuah Model	75
--	----

(Ida Bagus Dharmika, I Gusti Bagus Wirawan)

Pelaksanaan Upacara Ngaben Bagi Masyarakat Hindu Di Bali Pada Era Pandemi Covid-19	83
---	----

(Ni Made Sukrawati, Wayan Paramartha)

Peran Lembaga Agama Dalam Menghadapi Covid-19	92
---	----

(Dr. Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag)

STRATEGI ADAPTASI UMAT HINDU MEMASUKI ERA BARU: Refleksi Sosiologi Hindu Menyikapi Revolusi Industri 4.0, Pandemi *Covid-19, dan Society 5.0*

Oleh

Prof. Dr. IBG Yudha Triguna, MS.

A. Pendahuluan

Dinamika keberagamaan umat Hindu mengukir jejak waktu dari masa lalu (*atita*), pada masa kini (*wartamana*), dan menuju masa depan (*anagata*). Perubahan pola-pola sosial keagamaan berlangsung secara gradual sebagai respons adaptif umat Hindu terhadap situasi, kondisi, beserta tantangan yang dihadapi pada zamannya. Lingkungan dan potensi keagenan individu menjadi pendorong berlangsungnya adaptasi dialektis, baik dalam dimensi struktural maupun kultural. Adaptasi struktural ditandai dengan perubahan institusi serta pranata sosial keagamaan dalam merespons dinamika internal dan eksternal, sedangkan adaptasi kultural ditunjukkan dengan terjadinya transformasi nilai, sikap, serta perilaku keagamaan.

Adaptasi sebagai mekanisme penyesuaian individu dan masyarakat dengan lingkungannya, selain bertujuan mempertahankan keberlangsungan eksistensi, juga untuk membangun keseimbangan-keseimbangan sosial yang positif (Pelly, 1998). Artinya, adaptasi bukan saja menyangkut cara bertahan hidup, melainkan juga upaya membangun keharmonisan dengan lingkungan sehingga melahirkan implikasi psikis yang menyenangkan. Hal ini tentu bukan perkara yang mudah karena tidak setiap individu atau masyarakat memiliki kesiapan untuk menghadapi perubahan lingkungan, baik alam maupun sosial budaya, yang terkadang berlangsung demikian cepat dan tiba-tiba. Alienasi, ketakberartian diri, dan *culture shock* menggambarkan beberapa kondisi yang potensial dialami individu tatkala berhadapan dengan lingkungan sosial baru yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Persoalan ini juga niscaya dihadapi umat Hindu seiring dengan berbagai fenomena global yang berlangsung saat ini, sekaligus tantangannya ke depan.

Dalam satu dasawarsa terakhir, wacana sosial dihentakkan dengan lahirnya revolusi industri keempat (*4.0*) sebagai lingkungan sosial dan budaya baru yang mesti diadaptasi seluruh masyarakat dunia, termasuk umat Hindu. Partisipasi umat Hindu dalam revolusi industri 4.0

Makalah disampaikan dalam *Webinar Bulan Ulang Tahun Pascasarjana UNHI Denpasar, 19 Desember 2020*.

menentukan eksistensi dan pemosisiannya pada tatanan masyarakat global, juga lebih spesifik terhadap daya saing dalam kontestasi keagamaan. Padahal umat Hindu masih berkutat dengan minimnya infrastruktur serta sumber daya yang dibutuhkan dalam penguasaan teknologi informasi, bahkan tingkat melek internet relatif rendah jika dilihat dari indikator demografis dan geografis masyarakatnya. Pandemi *Covid-19* yang masih berlangsung hingga saat ini, seolah-olah mempercepat akslerasi dan transisi masyarakat ke dalam revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan semakin massifnya aktivitas berbasis internet. Adaptasi pola aktivitas baru yang dirutinisasi dalam praktik sosial tersebut menandai transisi halus agensi ke dalam struktur sebagai basis strukturasi sistem sosial (Giddens, 2010). Proses ini juga mempercepat terwujudnya masyarakat 5.0 (*society 5.0*) yang berbasis pada struktur masyarakat informasi, dan suka tidak suka, juga harus diadaptasi umat Hindu ke depan.

Ketiga fenomena global tersebut patut dijadikan momen reflektivitas untuk mengidentifikasi tantangan yang sedang dan akan dihadapi umat Hindu sebagai pijakan dalam menyusun strategi adaptasi yang produktif. Dialektika ruang dan waktu sosial berdasarkan pengalaman masa lalu, tantangan masa kini, serta prediksi masa depan, menjadi sikap sosial (*social traits*) yang harus dikembangkan dalam setiap proses adaptasi sosiokultural. Dengan demikian, adaptasi yang dilakukan menghasilkan pola-pola sosiokultural yang terkenal, dan memenuhi kebutuhan, hasrat, serta tujuan individu dalam hubungannya dengan lingkungan (Bennet, 1976; Sanderson, 2003). Atas dasar itu, strategi adaptasi umat Hindu memasuki Era Baru diungkap dengan merefleksikan tantangan revolusi industri 4.0, pandemi *Covid-19*, dan *society 5.0*.

B. Kerangka Teoretis

Giddens (2010) mengandaikan kehidupan sosial ibarat sungai yang mengalir tanpa henti. Perubahan sosial berlangsung dalam rentang ruang dan waktu dengan melibatkan peran struktur serta agen secara integral. Konsep temporalitas (*duree*) menegaskan bahwa perubahan sosial tidak terjadi begitu saja, tetapi mengikuti ritme tertentu di dalam (*in*) dan melalui (*by*) rutinisasi praktik sosial. Kapasitas keagenan (agensi) merupakan faktor penting dalam perubahan sosial, walaupun agensi tidak mungkin dibangun dan berkembang di luar struktur. Struktur sosial memosisikan agen pada parsialitas ruang dan temporalitas waktu seiring dengan kompleksitas peran serta fungsi sosialnya. Ruang parsial dan waktu temporal ini menyediakan aneka pengalaman yang senantiasa dimonitor dan direfleksikan agen dalam tindakan sosial, sekaligus untuk menegaskan kapasitas keagenannya. Monitoring refleksif ini menandai transisi agen ke dalam agensi yang dibutuhkan dan strukturasi sistem sosial.

Transformasi keagenan individu sebagai faktor penting dalam proses adaptasi budaya, juga sejalan dengan pandangan Hardestry (1977:45) bahwa adaptasi merupakan proses yang dinamis karena hubungan manusia dengan lingkungan tidak bersifat konstan dan determinan. Sifat dinamis ini memberi peluang kepada setiap individu untuk melakukan inovasi sosiokultural dalam strategi adaptifnya, baik peningkatan adaptasi (*adaptive upgrading*) maupun adaptasi dengan modifikasi (*adaptive modification*) (Sahlins, 1960; Parsons, 1967; Triguna, 1997). Kemampuan melakukan inovasi sosiokultural tentunya mensyaratkan kapasitas keagenan yang memadai.

Pada gilirannya, adaptasi sosial budaya memang lebih memfokuskan perhatian pada proses belajar dan modifikasi kultural (Ellen, 1982). Mengingat penyesuaian perilaku dan pola-pola kebiasaan dalam lingkungan sosial baru memerlukan proses belajar yang melibatkan pengetahuan serta pengalaman reflektif. Terkait dengan itu, Giddens (2010:6) mengajukan konsep monitoring refleksif sebagai unsur tetap dalam tindakan sehari-hari. Setiap aktor selalu memonitor arus aktivitasnya sendiri dan aktivitas orang lain, serta berbagai elemen dalam struktur sosial tempatnya berada. Selanjutnya, hasil monitoring refleksif tersebut diakumulasikan dengan pengetahuan yang dimiliki sehingga membangun kesadaran yang mendasari tindakan, baik kesadaran diskursif maupun praksis. Tindakan disengaja muncul dari kesadaran diskursif karena aktor dapat menjelaskan alasan, motif, serta tujuan tindakannya. Sebaliknya, kesadaran praksis berkaitan dengan tindakan-tindakan tidak disengaja yang tidak mampu dijelaskan, dan inheren dengan rutinisasi praktik sosial.

Kerangka teoretis tersebut menegaskan bahwa keberhasilan strategi adaptasi umat Hindu dalam menghadapi dinamika sosiokultural yang sedang dan akan dihadapi, tergantung pada kemampuannya mentransformasikan diri sehingga memiliki kapasitas keagenan yang dibutuhkan dalam struktur sosial. Kapasitas keagenan ini hanya mungkin dibangun melalui proses belajar yang memadukan pengetahuan dan pengalaman reflektif. Refleksivitas ini menjadi basis pembentuk kesadaran, baik diskursif maupun praksis yang menentukan pilihan strategi tindakan dan inovasi sosiokultural dalam adaptasinya dengan lingkungan. Rutinisasi praktik sosial meniscayakan terjadinya habituasi atau pembiasaan sebagai basis strukturasi struktur sosial (*structuring structure*). Strukturasi menunjukkan transisi agensi ke dalam struktur sehingga integrasi agen dan struktur sungguh-sungguh terjalin. Adaptasi disebut berhasil apabila agen terintegrasi dalam struktur, dan juga struktur memberikan ruang seluas-luasnya kepada agen untuk mengembangkan sederet kekuasaan kausal yang memengaruhi kekuasaan-kekuasaan lain. Dengan demikian, strategi adaptasi umat Hindu menghadapi revolusi industri 4.0, pandemi *Covid-19*, dan *society 5.0*, bukan saja diarahkan untuk

mengintegrasikannya dalam tatanan global, melainkan juga secara ideal mampu menjadi agen penggerak dan pengendali perubahan yang inheren dalam fungsi-fungsi kekuasaan.

C. Pembahasan

1. Revolusi Industri 4.0 dan Disrupsi Global

Revolusi industri 4.0 menghadirkan transformasi sosial baru berbasis teknologi informasi yang secara fundamental mengubah tatanan kebudayaan, politik, dan ekonomi masyarakat dunia, bahkan tidak pernah ditemukan pada masa-masa sebelumnya. Schwab (2016) – pencetus istilah revolusi industri keempat – pun menyatakan, *“We are at the beginning of a revolution that is fundamentally changing the way we live, work, and relate to one another. In its scale, scope and complexity, what I consider to be the fourth industrial revolution is unlike anything humankind has experienced before”*. Beberapa teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), robotik, *internet of things* (IoT), kendaraan otonom, percetakan 3D, nanoteknologi, bioteknologi, dan lainnya, juga telah disiapkan untuk mengkooptasi sebagian peran manusia (Schwab, 2016:7). Sementara itu, Li, *et.al.* (2017) menyatakan bahwa prinsip fundamental dari revolusi industri 4.0 adalah integrasi yang dalam (*deep integration*) antara kecerdasan (*intelligence*) dan sistem jaringan (*networking system*), yang juga kerap disebut *cyber physical systems* (CPSs) atau industri internet.

Perubahan revolusioner ini tidak hanya menyajikan tantangan dalam penyiapan sumber daya manusia dan infrastruktur bagi penguasaan teknologi informasi, tetapi juga revolusi kebudayaan yang sukar diprediksikan. Disrupsi global menjadi implikasi yang sulit dihindari, mengingat transformasi teknologi tidak dibarengi dengan perkembangan yang sama pada tataran ideologi dan organisasi sosial. Padahal menurut Hardestry (1977:243), adaptasi sebagai pengambilan ruang perubahan di dalamnya terkandung perilaku kultural yang bersifat teknologikal, ideologikal, dan organisasional secara simultan. Artinya, kemampuan masyarakat dalam adaptasi teknologis, juga sepatutnya disertai kemampuan yang sama dalam adaptasi ideologis dan organisasional. Akan tetapi dalam praktiknya, justru ideologisasi teknologi lebih mendominasi gaya hidup masyarakat, ketika pemilikan atas properti teknologi informasi ternyata lebih dipentingkan, daripada pemanfaatannya untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan.

Disrupsi sesungguhnya nyaris selalu dialami masyarakat pada setiap fase revolusi industri, sejak revolusi industri pertama hingga keempat saat ini. Mengingat revolusi selalu menghadirkan perubahan yang fundamental, cepat, dan massif, sehingga masyarakat cenderung tidak siap menghadapinya. Oleh karenanya, kondisi ketidakmenentuan yang dihadapi

masyarakat senantiasa menarik minat para teoretisi dan futurolog sosial untuk menganalisisnya. Hal ini setidaknya-tidaknyanya dapat disimak dari kajian-kajian yang dilakukan oleh John Naisbitt, Alvin Toffler, Samuel P. Huntington, dan Francis Fukuyama. Toffler (1980) telah memprediksikan kelahiran masyarakat informasi sebagai transisi gelombang ketiga (*the third wave*) yang menciptakan perubahan fundamental pada seluruh tatanan sosiokultural dan akibatnya sulit diprediksikan, bahkan sungguh-sungguh paradoks. Disrupsi dan paradoks global dalam masyarakat informasi tentu bersinggungan erat dengan pengaruh globalisasi yang secara dramatis mengubah tatanan masyarakat di pelbagai belahan dunia.

Titik persinggungan antara revolusi industri 4.0 dan globalisasi dapat dinyatakan dalam hubungan ideologi dengan alat penyebarannya. Globalisasi menggelindingkan ideologi yang hendak mengintegrasikan masyarakat dunia dalam satu tatanan global dengan bertumpu pada prinsip interdependensi, integrasi, dan kesalingkaitan (Friedman, 2002). Teknologi informasi berbasis *big data* meniscayakan penyebaran ideologi tersebut karena interaksi sosial tidak lagi terhalang oleh batas-batas geografis dan kebudayaan. Mencairnya batas-batas kebudayaan berimplikasi terhadap homogenisasi kultural karena masyarakat mengkonsumsi ideologi, citra, simbol, dan gaya hidup yang sama melalui akses informasi. Disrupsi paradoks muncul ketika teknologi informasi juga menjadi saluran penyebaran ideologi dan identitas kelompok yang justru mereifikasi heterogenitas serta lokalitas sebagai antitesis globalisasi. Naisbitt (1988;1990) bahkan menegaskan bahwa homogenitas budaya dan hilangnya identitas kultural hanyalah mitos globalisasi yang terlampaui dibesar-besarkan karena faktanya isu lokalitas justru mengalami kebangkitan yang signifikan.

Revolusi industri 4.0 dan disrupsi global yang menyertainya penting dimonitor secara kritis dalam pengembangan strategi adaptasi umat Hindu di era kekinian. Kecanggihan teknologi informasi harus dilihat sebagai peluang untuk mengoptimalkan segenap potensi umat Hindu dalam percaturan global. Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menguasai teknologi siber merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan umat Hindu dalam adaptasi teknologis. Dalam adaptasi ideologis, teknologi harus diposisikan pada fungsi dasarnya sebagai alat (*tools*) yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan, bukan malah memperbudak manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi menjadi kesadaran yang harus dibangun dalam diri umat Hindu, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun penyebarluasan ideologi dan nilai-nilai kebajikan Hindu (*dharma*). Sementara itu, adaptasi organisasional mensyaratkan kemampuan institusi keagamaan Hindu dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan, termasuk dalam pembangunan dan pemberdayaan umat Hindu. Ketiga bentuk adaptasi ini pada gilirannya harus

bermuara pada ketersediaan *big data* keagamaan Hindu sehingga masyarakat dunia memperoleh informasi yang valid tentang agama Hindu dengan segala dinamikanya.

2. Pandemi *Covid-19* dan Perubahan Sosial Keagamaan

Pandemi *Covid-19* merupakan bencana global yang dihadapi seluruh bangsa di dunia. Wabah ini bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat, melainkan juga memicu perubahan sosial akibat penerapan kebijakan dalam penanggulangannya. Pembatasan jarak fisik dan sosial yang diterapkan oleh hampir semua negara telah mengubah pola pergaulan masyarakat. Ekonomi global mengalami kelesuan akibat pembatasan aktivitas produktif masyarakat dan hubungan perdagangan antarnegara. Aktivitas budaya dan keagamaan juga terdampak, akibat berbagai pembatasan kegiatan masyarakat terutama yang melibatkan kerumunan warga. Dalam tataran psikologis, pandemi juga menghadapkan masyarakat pada kondisi ketidakpastian serta ketakutan yang berlarut-larut karena tidak jelas kapan akan berakhir.

Walaupun demikian, situasi pandemi ini juga menghadirkan pola-pola kebiasaan baru yang diadaptasi masyarakat sebagai respons atas kebijakan pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan. Pembatasan interaksi fisik dan sosial mendorong peningkatan intensitas interaksi virtual dalam aktivitas-aktivitas produktif, seperti pekerjaan dan pendidikan. Adaptasi kebiasaan baru di luar kelaziman pada kondisi sosial sebelumnya mengingatkan pada konsep kesadaran praksis. Apabila kesadaran diskursif menghadirkan tindakan sosial yang disengaja berdasarkan rasionalisasi tindakan, justru kesadaran praksis memunculkan tindakan-tindakan tidak disengaja dalam kondisi-kondisi yang tidak lazim dan situasi-situasi yang terputus dari rutinitas (Giddens, 2010:6). Misalnya aktivitas virtual, walaupun sesungguhnya sebelum pandemi sudah tersedia teknologi virtual, tetapi teknologi tersebut tidak banyak dimanfaatkan karena tampaknya masyarakat cenderung mempertahankan interaksi *face to face*. Akan tetapi, pembatasan fisik dan sosial selama pandemi menciptakan kondisi ketidaklaziman dan situasi terputusnya rutinitas interaksi tatap muka sehingga aktivitas virtual diadaptasi masyarakat sebagai pola kebiasaan baru dalam interaksi sosialnya.

Pada ranah sosial keagamaan, imbauan pemerintah untuk beribadah dari rumah dan pembatasan kerumunan, juga mendorong lahirnya pola-pola sosial keagamaan baru yang putus dari rutinitas dan kelaziman sebelumnya. Dalam konteks keberagaman Hindu di Bali khususnya, perubahan terutama dirasakan pada dimensi komunalitas dan kolektivitas ritual. Komunalitas dapat dipandang sebagai basis struktur dan kultural masyarakat Hindu Bali dengan kuatnya nilai *manyamabraya*, *pasukadukan*, dan *pasilihastian*, yang acap kali disertai sanksi sosial, baik verbal (*pakrimik*, *walek*) maupun formal (*dedosan*, *kasepakang*). Peran struktur dan

pranata sosial dalam memelihara nilai-nilai komunal tersebut telah menghabituisasi masyarakat, sehingga pola-pola sosial keagamaan kolektif melembaga menjadi tradisi. Akan tetapi, situasi pandemi mendorong umat Hindu untuk mengadaptasi kebiasaan baru terutama dalam pelaksanaan ritual keagamaan kolektif yang pada akhirnya menganulir tradisi komunalitas dari kemapanannya.

Adaptasi pola sosial keagamaan baru selama pandemi tersebut tentu berpotensi menciptakan strukturasi sistem keagamaan, di dalam serta melalui monitoring refleksif dan rutinisasi tindakan sosial. Strukturasi adalah kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan dan transformasi struktur-struktur sosial. Struktur bukanlah fakta sosial koersif seperti pandangan struktural fungsional, melainkan aturan, sumber daya, serta seperangkat relasi transformatif, yang terorganisasikan dalam praktik sosial reguler (Giddens, 2010:40). Monitoring refleksif adalah elemen penting dalam strukturasi karena transformasi struktur sosial terjadi ketika aktor-aktor memonitor dan merefleksikan tindakannya dan tindakan orang lain, serta struktur tempatnya berada. Pola sosial keagamaan baru selama pandemi niscaya memberikan pengalaman tersendiri bagi aktor-aktor yang melakukannya, dan bukan tidak mungkin, merasa nyaman dengan pola tersebut sehingga berpotensi dipertahankan secara reguler. Strukturasi terjadi ketika aktor-aktor yang lain juga melakukan tindakan serupa, sehingga pola kebiasaan tersebut diorganisasikan ke dalam struktur sosial.

Perubahan pola sosial keagamaan akan terjadi lebih cepat, manakala kondisi struktural berjumpa dengan kebutuhan, keinginan, serta kepentingan aktor yang memang menghendaki perubahan. Harus didasari bahwa wacana perubahan tradisi Hindu Bali, misalnya penyederhanaan upacara dan *upakara* gencar disuarakan oleh beberapa aktor. Jadi bukan hal yang mustahil apabila situasi pandemi ini dijadikan momentum untuk menguatkan wacana-wacana tersebut dan melembagakannya dalam struktur sosial. Mengingat perubahan tidak mungkin berlangsung di luar struktur, dan perjuangan posisi keagenan hanya dapat dibangun dalam struktur melalui penciptaan pertentangan terus menerus (Ritzer dan Goodman, 2005:512). Oleh karena itu, perubahan pola sosial keagamaan baru pasti akan berhadapan dengan konservatisme tradisi yang niscaya melahirkan penerimaan, penolakan, ataupun dialog. Di sinilah, adaptasi dialektis menjadi penentu berhasil tidaknya transformasi pola sosial keagamaan baru dalam keberagaman umat Hindu. Pertimbangan intelektual yang bertumpu pada nalar relatif lebih mudah menerima perubahan, tetapi pertimbangan moral yang bertumpu pada kreativitas *buddhi* dan *rasa* agama menyediakan ruang dialog yang lebih besar. Perubahan selalu hadir dengan nalarnya sendiri dan nalar masyarakat menentukan keberterimaannya.

Ketika nalar perubahan dan nalar masyarakat mengalami perjumpaan, maka sistem sosial keagamaan Hindu pasti berubah dengan segala konsekuensinya.

3. Menyambut *Society 5.0*

Di tengah-tengah ketidakmenentuan masyarakat menyikapi revolusi industri 4.0 dan pandemi *Covid-19*, justru Jepang telah merancang perubahan sosial baru bernama masyarakat 5.0 (*society 5.0*). Gagasan ini dilontarkan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe dalam *World Economic Forum*, pada 23 Januari 2019 dalam pidatonya “*Toward a New Era of "Hope-Driven Economy"* (Menuju Era Baru “Ekonomi yang didorong Harapan”). Visi masyarakat masa depan *Society 5.0* bahwa penentu ekonomi bukan lagi modal, melainkan data yang menghubungkan dan mendorong berbagai aspek kehidupan. Berbagai layanan akan terintegrasi dalam inovasi teknologi, informasi, komunikasi (TIK) seperti kesehatan dan pendidikan yang lebih terjangkau masyarakat. Problem sosial seperti ketimpangan ekonomi, juga dapat dikurangi dengan hal tersebut sehingga dapat membangun kehidupan yang lebih baik¹.

Inovasi TIK menempati posisi penting bagi masyarakat dan sekaligus mencerminkan perkembangan masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan TIK untuk mengimbangi isu-isu sosial yang perlu diselesaikan dengan tetap memastikan perkembangannya. Dengan kata lain, masyarakat dapat secara cerdas memiliki ketangkasan, mobilitas, reaktivitas, serta kemampuan untuk beradaptasi dan mengintegrasikan TIK. Pendekatan penggunaan TIK yang demikian adalah kunci dari *society 5.0* Jepang. Dalam taksonomi yang dibangun, Jepang memosisikan *society 5.0* sebagai kelanjutan masyarakat berburu (1.0), masyarakat bertani (2.0), masyarakat industri (3.0), masyarakat informasi (4.0), dan masyarakat cerdas (5.0) (Salgues, 2018:1-12). Berhimpit dengan revolusi industri 4.0, juga *society 5.0* bertumpu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis *internet of things (IoT)*, *big data*, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence – AI*). Hanya saja, *society 5.0* bergerak lebih jauh dengan mengolah *IoT* menjadi *AI* baru, yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai bentuk layanan².

Memang tidak banyak informasi yang dapat menjelaskan bagaimana aplikasi nyata *society 5.0* yang dikembangkan Jepang dan bagaimana inovasi tersebut mengubah dunia. Namun setidaknya, Jepang mengandalkan dua keunggulan kompetitif sebagai landasan

¹ Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Speech by Prime Minister Abe at the World Economic Forum Annual Meeting Toward a New Era of “Hope-Driven Economy” (23 January 2019),” *Ministry of Foreign Affairs of Japan*, https://www.mofa.go.jp/ecm/ec/page4e_000973.html, (diakses 3 Desember 2020).

² Government of Japan, “Realizing Society 5.0,” *The Government of Japan*, dalam https://www.japan.go.jp/abenomics/userdata/abenomics/pdf/society_5.0.pdf (diakses 3 Desember 2020).

untuk mewujudkannya, yakni *big data* dan *monozukuri*. Jepang telah mengoptimalkan *big data* yang melimpah sebagai dasar penyusunan, penerapan, dan evaluasi kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang layanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, ataupun ekonomi. Sementara itu, *monozukuri* adalah tradisi pengembangan produk bermutu tinggi yang dianut oleh industri Jepang. Langkah utama yang dilakukan untuk menjaga keunggulan mutu produk Jepang adalah penelitian dan pengembangan secara berkelanjutan³.

Society 5.0 sebagai inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang sedang dikembangkan Jepang niscaya akan menggelinding ke seluruh dunia seiring globalisasi. Pada gilirannya, bangsa Indonesia dan umat Hindu akan berada pada fase perkembangan sosial tersebut sehingga harus menyiapkan diri dengan mengoptimalkan segenap potensi yang dimiliki. Belajar dari visi, inovasi, dan pengalaman Jepang dalam mengembangkan *society 5.0*, maka penyiapan *human resources*, *big data*, dan optimalisasi keunggulan kompetitif melalui penelitian serta pengembangan secara berkelanjutan harus menjadi prioritas pembangunan umat Hindu ke depan. Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dapat diprediksi bahwa perubahan sosial akan bergerak semakin cepat dan sulit diprediksikan arahnya, sehingga umat Hindu dituntut untuk terus meningkatkan kualitas diri.

D. Refleksi

Manusia adalah penulis sejarahnya sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya pada setiap fase kehidupan. Perubahan lingkungan yang dihadapi, sesungguhnya hanya menyajikan berbagai momentum reflektivitas untuk memutuskan bagaimana ia harus bertindak. Pada gilirannya, manusia juga yang menentukan pilihan tindakannya dengan segenap potensi, sumber daya, dan kapasitas pribadinya. Kekenyalan dan keluwesan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan tergantung pada kapasitas keagenan yang ia miliki. Manusia yang mampu mengoptimalkan segenap potensi keagenan dalam dirinya akan selalu siap hidup dalam situasi dan kondisi sosial apapun, bahkan ketika harus berhadapan dengan masa depan yang sama sekali tidak mampu ia gambarkan. Begitu pula dengan strategi adaptasi umat Hindu untuk memasuki Era Baru di tengah tantangan revolusi industri 4.0, pandemi *Covid-19*, dan *society 5.0*, tergantung pada kesiapan umat Hindu sendiri. Strategi adaptasi umat Hindu akan berhasil, apabila ia mampu melakukan dialektika kontrol terhadap akslerasi teknologi, percaturan ideologi, dan perkembangan struktur sosial budaya yang berlaku pada era tersebut.

³ *Ibid.*

E. Daftar Pustaka

- Bennet, John F. 1976. *The Ecological Transition, Cultural Anthropology & Human Adaptation*. New York: Pergamon Press.
- Ellen, Roy. 1982. *Environment, Subsistence, & System*. New York: Cambridge University Press.
- Freidman, Thomas L. 2002. *Lexus dan Pohon Zaitun*. Bandung: Penerbit ITB.
- Fukuyama, Francis. 1999. *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstruction of Social Order*. London: Profiles Book.
- Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hardestry, Richard W. 1977. *Ecological Anthropology*. New York: John Wiley & Sons.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilization and The Remarking of World Other*. New York: Simon & Schuster.
- Li, Guoping; Hou Yun; and Wu Aizhi. 2017. "Fourth Industrial Revolution: Technological drivers, impacts and coping methods." In *Chinese Geographical Science. 2017, Vol. 27, p. 626–637*.
- Naisbitt, John. 1988. *Global Paradox*. New York: William Morrow and Company, Inc.
- Parsons, Talcott. 1967. *Sociological Theory and Modern Society*. New York: The Free Press.
- Pelly, Usman. 1998. *Urbanisasi dan Adaptasi*. Jakarta: LP3ES.
- Sahlins, Marshall. 1976. *Culture and Practice Reaseon*. Chicago: University of Chicago Press.
- Salgues, B. 2018. *Society 5.0: Industry of the Future, Technologies, Methods and Tools*. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Sanderson, Stephen K. 2003. *Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafinfdo Persada.
- Schwab, Klaus. 2016. *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva-Switzerland: World Economic Forum.
- Toffler, Alvin. 1980. *The Third Wave*. New York: William Morrow and Company, Inc.
- Triguna, Ida Bagus Gde Yudha. 1997. "Pengaruh Mobilitas Kelas dan Konflik Terhadap Penafsiran Kembali Simbolisme Masyarakat Hindu di Bali". *Disertasi* – tidak dipublikasikan. Bandung: Universitas Padjajaran.
- _____. 2011. *Mengapa Bali Unik*. Jakarta: Pustaka Jurnal Keluarga.
- _____. 2017. *Budaya Inspiratif dan Pembangunan Karakter*. Denpasar: Pustaka Ekspresi bekerjasama dengan Pascasarjana Unhi.

BRAHMA RAHASYA: PIKIRAN-SADAR PENGHALAU KEGELAPAN BATIN

Oleh
(I Wayan Suka Yasa)

Pendahuluan

<i>Mirib suba liu tau,</i>	Mungkin semua sudah tahu,
<i>kadi ne mungguh ring aji</i>	seperti yang terdapat dalam ajaran,
<i>jatin sangsara punika</i>	bahwa sesungguhnya penderitaan itu
<i>wetu saking tingkah pelih</i>	lahir dari perilaku salah.
<i>pelih saking katambetan</i>	Perilaku salah itu dari kebodohan.
<i>tambet dadi dasar sedih</i>	Kebodohan itulah dasar sedih.

Covid 19 adalah salah satu virus yang menyebabkan kita khawatir: jatuh sakit lalu mati. Akan tetapi, sesungguhnya ada penyakit yang lebih ganas, lebih halus, dan lebih misteri dari covid 19. Karena penyakit misterius itu menyebabkan imun dan keyakinan kita melemah sehingga mudah diserang oleh virus-virus dari luar diri. Menurut Maharsi Kapila dan Patanjali (Sura, 2011) penyebab sakit misterius (tampak sehat tetapi sesungguhnya sakit: egois, marah, loba, irihati, mabuk, dan bingung) itu adalah pikiran negatif yang disebut *adyatmika duhka*. Pikiran negatif ini sangatlah jahat dan berpengaruh besar terhadap keberadaan fisik dan jiwa sehingga kita mudah diserang penyakit lainnya. Sementara fisik yang sakit akibat gangguan eksternal disebut *Bhautika duhka*. Selain itu, pikiran negatif juga yang menyebabkan kita mengalami gangguan penyakit supranatural, misalnya sakit akibat kena kutuk leluhur, orang tua, guru, dan yang lainnya. Itu semata-mata akibat karma buruk sehingga bernasib buruk. Gangguan supranatural ini disebut *adidewaika duhka*. Dijelaskan bahwa ketiga penderitaan (*duhka telu*) itu memiliki sumber tunggal. Sumber itu disebut *awidya* (kebodohan), yakni bodoh spiritual. Maharsi Patanjali menjelaskan, bahwa *awidya* adalah penyebab esensial yang menjadikan kita menganut pandangan keliru (*asmita*), egois (*raga*), benci (*dwesa*), dan penuh rasa khawatir (*bhiniwesa*) (Sura, 2011). Belakangan ini banyak hal yang menyebabkan kita semakin khawatir, marah, dan bingung. Dan yang paling fenomenal adalah covid 19 itu. maka, kali ini kita mengajukan satu pertanyaan: bagaimana strategi kita untuk meminimalisir rasa khawatir itu menurut Hindu?

Orang bijak Hindu mengajari kita *sadhana telu*. *Sadhana telu* itu adalah tiga disiplin spiritual untuk dapat mengatasi penderitaan (*duhka telu*), apa pun bentuknya. Tiga disiplin spiritual itu bertujuan untuk pertama-tama agar kita memiliki pandangan yang benar: empirik, rasional dan testimoni teks suci. Dengan itu kita diharapkan memiliki pandangan dunia spiritual yang membumi pada diri: sadar akan jati diri (*matutur ikang atma ri jatinya*). Tiga *sadhana* itu adalah:

- (1) *Jnana bhyudreka*: memiliki pengetahuan ketuhanan, kesemestaan, dan kemanusiaan yang mendalam, holistik;
- (2) *Indriya yoga marga*: berlatih mengendalikan diri dengan yoga;
- (3) *Tresna dosa ksaya*: penghindari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita terikat oleh dosa-dosa (*Wrehaspati Tattwa*; Djapa, 2013).

Atas dasar tuntunan itu, maka strategi pertama yang semestinya dilakukan adalah memperdalam pemahaman religius: memahami Tuhan (*Brahma rahasya*) dengan pikiran-Sadar (*jnana yoga*). Langkah awal dimaksud, kali ini sayaawali dengan mendeskripsikan kembali teks lontar *Bhuwana Kosa* (bab I-V: *Brahma Rahasyam* = rahasia Tuhan). Mengapa? Walaupun teks lontar ini dikatakan sebagai teks *tattwa* otoritatif tertua Jawa Kuno tentang ketuhanan dan cara mencapai Dia, tetapi sampai sejauh ini tidaklah populer dipelajari oleh kalangan pelajar Hindu. Hal itu tentu disebabkan, antara lain oleh faktor bahasa (Sanskerta dan Jawa Kuno), terlebih-lebih wacana ketuhanan dan kosmosnya cukup pelik, rumit, dan berlapis-lapis dengan ramuan mistis-mitologis. Aspek kebatinan kependetaannya diperkaya dengan serangkaian formula mantra yang yang sering sulit dinalar. Faktor lain adalah karakter esoterik teks *tattwa* dipandang sangat sakral sehingga harus diajarkan dengan sangat hati-hati: *ajawera*. Dengan kata lain, karena yang diajarkan adalah ajaran rahasia, yaitu Tuhan (*Brahma rahasiyam*), dan memang demikian adanya. Bahwa kitab jenis *tattwa*, sampai sejauh ini hanyalah bacaan kalangan tertentu: *pandita*. Ajaran ini hanya menarik dan lebih mungkin dipahami oleh orang-orang terpilih menurut kualitas niat, intelektual, dan moral. Dalam arti, bahwa bagi para pengampu *tattwa*, ajaran ini lebih dipandang sebagai pelajaran *dharma* tingkat lanjut, pelajaran yang mesti diperdalam setelah umat menyelesaikan tugas duniawinya dan ingin mati benar.

Deskripsi lima bab *Bhuwana Kosa* di bawah ini bertujuan untuk mendapatkan pokok ajaran ketuhanan Hindu yang dianut selama ini dari jaman Hindu Jawa Kuno yang terus berlanjut sampai kini, terutama di Bali. Selain itu juga bertujuan untuk menuntun diri kita mendapatkan keyakinan yang lebih kokoh, yaitu menuntun pikiran-Sadar kita lebih fokus menuju tujuan sejati hidup. *Jnana bhyudreka* adalah langkah pertama perjalanan spiritual yang

dirintis leluhur Hindu. Langkah ini ditahapkan dalam tiga tataran pikir-Sadar. Langkah pertama adalah *srawanam*, yakni mendengarkan dengan penuh perhatian ajaran ketuhanan yang disampaikan oleh guru atau teks suci; kedua, *mananam*, yakni menganalisis secara kritis teks-konteks ajaran yang dipelajari; ketiga *nididhyasana*, yakni meperaktekan inti sari ajaran sebagai jalan hidup sampai Tuhan dialami. Jadi, deskripsi yang disajikan ini dapat dipandang sebagai peta pemahaman ketuhanan Hindu Jawa Kuno-Bali tingkat pertama: *srawanam*.

Deskripsi Bab I-V Bhuwana Kosa

Bab I. Brahma Rahasia: Siwa bertahta di hatimu.

Srimuni Bhargawa ingin menanyakan tentang alam nirwana (*pada nirbana*) kepada Bhapàra. Setelah menghaturkan bakti, ia bertanya: Ya Mahadewa, ada alam *Úunya* atau *Kamokûan* atau *Úiwa*. Alam itu dilihat oleh sang yogiswara. Di manakah alam itu? (I:1-2).

Jawab Bhapàra: Sang yogi melihat Bhapàra Parameúwara seperti sinar sejuta matahari di badannya, di hatinya; di hati segala yang berwujud; tanpa awal, tengah, dan akhir; laggen; wujud-Nya seperti pusaran air. Itu dapat dilihat dengan sarana pikiran-Sadar di tumpukan hatimu, ditengah dahi di dalam kepala (1: 2-5).

Setelah sang yogi melihat alam itu, tampaklah segi tiga cemerlang terbalik, di atas padma di sela-sela susu menggelayut. *Dasanapi* namanya. *Mahanapi* ada di hati, bercahaya hitam dan halus tembus sampai di kepala. Itulah air kehidupan. Di situ bersemayamlah Siwa berwujud *Úunya*; selalu sadar; nirindera; tidak terpengaruh oleh perubahan jagat; diabdi oleh seluruh dewa. Tetapi, Beliau menyusup menjadi jiwa segala makhluk; Beliaulah yang mengaktivasi alam semesta dan segala makhluk. Adanya bagaikan angkasa. Dan Dia hanya diketahui oleh sang yogi (I:6-12).

Ada juga yang disebut *Malatinapi*. *Napi* kesukaan Bhapàra ini besarnya 800 helai rambut dari tumpukan hati sampai di pusar. Ada pula *napi* lain, *Nalaretaka* namanya. Cahayanya seperti mendung. Panjangnya dua jengkal kelingking dari hati sampai di kepala (I:13-16).

Kaiwalya pada, disebut juga alam *Úunya*, *Parama Nirbana*, *Paramatma*, *Mahadewa*, dan *Parameswara*. Alam luhur idaman sang yogi itu adalah alam yang cemerlang, unggul, gaib, tanpa wujud, tanpa batas, sempurna. Alam itulah alam sebab dan kembalinya segala yang tercipta (I:18-22).

Ada lima warna Dia cemerlang di tumpukan hati: Agora berwarna merah; Tatpurusa berwarna merah, putih dan hitam; Sadya berwarna hitam; Bamadewa berwarna cemerlang matahari; dan Isana berwarna seperti intan cemerlang (I:17; I:23-28):

Asas	Kedudukan	Atribut	Dewa	Bija mantra
<i>Panca tanmatra</i>	Hati	Merah tembaga cemerlang	Aghora	<i>Om Ang Namah</i>
<i>buddhi</i>	Hati	Pelangi: hitam, merah, putih	Tatpuruṣa	<i>Om Tang namah</i>
<i>Awyakta</i>	Pangkal hati	Hitam	Sadya/Wisnu	<i>Om Sang namah</i>
<i>Puruṣa</i>	Tengah hati	Matahari: aneka warna	Bamadewa/ Brahma	<i>Om Bang namah</i>
<i>Param-Bhahma</i>	[tungtung hati?]	Intan semerlang	Isana/ Iúwara	<i>Om Ing namah</i>

Jenis-jenis alam rohani (*Siwa Pada*) pada diri itu sangat sulit diketahui oleh orang yang tidak berpengetahuan spiritual (*awidya*). Dia itulah Mahadewa, Dewanya para dewa yang tak habis-habisnya diwacanakan dengan aksara dan bahasa. Walaupun adanya Dia terang benderang, tetapi toh tidak disadari oleh kebanyakan orang. Untuk memahami Dia hendaknya dengan melampaui aksara dan bahasa, sebab Dia luput dari dualitas. Dia yang menguasai diri dengan pikiran-Sadar Ketuhanan kembali ke *Siwa Pada*: alam *Úunya*, alam Kelepasan yang tenang (I:29-30).

Adapun cara untuk memahami Dia adalah dengan berusaha tiap hari menyatukan diri dengan Bhaṣara Mahadewa. Langkah pertamanya adalah membasmi segala dosa diri, bagaikan membakar kayu-kayuan dengan ilmu batin (*jnana-wisesa*). Dengan langkah yoga itu, maka dengan itu orang arif mencapai *moksa* (I:31-33).

Bab II Brahma Rahasia: Alam-alam Para Dewa itu juga ada pada diri

Menurut BK tubuh kita ini adalah *bhuwana alit*, yaitu reflika alam semesta. Reflika alam agung itu berupa simpul-simpul saraf rohani (*cakra*) pada titik-titik tertentu pada tubuh kita. Dalam simpul-simpul itu bersemayam Bhatara Siwa dalam berbagai manifestasi-Nya (nama-rupa-Nya). Sang yogi (*pandita*) hendaknya menyakralisasi dirinya (*nyasa*), yakni mendudukan manifestasi Siwa dengan merafal *bija mantra* dalam fokus pikiran-Sadar terstruktur pada titik-titik batin tertentu, seperti tertera dalam tabel di bawah ini.

Loka	Kedu- dukan	atribut	Dewa	Bija mantra
<i>Bhur, bhwah, Swah (Indra loka)</i>	Pusar	merah	Aghora	<i>Om Ang namah</i>
<i>Maha loka</i>	Perut	Merah putih hitam (<i>triguna</i>)	Yaksa Prajapati	<i>Bija Gayatri: Om Tang namah</i>
<i>Jana loka</i>	Hati	Hitam; asas materi (<i>awyakta</i>)	Wisnu (atma)	<i>Bija Waisnawi; Om Sang namah</i>
<i>Tapa loka</i>	Dada	roh (<i>Purusa</i>)	Brahma (antaratma)	<i>Bija Bamadewa: Om Bang namah</i>
<i>Satya loka</i>	Leher	Unggul, terang benderang	Rudra (Paramatma)	<i>Bija Brahma: Om Ing namah</i>
<i>Siwa Purusa loka</i>	(kron- gongan)	Hampa, terang benderang	Siwa (Niratma)	<i>Wija Akara: OM Ang namah</i>
<i>Siwatara loka</i>	langit- langit	Hampa, suci	Siwatara	<i>Bija Ukara: Om Ung namah</i>
<i>Kaiwalya loka</i>	Dahi	Abadi, tak terpikirkan	Paramasiwa (Niskalatma)	<i>Bija Omkara: Om Om namah</i>
<i>Siwatma loka</i>	tengah kening	Unggul, stabil,	Siwatma	<i>Bija makara: Om Mang namah</i>
<i>Parama Kaiwalya</i>	(ujung dahi)	Bebas dari kelahiran	Paramasiwa & Sadasiwa	<i>Bija Omkara: Om Om namah</i>
<i>Atyanta Suksma loka</i>	Rongga kepala	Kekal abadi	Atyanta Suksma	<i>Bija Omkara: Om Om namah</i>
<i>Nirbana Siwa loka</i>	Lubang kepala	Kesucian terakhir	Nirbana Siwa	<i>Bija Omkara: Om Om namah</i>
<i>Parama nirbana siwa loka</i>	Ubun-ubun	Sunyinya sunyi	Parama Nirbana Siwa	<i>Bija Omkara: Om Om namah</i>

(II: 1-13)

Bhatara Mahadewa, Dewanya para dewa itu tidak duniawi. Dialah *moksa* itu. Dialah yang kekal. Dia bukan ini bukan itu. Dia memenuhi alam semesta, sangat agung dan gaib. Keberadaan-Nya bagaikan api dalam kayu, bagaikan angkasa, ada dalam segala wujud. Dia

dapat dipandang sebagai ayah, ibu, teman, kerabat, keluarga dan yang luhur lainnya. Mengetahui keberadaan Dia yang suci dan gaib itu, sang yogi berusaha keras untuk mengatasi enam musuh dirinya, menyatukan dirinya dengan pikiran-Sadar Dia untuk dapat mencapai dan manunggal dengan Dia yang Agung (II: 14-20).

Bab III. Brahma rahasia: Alam semesta (agung-alit) ada atas Kehendak Dia.

Dia berkehendak (*iccha*) menciptakan alam semesta. Maka, untuk mewujudkan kehendak-Nya, Dia mewujudkan Dirinya menjadi dua asas yang dualitas: maskulin-feminin, lalu menyatu (*satmya*). Maka, mewujudkan Dia yang dua secara evolusif sampai alam semesta (agung-alit) ini berada. Siwa bertahta pada setiap wujud asas materi (Rudra) dengan berbagai nama berbeda-beda. Evolusi asas kosmos disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Asas Kosmos	Dewa	Atribut/ guna	Dewa/Bija mantra
<i>Rudra</i>	Siwa	<i>Nirmala</i> (tanpa noda), <i>niskala</i> (tak terbatas)	<i>Om Ing namah</i>
<i>Purusa</i> (roh)	Brahma	Cemerlang bagaikan sinar matahari, kesadaran (<i>cetana</i>).	<i>Om Bang namah</i>
<i>Awyakta/Predana</i> (asas materi)	Wisnu	Tanpa kesadaran (<i>acetana</i>).	<i>Om Sang namah</i>
<i>Buddhi</i> (intelegensi)	Iswara	Kuning, terang (<i>satwa</i>),	<i>Om Tang namah</i>
<i>Ahangkara</i> (ego)	Rudra	Merah, agresif (<i>rajah</i>); mangaku	
<i>Panca Tanmatra</i> (lima unsur halus)	Ugra	Hitam, lembam (<i>tamah</i>).	
<i>Manah</i> (pikiran penuh keinginan)	Mahadewa	Berkeinginan, berpikir-pikir	<i>Om Ang namah</i>
<i>Akasa</i> (ether, ruang)	Bhima	Suara (<i>sabda</i>)	
<i>Bayu</i> (udara)	Isana	<i>Sabda</i> - sentuhan (<i>sparsa</i>)	
<i>Agni</i> (api, panas)	Pasupati	<i>Sabda</i> , <i>sparsa</i> , rupa (<i>rupa</i>)	
<i>Apah</i> (cair, air)	Bhawa	<i>Sabra</i> , <i>sparsa</i> , rupa, rasa (<i>rasa</i>)	
<i>Prethiwi</i> (keras)	Sarwajna	<i>Sabda</i> , <i>sparsa</i> , rupa, rasa, bau (<i>ganda</i>)	

(III: 1-18; 53-61).

Dari pertemuan asas tersebut (dalam tabel) lahirlah alam semesta (*bhuwana: sapta loka*). Di bab ini hanya diterangkan empat loka, yakni *bhuh loka*: tempat tinggal makhluk berbadan kasar; *bhwah loka*: alam bulan matahari, dan bintang-bintang; *swah loka*, yakni alam para dewa dan resi; dan alam prajapati, yakni *maha loka* (III:19-27). Keterangan lebih lengkap di bab IV.

Penciptaan Bhuwana Alit

Panca maha-bhuta	Panca tanmatra	Guna	Kedudukan dan kerjanya
<i>akasa</i>	<i>sabda</i>	Merangsang pendengaran	(lubang) hidung, telinga, hati, dubur, kemaluan, tulang.
<i>bayu</i>	<i>sparsa</i>	Merangsang penciuman.	<i>Prana</i> di muka, <i>apana</i> di dubur, <i>samana</i> di hati, <i>udana</i> di kepala, dan <i>byana</i> di persendian.
<i>agni</i>	<i>rupa</i>	Merangsang penglihatan.	Api: <i>mahadagni</i> di muka, <i>grahaspatyagni</i> di perut, <i>daksinagni</i> di hati, <i>sambartakani</i> di empedu, <i>Asucyagni</i> di kemaluan dan dubur, <i>caksupagni</i> di mata.
<i>apah</i>	<i>rasa</i>	Merangsang sentuhan.	Segala yang cair dalam diri: darah najis, air kemih, ludah, sumsum, otak.
<i>prethiwi</i>	<i>ganda</i>	Merangsang penciuman.	Segala yang padat dalam diri: aging, tulang, bulu, kaki, paru-paru, jantung, hati limpa, kulit.

(III:30-34; 44-50).

Panca Buddhindriya

Panca buddhindriya	Asal	Fungsi	Dewa
<i>Srotendriya</i> (indera telinga)	<i>Sabda tanmatra</i>	mendengar	Iswara
<i>Twakindriya</i> (indera kulit)	<i>Sparsa tanmatra</i>	menyentuh	Bayu
<i>Cakswindriya</i> (indera mata)	<i>rupa tanmatra</i>	melihat	Agni
<i>Jihwendriya</i> (indera lidah)	<i>Rasa tanmatra</i>	Mencecap rasa	Prajapati
<i>Granendriya</i> (indera pencium)	<i>Gandha tanmatra</i>	mencium	Wisnu

(III:35-36)

Panca Karmendriya

Panca Karmendriya	Asal	fungsi	dewa
<i>Wak</i> (indera bicara)	<i>Sabda tanmatra</i>	berkata	Iswara
<i>Pani</i> (indera tangan)	<i>Sparsa tanmatra</i>	Menyentuh, mengambil	Bayu
<i>Payu</i> (indera dubur)	<i>rupa tanmatra</i>	Kentut dan berak	Agni
<i>Upastha</i> (indera kemaluan)	<i>rasa tanmatra</i>	Sperma dan kencing	Prajapati
<i>Pada</i> (indera kaki)	<i>gandha tanmatra</i>	Berjalan, mendepak dll.	Wisnu

(III: 35-41)

Ditegaskan dalam BK, bahwa segala sesuatu yang yang tercipta berasal dari Bhatara Siwa dan bila waktu menurut kehendak Dia, semua yang tercipta kembali kepada Dia. Dia hadir gaib dalam berbagai nama pada segala wujud ciptaan-Nya. Bagaikan aneka ragam buih bermunculan-lenyap di permukaan air laut, mereka pada dasarnya hanyalah air laut yang tunggal itu. Siwa itu penari kosmis, orang bodoh terjebak oleh pesona (*maya indrajala*) tariannya. Dalam menciptakan alam semesta Dia Brahma; dalam memelihara semesta Dia Wisnu; Dalam melebur semesta Dia Rudra, hanya beda nama-rupa. Dan untuk dapat mengalami Dia, orang arif selalu menyucikan dirinya dengan membasmi musuh-musuh dirinya di dalam diri dengan laku yoga. Hanya dengan yoga orang arif dapat dan layak menjadi perwujudan Dewa (III:62-80).

Bab IV Brahma Rahasia: Mari kita ber-nevolusi, kembali kepada Dia di sini

Jika kita menyadari diri mengalami kemerosotan mental spiritual dan jatuh terjebak dalam jantera nikmat duniwi (*maya indrajala* Siwa; *punarbhawa*) dan merasa menderita berkepanjangan karena itu, maka BK menawarkan jalan kembali pulang ke dalam diri lalu manunggal dengan Dia Semesta. Kata Bhatara: pulanglah ke sini ke dalam hatimu. Di sini orang arif menemukan Sang Jati Dirinya. Beginilah cara kembali, yakni dengan tekun mempraktekkan *jnana yoga*. Tahapan-tahapan kembali pulang itu dideskripsikan dalam tabel in-evolusi. Seperti halnya evolusi, In-evolusi pun mengadaptasi struktur ajaran *Samkhya* (dibaca dari bawah ke atas):

Loka	Asas	Dewa	Bija mantra	Atribut Dewa
<i>Satya loka</i>	<i>Rudra</i>	Siwa	<i>Om Ing namah</i>	Menguasai <i>triguna</i> , abadi, cemerlang, tanpa rupa, murni; Rambut terjalin, berlumur

				debu, menunggang lembu, aneka rupa, tampan sempurna.
<i>Tapa loka</i>	<i>Purusa</i>	Brahma	<i>Om Bang namah</i>	Roh, tanpa rupa, murni, abadi; Menguasai astaguna, menekuni ajaran ketuhanan, gemar yoga, murni, berkepala empat, sabar, selalu sadar, senjata brahmastra.
<i>Jana loka</i>	<i>Awyakta</i>	Wisnu	<i>Om Sang namah</i>	Asas materiil (<i>prakreti</i>), kegelapan, tanpa perilaku; berkepala dan bertangan empat, berbusana kuning, senjata cakra, berpegang pada kebenaran, mengendarai garuda; perwujudan penciptaan, pemeliharaan, dan pelebur alam semesta.
<i>Maha loka</i>	<i>Buddhi</i>	Prajapati	<i>Om Tang namah</i>	Intelegensi, terang dan ringan (<i>satwa</i>).
	<i>Ahang-kara</i>			Ego, mengakui, agresif (<i>rajas</i>).
	<i>Panca tan-matra</i>			Penyebab Panca mahabhuta, lembam gelap (<i>tamas</i>).
<i>Swah loka</i>	<i>Manah</i>	Indra	<i>Om Ang namah</i>	Berpikir-pikir atau menginginkan sesuatu (<i>mamikalpa</i>).
	<i>Akasa</i>			Suara, mendengar (<i>sabda</i>).
<i>Bhwah loka</i>	<i>Bayu</i>			Menyentuh, berembus (<i>sparsa</i>).
	<i>&agni</i>			Melihat, memanas (<i>rupa</i>)
<i>Bhur loka</i>	<i>Apah &</i>			Merasakan, mengalir (<i>rasa</i>)
	<i>Prethiwi</i>			Mencium, padat (<i>gandha</i>)

(IV: 1-48; 55-58; 76)

Bab V. Brahma Rahasya: Yoga jalan kembali pulang

Bhargawa kembali mengajukan pertanyaan: Ya Tuhanku, bila jiwa hamba hendak meninggalkan badan ini, apa yang semestnya dilakukan? Konon Dia tanpa wujud, bagaimana mungkin dilihat dalam wujud nyata? Bagaimanakah sesungguhnya diri-Mu? Apa keunggulan-Mu? Dan apakah kebebasan itu? (V: 1-3).

Atas pertanyaan itu, Bhatara kembali menegaskan pentingnya praktek yoga atau jalan pikiran-Sadar Ketuhanan (*jnana yoga*) yang diterangkan di bab 4: in-evolusi. Dengan merenungkan dan menyublimasi asas-asas *Samkhya* dengan penuh perhatian, mulai dari *prethiwi* seterusnya sampai di asas puncak. Di tataran puncak itu pikiran terus-menerus difokuskan kepada *Siwa*. Dengan pikiran-Sadar bahwa Dia Tuhan yang Maha Esa. Dia hadir gaib di mana-mana dengan nama dan rupa beraneka-ragam. Dia juga adalah alam *Kaiwalya* atau *Úunya*. Maka, dengan pikiran-Sadar itu sang yogin akan melihat Dia dalam wujud Sinar cemerlang delapan inci di atas kepala yang terus meluas. Keilahian Semesta itu tidaklah mungkin dijumpai oleh orang yang penuh dosa, oleh orang yang banyak pikiran duniawi dan tidak mempraktekkan disiplin spiritual (V: 4-19).

Manakala pikiran sang yogin telah dalam keadaan hening (*nirbana*): pikiran tidak berpikir lagi, tidak terikat lagi oleh pesona duniawi, maka dia mencapai kemandirian (*samadhi*). *Samadhi* dapat diperoleh dengan memokuskan pikiran-Sadar Ketuhanan, dapat dalam fokus: (1) *Akara yoga*: mengucapkan bija mantra *OmAng namah*; (2) *Ukara yoga*: mengucapkan bija mantra *Om Ung namah*; (3) *Makara yoga*: mengucapkan bija mantra *Om Mang namah*; dan yang paling utama adalah (4) *Ongkara yoga*: dengan mengucapkan mantra *Om Ong namah*. Dengan fokus pikiran-Sadar Ketuhanan terpilih itu, sang yogin menyublimasi atau mengembalikan semua asas, tahap-demi tahap ke dan kontemplasi pada alam *Úunya*. Tujuh alam (*sapta loka*) itu hendaknya dilampaui. Dengan jalan itu sang yogin bebas dari ikatan duniawi dan mencapai *Nirwana* (V: 20-29). Sebelum ajal tiba, sang pandita hendaknya tekun menyucikan diri dengan mengucapkan mantra *A U Ma Ong* dalam pemusatkan pikiran-Sadar pada alam *Úunya*. Dengan cara yoga itu sang pendeta dapat mati benar: mencapai kelepasan (V: 30-46).

Ajaran rahasia ini hendaknya diajarkan dengan hati-hati. Hanya diajarkan kepada siswa yang berkeperibadian luhur: bakti kepada guru, punya niat baik, memiliki wawasan memadai, tekun belajar dan melaksanakan tapa-brata yoga. Ajaran ini tidak boleh diajarkan kepada mereka yang berkarakter buruk (V: 47-52).

Refleksi

Awidya: kebodohan adalah masalah mendasar manusia sepanjang sejarah peradaban. *Awidya* pertama-tama menyebabkan kita memiliki pandangan dunia yang keliru: Memandang segala hal yang bersifat duniawi sebagai yang sebenarnya dan mencita-citakannya sebagai ada abadi. Akibat dari pandangan keliru itu, kita menjadi orang yang egois, bingung, dan kaya dengan rasa khawatir dan takut, terutama takut sakit dan mati. Akibat lanjut dari semua itu kita

menjadi terjebak dalam jantera penderitaan berkepanjangan. Para maharsi mengklasifikasi penderitaan itu atas tiga bagian, yaitu berupa gangguan atau sakit fisik, mental, dan supranatural. Dari tiga gangguan itu, gangguan mentallah yang dominan menjadi penyebab orang mudah mengalami gangguan fisik dan supranatural. Agar orang dapat lepas dari jantera penderitaan itu, maharsi menawarkan tiga disiplin spiritual (*sadhana telu*): memperdalam wawasan spiritual, menjadikan yoga sebagai jalan hidup, dan menghindarkan diri dari perbuatan berdosa.

BK. Adalah lontar *tattwa* tertua Jawa Kuno ini ternyata kaya dengan wacana ketuhanan dan yoga. Wacananya bersifat genius sintesis, yakni merangkum paham ketuhanan dualitas, monisme terbatas, dan monisme mutlak. Tiga gagasan ideologis itu dapat dipandang sebagai anak tangga yang menghubungkan kita dengan Dia yang dipuja (Yasa, 2015; 2020):

- (1) Dualitas, bahwa alam semesta atau *bhuwana (agung alit)* ini berasal dari Dia yang menjadikan dirinya Dua asas berpasangan: Roh dan Materi pramula. Penciptaan bersifat evolusif, demikian pula kembalinya, semuanya kembali ke Dia. Alam ini adalah selubung yang berlapis-lapis (*kosa*), yakni *sapta patala + sapta loka*, dan alam lebih rohani di atas *sapta loka*.
- (2) Monisme terbatas, bahwa Dia itu Esa berkepribadian Agung (*Saguna*). Atas kehendak-Nya, Dia memanasifestasikan diri menjadi aneka rupa dan nama segala. Bhuwana agung alit ini adalah manifestasi Dia. Dia hadir gaib dalam segala perwujudan-Nya. Kehadiran sebagai segala ini bagaikan buih-buih lautan. Dia adalah penari kosmik. Orang bodoh terjebak oleh pesona duniawi-Nya (*Indrajala*), maka mereka menderita dalam jantra lahir-hidup-mati.
- (3) Monisme mutlak. Dia adalah tanpa atribut (*nirguna*) suwung (*sunya*), langgeng (*nirwana*), tak dapat dipikirkan (*acintya*). Segala ini adalah Dia semata. Ia yang melihat sesuatu berbeda dengan Dia, itu semata-mata karena *awidya* (bodoh spiritual).

Secara teo-siwaisme, tiga pandangan paham dimaksud disebut *Siwa Tattwa*, yakni Siwa adalah Sang Hakikat atau Asas Rohani. Atributnya adalah Kesadaran (*Cetana*). Lalu dipersonifikasi dengan gelar dewa menurut kategori Kesadaran Dia: Paramasiwa (*nirguna*; Kesadaran murni); Sadasiwa (*saguna*; Kesadaran berkepribadian aktif); dan Siwatma (*atma*, Kesadaran yang menjadi roh). Sementara asas Material-Nya disebut *Maya tattwa*. Atributnya adalah Ketidaksadaran (*Acetana*). Padanya laten tiga gen material yang disebut *triguna*. *Maya* dipersonifikasi dengan gelar Dewi Uma.

Menurut BK Dia, Sang Mula Sebab dan Tujuan itu hadir dan bertahta di hati sanubari dan sekaligus Ada di mana-mana. Dia Ada dengan terang benderang cahaya ribuan matahari.

Namun demikian, Dia tidak mungkin diketahui oleh orang bodoh (*awidya*). Hanya orang arif (sang yogin) yang dapat mengetahui- memahami- mengalami Dia melalui disiplin pikiran-Sadar Ketuhanan (*jnana yoga*). Kesucian diri adalah syarat utama agar dapat mengalami kemanunggalan dengan Dia (*moksa*). Kemanunggalan berarti lepas dari penderitaan (*kalepasan*), lepas dari jebakan tumimbal lahir (*punarbhawa*).

Premis jalan kemanunggalan BK dapat disimpulkan: Aku berpikir-Sadar Ketuhanan (*dhyana; ekagra*), lalu melenyapkannya (*nirodha*) pada Dia (*Mahadewa*), maka aku Ada (*samadhi*). Dua bait syair bertembang *Sinom* di bawah ini mencitrakan simpul-simpul pesan BK di atas:

<i>Kawikanan mamunahang,</i>	Kebijaksanaan yang memusnahkan
<i>saluir pangring tambete sami,</i>	segala penyakit kebodohan semua.
<i>Sakancan laraning jagat,</i>	Segala bentuk penderitaan jagat
<i>yadin mala ngebek gumi,</i>	pun mala yang memenuhi dunia
<i>Kawikanan nglebur sami,</i>	Kebijaksanaan melebur semua.
<i>Wireh wikanne puniku,</i>	Sebab kebijaksanaan itu adalah
<i>Panglukatan Pabresihan,</i>	[air suci] <i>Panglukatan</i> , <i>Pabresihan</i> ,
<i>miwah Pangentase jati,</i>	dan <i>Pangentas</i> yang sejati.
<i>Iku tuhu,</i>	Itu sungguh-sungguh
<i>Sariran Sang Hyang Wisesa</i>	Perwujudan Sang Hyang Wisesa.
<i>Duk manahe tan mamananh,</i>	Ketika pikiran tidak menginginkan,
<i>Ring budine ta mabudi,</i>	ketika budi tidak menganalisis,
<i>Ring tawange tan manawang,</i>	ketika yang tahu tidak mengetahui,
<i>Ditu Ida jenek linggih,</i>	ketika itulah Beliau duduk bertahta,
<i>Ditu Ida rumaga jati,</i>	ketika itu Beliau berwujud sejati.
<i>Sangkan langah anak tahu,</i>	Sebabnya jarang ada yang tahu Beliau,
<i>Wireh Ida tan parupa,</i>	karena Beliau tanpa rupa,
<i>Kudiang medasin ban aksi,</i>	mana mungkin dilihat dengan mata.
<i>Tuara tepuk,</i>	Tidak dilihat
<i>Yan tan purun ngutang rasa.</i>	Jika tidak berani membuang perasaan.

(Jlantik, 1982:45).

Daftar Pustaka

Jelantik, Ida Ketut. 1982. *Geguritan Sucita*. Denpasar Kayumas.

- Sura, I Gede. 1990. *Sumber-sumber Agama Hindu*. Denpasar: Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali
- . 1991. *Bhuwana Kosa*. Denpasar: Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali
- . 1994. *Bhuwana Kosa*. Denpasar: Upada Sastra.
- . 1999. *Siwa Tattwa*. Denpasar: Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
- . 2009. *Samkya dan Yoga*. Denpasar: Lembaga Penelitian UNHI.
- Yasa, I Wayan Suka. 2007. *Kandotama*. Denpasar: Santi Craken Tingkeb.
- . 2013. *Brahma Widya: Teks Tattwa Jnana*. Denpasar: Lembaga Penelitian dan Fakultas Ilmu Agama UNHI.
- . 2015. *Omkara Pranawa: Aksara, Tattwa, Sastra*. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia.
- . 2020. *Wijaksana: Tuntunan Yoga Anak Nyastra Bali*. Denpasar: Pascasarjana UNHI.
- . 2020. "Kosmologi Bali: Situs-situs Suci di UNHI" . Denpasar. Hasil penelitian.
- . 2020. "Transformasi Ajaran Ketuhanan Hindu (Tattwa-Mantra-Sastra Jawa Kuno-Bali)" Denpasar. hasil penelitian.

Adaptasi dan Edukasi Masyarakat dalam Aktivitas Keberagamaan Hindu di Era Pandemi Covid-19

Oleh

I Ketut Suda, I Wayan Subrata

ABSTRAK

Artikel ini ditulis untuk mengeksplorasi dan menganalisis beraneka tanggapan masyarakat terhadap kebijakan negara dalam menanggulangi wabah pandemi Covid-19. Terkait hal tersebut artikel ini bermaksud menawarkan sedikit tanggapan atas realitas yang sedang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Himbuan pemerintah untuk melakukan kerja, belajar, dan ibadah dari rumah atau yang populer disebut *work from home* tidak dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah melarang umat untuk melakukan upacara keagamaan. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengatur pelaksanaannya sesuai protokol kesehatan, agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19. Terkait hal tersebut, maka yang penting dijalani oleh masyarakat adalah melakukan adaptasi terhadap berbagai dinamika yang berkembang, sehingga dapat memudahkan pemerintah dalam memutus berkembangnya pandemi Covid-19 yang mematikan tersebut. Adaptasi dapat dilakukan dengan jalan, mengikuti protokol kesehatan, menjaga kesehatan, melakukan kerja dari rumah, dan lain-lain.

Kata-Kata Kunci: aktivitas keberagamaan, pandemi Covid-19, adaptasi, dan edukasi.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sejak awal Pebruari 2020 telah ditetapkan sebagai wilayah yang terpapar pandemi Covid-19, yakni merebaknya wabah virus *Corona Desiase-19* yang disingkat (Covid-19). Munculnya pandemi ini telah membuat masyarakat Indonesia, termasuk Bali mau tidak mau, suka atau pun tidak, secara sosiologis harus melakukan berbagai adaptasi. Misalnya, menyangkut cara hidup (*usage*), kebiasaan hidup (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*). Dengan meminjam gagasan Syaifudin (dalam <https://kolom.tempo.co>, 10 Juni 2020) dapat dipahami bahwa munculnya pandemi Covid-19 telah membangun empat persepsi dalam masyarakat, yakni (1) wabah ini merupakan jenis penyakit yang sangat berbahaya; (2)

wabah ini telah mengancam berbagai sektor kehidupan, seperti kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik; (3) ada juga opini yang berkembang dalam masyarakat yang meyakini bahwa wabah ini sebagai bentuk konspirasi global yang sengaja dibuat untuk kepentingan kapitalisme dan penjajahan model baru berbasis senjata biologis; dan (4) ada juga sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa pandemi Covid-19 sebagai sumber pendapatan ekonomi baru.

Apa pun persepsi yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan keberadaan wabah ini, yang menarik bagi penulis untuk dikaji pada kesempatan ini adalah dimensi-dimensi yang muncul dalam konteks pelaksanaan kehidupan keberagamaan di Indonesia, khususnya umat Hindu di Bali. Misalnya, ada pandangan yang menganggap pemerintah telah membatasi aktivitas ritual dalam kehidupan beragama, khususnya agama Hindu, ada juga sebagian masyarakat yang menganggap pemerintah melarang umat Hindu melakukan ritual keagamaan, dan banyak lagi anggapan miring lainnya yang ditujukan pada kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah dalam rangka memutus penyebaran Covid-19 secara masif di Indonesia.

Hal ini bermula ketika ditemukannya dua orang warga negara Indonesia positif terjangkit wabah Corona-19, yang membuat Presiden Joko Widodo melalui siaran pers-nya 15 Maret 2020 mengeluarkan himbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, yakni dengan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah (*work from home*). Adanya himbauan semacam ini membuat masyarakat Indonesia, termasuk Bali harus mentaati himbauan tersebut agar penyebaran wabah yang sangat mematikan ini dapat segera diputus. Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai dinamika yang berkembang, sehingga dapat memicu munculnya berbagai persepsi yang kurang berimbang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara, termasuk dalam kehidupan keberagamaan. Terkait persoalan ini, pertanyaannya bagaimana mengedukasi masyarakat untuk dapat beradaptasi terhadap situasi yang berkembang, khususnya di era mewabahnya pandemi Covid-19?

II PEMBAHASAN

2.1 Strategi Mengedukasi Masyarakat

Dengan meminjam terminologi J.R. David sebagaimana dikutip Sanjaya (2008:126) dalam konteks pendidikan strategi dapat dimaknai sebagai *a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular educational goal*. Artinya, dalam kaitannya dengan persoalan pendidikan, strategi dapat dimaknai sebagai perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan yang

didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, bagaimana membuat desain untuk mengedukasi masyarakat agar bisa melakukan adaptasi terhadap berbagai dinamika yang berkembang dalam masyarakat, khususnya di era pandemi Covid-19 dewasa ini. Dengan mengacu pada Fuad Hassan (dalam Widiastono, *ed.*, 2004:52) edukasi (pendidikan) dimaksud dalam konteks ini tidaklah terbatas pada sistem persekolahan (*schooling*), melainkan mencakup pengertian pendidikan dalam arti luas, yakni mencakup tiga upaya utama, seperti pembiasaan, peneladanan, dan pembelajaran.

Hal ini penting mengingat banyak orang yang menafsirkan pengertian pendidikan dalam arti sempit, yakni hanya terbatas pada lingkup pendidikan formal (sekolah). Ditambah lagi adanya depolitisasi pendidikan yang sangat kuat mulai dari pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, membuat perhatian masyarakat terhadap proses pendidikan (edukasi) menjadi semakin terbatas. Contoh, banyak masyarakat yang bersikap permisif atau tidak peduli terhadap terjadinya depolitisasi pendidikan, khususnya di jenjang perguruan tinggi. Seperti, adanya ketentuan administratif bagi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan minimal 70%, melarang organisasi ekstra kampus yang mempunyai basis ideologi yang kuat untuk beraktivitas di kampus, menggiring mahasiswa untuk mengejar target IPK, atau pun memenangi lomba-lomba akademik dengan iming-iming berupa hadiah uang pembinaan dan sejenisnya merupakan beberapa bentuk depolitisasi pendidikan yang terjadi di Indonesia (Subkhan, 2016:53).

Dalam hal ini, penulis tidak bermaksud mengatakan bahwa aturan administrasi bagi para mahasiswa di kampus itu tidak baik, akan tetapi yang ingin penulis soroti dalam konteks ini adalah, bahwa depolitisasi pendidikan mengandung dua intervensi politik, terutama untuk jenjang SMA, yakni *pertama*, dari negara bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan (melalui pelajaran PPKn dan sejarah); dan *kedua*, dari gerakan oposisi yang berbasis keagamaan (misalnya Islam skriptualis dan yang sejenisnya) untuk melakukan konservasi terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya (Subkhan, 2016). Ketika keduanya bersifat konservatif, yakni ideologi negara untuk mempertahankan eksistensi negara dan rezim yang sedang berkuasa, sementara ideologi agama untuk mengonservasi nilai-nilai agama yang telah diinstitutionalisasikan dalam banyak mazab keagamaan, maka sangat kecil peluang untuk terbangunnya kesadaran kritis di antara mereka.

Setelah mereka tamat SMA kemudian memasuki dunia kampus, maka dengan mudah dapat digiring untuk menerima begitu saja segala aturan kampus tanpa sikap rasional kritis sedikit pun, atau dengan bahasa lain dapat dikatakan mereka begitu saja dapat menerima dan menjalankan semua sistem kampus dengan sederet aktivitas yang harus diikuti. Ditambah lagi

adanya tuntutan dunia kerja, yang menuntut agar setelah tamat, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat dan baik, membuat para mahasiswa terbiasa berpikir fokus pada persoalan prestasi akademik, tanpa belajar beradaptasi dan mengedukasi diri untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari gerakan ideologi konservatisme dan neo-liberalisme dengan menggiring para mahasiswa untuk semata-mata mencari ijazah sebagai persyaratan kerja di dunia industri, sehingga menghasilkan manusia-manusia dengan nir-kesadaran politik.

Sementara bagi mereka yang tamat SMA dan langsung terjun ke masyarakat atau bekerja di berbagai instansi, kebiasaan-kebiasaan yang dialami selama menjalani kehidupan dunia sekolah akan terus terbawa. Mereka kurang peka terhadap berbagai dinamika yang terjadi di sekitar dirinya, dan mereka juga kurang mampu berpikir rasional kritis terhadap berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara (baca: kehidupan politik). Dengan meminjam terminologi Paulo Freire (dalam Fakih, 2002:32) mereka cenderung berperilaku atas dasar "kesadaran naif", yakni sebuah kesadaran yang dalam memahami dan menganalisis berbagai dinamika yang terjadi, lebih melihat aspek manusia sebagai akar penyebab timbulnya masalah tersebut, dibandingkan melihat akar permasalahan itu bersumber pada sistem dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut kesadaran ini, masalah etika, kreativitas, dan *the need for achievement (N'ach)*, dianggap sebagai penentu terjadinya perubahan sosial.

Misalnya, dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat berada dalam kondisi miskin, mereka cenderung melihat bahwa yang menjadi penyebab kemiskinannya adalah diri mereka sendiri, yakni karena mereka malas, tidak memiliki jiwa kewirausahaan, tidak memiliki *rasa jengah*, dan lain sebagainya. Bagi penganut kesadaran naif, mereka tidak mampu melihat bahwa sistem dan struktur sosial juga bisa menjadi biang kerok munculnya berbagai permasalahan dalam masyarakat, sebagaimana dipahami oleh para penganut kesadaran kritis. Oleh karenanya, pendekatan struktural menghindari *blaming the victims*, yaitu pendekatan yang menganalisis secara kritis bahwa struktur, sistem sosial, ekonomi, dan sosial budaya, serta bagaimana kaitan tersebut berakibat pada keadaan masyarakat.

Agar masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup tidak terjebak pada kesadaran naif, maka dalam analisis ini akan dikemukakan beberapa strategi yang dapat dilakukan, khususnya oleh kalangan intelektual muda dalam hal mengedukasi masyarakat untuk dapat melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama di tengah merebaknya pandemi Covid-19. Adapun strategi dimaksud adalah *pertama*, para intelektual muda jangan sampai terjebak pada diskursus yang dibangun media massa *mainstream*. Sebab secara umum politik keredaksian pertimbangannya berada di sekitar profit

dan legitimasi kuasa negara. Oleh karena itu, para intelektual muda dalam mengedukasi diri sendiri dan masyarakat sebaiknya fokus mengkaji dan merespons peristiwa dan isu-isu di tingkat lokal yang terjangkau untuk dipahami secara detail, tepat, dan benar.

Hal ini penting sebab menurut Subkhan (2016:56) isu-isu nasional hanya boleh dijadikan fokus jika memang betul-betul diketahui data, fakta, dan informasinya serta tidak sekadar mengandalkan wacana yang dibangun oleh media massa *mainstream*. Hal ini dikarenakan strategi dalam pilihan optimalnya adalah di luar sistem, karena sasarannya bukan lagi para intelektual, melainkan masyarakat awam yang belum mempunyai perangkat pengetahuan dan wawasan mengenai literasi media. *Kedua*, bagi mereka yang berada dalam sistem, misalnya sistem pendidikan formal (sekolah, kampus, dan staf media massa), seharusnya dapat ikut secara aktif mengedukasi masyarakat dalam hal melakukan adaptasi dan literasi terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini penting, sebab menurut Piliang (2004:109) kondisi kehidupan masyarakat *dewasa* ini, hampir seluruh energinya dipusatkan bagi pelayanan hawa nafsu, yakni nafsu kebendaan, kekayaan, kekuasaan, seksualitas, popularitas, kecantikan, dan lain-lain, sementara hanya menyisakan sedikit ruang bagi penajaman hati, penumbuhan kebijaksanaan, peningkatan kesalehan, dan pencerahan spiritual.

Hal senada dikatakan pula oleh Felix Guattari (1981:86) bahwa kini tak ada lagi perjuangan revolusioner yang dapat hidup tanpa menghambakan dirinya pada kenikmatan hawa nafsu. Menghadapi kondisi masyarakat sebagaimana digambarkan Piliang dan Guattari di atas, maka strategi *ketiga*, yang dapat dilakukan para intelektual muda bangsa ini dalam mengedukasi masyarakat agar mampu beradaptasi dengan dinamika yang sedang terjadi, termasuk dinamika dalam kehidupan keberagamaan adalah mengembalikan fungsi pendidikan, yakni pendidikan harus dibangun berlandaskan nilai-nilai objektivitas, keilmiah (*scientific*), dan kebijaksanaan (*virtue*). Bukan sebaliknya, pendidikan justru dimuati oleh nilai-nilai komersial sebagai refleksi keberpihakan pendidikan pada kekuasaan kapital.

2.2 Dinamika Aktivitas Keberagamaan Masyarakat Hindu Bali di Era Pandemi Covid-19

Masyarakat Hindu di Bali banyak diwarnai oleh kehidupan ritual (upacara) keagamaan atau sering juga disebut *yadnya*, seperti hari raya *galungan*, *kuningan*, *nyepi*, *tumpek*, *anggar kasih*, *kajeng kliwon*, upacara *pitra yadnya* (*ngaben*), dan lain-lain. Belum lagi upacara yang bersifat personal, seperti *ngodalin* di *pura khahyangan tiga*, di *pura dadia*, dan kuil keluarga (*merajan*) masing-masing. Menurut Agastia (dalam Ajeg Bali, 2004:24) *yadnya* berhubungan erat dengan pemahaman dan penerapan hakikat ajaran tentang *dana*, *punia*, dan *kirti* yang di

arahkan pada pembebasan diri. Sementara *dharma* dalam makna hakikinya adalah pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum kesejagatan (*the rule of the nature*). Lebih lanjut menurut Agastia, pemahaman dan penghayatan prinsip-prinsip hukum kesejagatan inilah yang akan memberikan pengertian tentang hakikat hidup dan tujuan hidup manusia. Pemahaman dan pengakuan akan prinsip-prinsip hukum kesejagatan itu lantas diekspresikan ke dalam *gita semesta* (*the song of the nature*, yakni *Ang, Ung, Mang –Om*). Ke arah inilah ajaran *Catur Purusa Atha* (*dharma, artha, kama, dan moksa*) ditujukan, yaitu kebebasan abadi dan kesejahteraan seantero semesta, yakni *moksartham jagadita*.

Namun, berkembangnya pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk Bali, membuat masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Hindu di Bali harus mampu melakukan edukasi dan adaptasi diri terhadap dinamika yang sedang terjadi. Sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya, bahwa berkembangnya pandemi Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan berbagai spekulasi atau persepsi dalam masyarakat. Salah satunya adalah pandemi ini dianggap wabah yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, dan untuk menghindari penularan virus Covid-19 secara masif, maka pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang disingkat (PSBB). Atas kebijakan ini kemudian muncul berbagai tanggapan dalam masyarakat, yakni ada sebagian masyarakat yang menanggapi bahwa dengan PSBB pemerintah telah melakukan pembatasan atas pelaksanaan upacara keagamaan, bahkan yang lebih ekstrim lagi pemerintah dianggap melarang masyarakat melakukan aktivitas keagamaan. Misalnya, protes masyarakat terhadap kasus *ngaben* massal di Desa Sudaji Buleleng yang di bawa ke ranah hukum merupakan salah satu bentuk tanggapan masyarakat Hindu di Bali yang menganggap bahwa kebijakan pemerintah terkait PSBB, sebagai salah satu bentuk pelarangan terhadap aktivitas keagamaan. Meski pun akhirnya Kapolres Buleleng mengheniken penyidikan atas kasus tersebut berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/56a/VII/2020/Reskrim yang diterbitkan pada 31 Juli 2020 (<https://www.nusabali.com>, 6 Agustus 2020, diakses 7 Desember 2020), tetapi masyarakat terlanjur telah menganggap bahwa pemerintah melarang aktivitas keagamaan di lingkungan masyarakat Hindu di Bali. Demikian halnya dilarangnya umat Hindu melakukan pawai *ogoh-ogoh* dan pembatasan masyarakat untuk mengikuti upacara melasti menjelang perayaan hari raya Nyepi yang jatuh pada tanggal 25 Maret 2020, telah menimbulkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang setuju dengan pembatasan tersebut dengan alasan untuk memutus rantai penularan pandemi Covid-19 yang sangat mematikan, sementara ada pula sebagian masyarakat yang menganggap bahwa hal itu hanya sebuah konspirasi.

Menganalisis berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan sebagaimana digambarkan di atas, gagasan Soelaiman (1998:3) tampaknya dapat dijadikan rujukan. Menurutnya, bahwa sifat tradisi yang ada di Indonesia penuh diliputi oleh mitos dan upacara keagamaan. Perjalanan hidup masyarakat Indonesia banyak bergantung pada rangkaian hubungan-hubungan berbagai macam sistem sosial menuju pada suatu derajat tinggi yang terpola. Menurut John sebagaimana dikutip Soelaiman (1998:4) bahwa perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat akibat modernisasi selama ini, belum sepenuhnya dapat diadaptasikan oleh masyarakat ke dalam pola perilaku yang bersifat fleksibel, akan tetapi kebiasaan lamanya masih tetap membayangi pikiran mereka. Akibatnya, tradisi kehidupan keberagaman semacam ini masih terkait kuat pada proses modernisasi, bahkan sulit ditinggalkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk Bali.

Guna menghindari adanya benturan antara kebijakan negara yang cenderung berbasis pada nilai-nilai modernisme dengan pola-pola perilaku sosial kemasyarakatan di Indonesia, yang banyak berorientasi pada filsafat ke-*Ilahi*-an yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal (*local genius*), maka perlu dilacak berbagai konsepsi manusia Indonesia dalam perspektif budaya, sejarah, atau sudut pandang arkeologi dalam konsep *local genius*, dan agama. Hal ini penting sebab untuk memadukan dua kutub yang saling berlawanan, yakni antara modernisme dan tradisionalisme, maka inti dari kedua entitas tersebut harus dipahami sebab jika tidak, akan terjadi tarik-menarik antara kedua kutub tersebut yang sulit dicari titik *equilibrium*-nya. Seperti dikatakan Fakih (2004:29—30) bahwa modernisasi dengan pola pikir *oposisi biner*-nya telah mempengaruhi keberlangsungan hidup sebuah tradisi. Hal senada dikemukakan pula oleh Giddens (2005:43) bahwa penerimaan terhadap prinsip-prinsip modernisme (efektif, efisien, dan pragmatis), berarti masyarakat harus mengontraskan, bahkan membenturkan dirinya dengan segala sesuatu yang berbau tradisi. Bahkan menurut penganut aliran modernisme revolusioner, keterbelakangan negara-negara dunia ketiga diduga bersumber pada sistem sosial dan kelembagaan tradisional yang dimilikinya (Atmadja, 2010:32). Terkait hal tersebut, dalam rangka mewujudkan modernisme dalam kehidupan masyarakat, maka berbagai sistem sosial dan kelembagaan tradisional harus direformasi.

Hal ini di dasarkan atas asumsi bahwa modernisasi merupakan suatu gerakan untuk mewujudkan institusi-institusi dalam masyarakat yang berbasis nilai-nilai efisiensi, efektif, ekonomis, dan rasional. Menurut Rich (1999:276) untuk mewujudkan cita-cita modernisme seperti itu, maka perlu dilakukan reformasi kultural, terutama terhadap hal-hal yang berbau tradisional. Akibat gerakan modernisasi semacam ini, maka banyak pengetahuan masyarakat pedesaan, termasuk pengetahuan masyarakat Bali, terserang oleh reflektivitas, lalu digantikan

dengan pengetahuan yang lebih pragmatis, sehingga kesejahteraan hidup manusia menjadi meningkat. Akibat lainnya, masyarakat lokal banyak kehilangan modal kultural dan sosial, yang sesungguhnya sangat *adiluhung*. Hal ini penting disadari oleh masyarakat, sebab menurut Colletta (1987) hilangnya nilai-nilai *adiluhung* budaya bangsa, dapat menimbulkan masalah baru, sebab tidak semua modal kultural dan sosial menghambat pembangunan, bahkan banyak di antaranya yang justru mendukung pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itulah, persoalan edukasi dan adaptasi masyarakat terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat menjadi sangat penting dilakukan.

2.3 Adaptasi Masyarakat Hindu dalam Berbagai Aktivitas Keberagamaan di Era Pandemi Covid-19

Sebelum diuraikan proses adaptasi yang harus dilakukan oleh umat Hindu, khususnya di Bali dalam menghadapi wabah Covid-19, dalam menjalani kehidupan keberagamaan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan sepintas mengenai inti dari *kehidupan* keberagamaan. Secara mitologi-filosofi inti ajaran keagamaan apakah Hindu, Bhudha, Islam Abangan, dan Kebathinan, memperlihatkan adanya keseimbangan antara Tuhan atau tokoh *Ilahi* dengan manusia. Menurut Hadiwijono (1983:149) secara filsafati, Agama Hindu, Budha, dan Kebathinan Islam mengajarkan bahwa manusia dialirkan ke luar *Dzat Ilahi*. Oleh karenanya manusia tidak dipandang sebagai penjelmaan atau penumbuhan *Ilahi*, melainkan sebagai penjelmaan atau penumbuhan makhluk yang paling lengkap dan sempurna.

Oleh karenanya, tidak mengherankan jika dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, inti ajaran ini tercermin dalam struktur sosial, kelompok *elite* penguasa, yang cenderung ingin memiliki sifat-sifat ke-*Ilahi*-an. Misalnya, tidak mau menerima kritik, dan cenderung memaksakan kehendak disertai penerapan kekuatan. Dalam praktik kehidupan nyata, kondisi ini bagaikan gayung bersambut, sebab menurut Mulder (1981:31) ajaran kebathinan mengajarkan manusia selalu dalam keadaan seimbang, tenang, dengan jagat raya, *nrimo*, dan sujud kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga *Gusti* dan *Kawula* dapat bersatu padu (*manunggaling kawula gusti*). Implikasi dari ajaran ini tercermin dalam kebijaksanaan negara yang senantiasa menekankan stabilitas politik. Oleh karenanya, kehidupan negara yang berorientasi pada persoalan stabilitas, keserasian, dan keseimbangan selalu diprasangkai menjadi dalih. Akibatnya, aspirasi murni masyarakat acapkali terabaikan, bahkan tidak jarang isu penting ini dimanipulasi untuk kepentingan status *quo*.

Dalam kondisi sistem struktur sosial, dan mentalitas kaum *elite* penguasa seperti itu, maka untuk mencari keseimbangan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara, termasuk dalam kehidupan keberagamaan, masyarakat, termasuk masyarakat Hindu perlu melakukan adaptasi, baik dalam konteks kehidupan sosial politik maupun dalam kehidupan sosial religius (baca:kehidupan keberagamaan). Dengan meminjam terminologi Parsonian, agar manusia atau masyarakat dapat bertahan hidup setidaknya mereka harus mampu mengaplikasikan empat sistem bertindak yang dikenal dengan sebutan *action teory* dengan skema AGIL-nya, yakni *pertama*, manusia harus mampu melakukan adaptasi (*adaptation*), yakni penyesuaian diri terhadap setiap perubahan yang terjadi; *kedua*, memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan (*goal attainment*); *ketiga*, melakukan integrasi (*integration*) dalam arti mampu melakukan koordinasi serta penyesuaian bagian-bagian dari sistem, sehingga seluruhnya fungsional, dan *keempat*, dapat melakukan pemeliharaan terhadap pola-pola yang sudah ada yang dalam bahasanya Parsons disebut latensi (Poloma,1992:183—184).

Jika mengacu pada gagasan Parsons di atas dan jika dikaitkan dengan adaptasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali, khususnya dalam menjalankan berbagai aktivitas keberagamaan di masa pandemi Covid-19 ini, adalah *pertama*, harus mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai kebijakan pemerintah terutama dalam kaitannya dengan upaya memutus penyebaran Covid-19 secara masif. Misalnya, masyarakat dalam menjalankan kehidupan keagamaan, terutama dalam hal melakukan upacara agama harus mentaati protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah, seperti wajib memakai masker, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, melakukan *social distancing*, menjaga kesehatan, dan lain-lain. Hal ini semua dimaksudkan untuk kepentingan bersama agar masyarakat Indonesia cepat bisa keluar dari bayang-bayang penyakit mematikan tersebut.

Kedua, masyarakat dengan penuh kesadaran harus mampu menjaga kesehatan diri dan lingkungannya, sehingga tidak mudah terserang oleh virus Corona; *Keiga*, masyarakat harus mampu melakukan literasi terhadap kebijakan negara, dalam arti mampu memahami dan menganalisis bahwa dibatasi dalam melakukan aktivitas bukan berarti dilarang. Artinya, masyarakat tetap dibolehkan melakukan aktivitas keagamaan, seperti upacara agama, membersihkan tempat-tempat peribadatan, dan lain-lain sejauh dalam proses pelaksanaannya jangan melakukan kerumunan yang melebihi kapasitas, sehingga pelaksanaan protokol kesehatan tetap dapat dijalankan. *Keempat*, masyarakat harus mampu melakukan adaptasi terhadap sistem kerja, yang dulu sebelum berkembangnya wabah Covid-19 cenderung dilakukan secara luring (*luar jaringan/of line*) kini harus dilakukan secara daring (*dalam jaringan/on-line*).

Untuk bisa melakukan adaptasi sebagaimana diuraikan di atas, mau tidak mau, suka tidak suka, kemampuan literasi masyarakat harus di arahkan pada kesadaran bahwa

modernisme yang berkembang demikian pesatnya saat ini, tidak saja mengakibatkan terjadinya perubahan fisik dan sistem sosial terhadap masyarakat bangsa-bangsa di dunia, tetapi juga telah menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem budaya masyarakat, termasuk masyarakat Bali, yakni pada aspek spiritualitas. Di mana spiritualitas yang mewarnai kehidupan masyarakat Bali tempo dulu adalah spiritualitas tradisional yang menekankan hubungan harmoni pada tiga aspek, yakni hubungan manusia dengan Tuhannya (*parhyangan*), hubungan manusia dengan manusia lainnya (*pawongan*), dan hubungan manusia dengan lingkungan alamnya (*palemahan*) yang dilandasi oleh nilai-nilai agama yang *adhiluhung*. Akan tetapi masuknya paham modernisme ke berbagai plosok dunia dewasa ini, telah membuat spiritualitas tradisional model ini bergeser ke arah spiritualitas modern.

Beberapa unsur spiritualitas modern menurut Griffin (2005) adalah (1) manusia tidak lagi memahami dirinya dalam konteks komunal, melainkan dalam konteks diri individualistik; (2) manusia dalam hidupnya membuat pemilahan yang berlawanan, seperti modern Vs tradisional, sains modern Vs sains tradisional, dan lain-lain; (3) manusia bersifat *futurisme*, yakni manusia dewasa ini berkecenderungan hanya menggali makna-makna masa kini dalam hubungannya dengan masa depan, sementara makna-makna yang berhubungan dengan masa lampau di lupakan begitu saja; dan (4) manusia penganut spiritualitas modern juga cenderung mengutamakan kebutuhan materialisme atau ekonomisme, sementara kebutuhan akan hubungan dengan manusia dalam konteks masyarakat dinomorduakan. Dengan meminjam gagasan Dayakisni dan Yuniarti (2004) dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran bahwa masyarakat, termasuk masyarakat Bali dewasa ini telah mengalami pergeseran kebudayaan, yakni dari kebudayaan kolektivistis berdasarkan roh kebudayaan Bali, kini bergeser ke arah kebudayaan individualistik berdasarkan roh kebudayaan Barat. Akibat semua ini, masyarakat Bali yang sebelumnya terkenal sebagai masyarakat komunal yang berorientasi pada upaya pemeliharaan sikap harmoni, kohesi, dan kerja sama, kini telah beralih pada tipikal masyarakat yang sarat dengan kepentingan, keinginan, dan tujuan pribadi.

Dengan tipikal masyarakat seperti itu, akhirnya masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan adaptasi terhadap berbagai dinamika yang berkembang, termasuk merebaknya pandemi Covid-19. Betapa tidak sebab apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah masyarakat bebas menafsirkan sesuai kepentingannya masing-masing. Jika hal ini yang terjadi, maka pemahaman tentang spiritualisme modern yang menekankan sifat-sifat individualisme, dualisme-dikotomik, *futurisme*, dan materialisme-ekonomisme, perlu direkonstruksi pemaknaannya, sehingga masyarakat tidak terjebak pada filsafat pragmatisme yang bersumber pada kebudayaan Barat.

II. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa simpulan antara lain:

1. Ada beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam mengedukasi diri dan melakukan adaptasi terkait dengan dinamika kehidupan keberagaman di era pandemi Covid-19. Adapun strategi dimaksud antara lain, *pertama*, jangan terjebak pada diskursus yang dibangun media massa *mainstream* dalam menanggapi isu-isu penanganan pandemi Covid-19. Sebab secara umum politik keredaksian pertimbangannya berada di sekitar profit dan legitimasi kuasa negara. *Kedua*, bagi mereka yang berada dalam sistem, misalnya sistem pendidikan formal (sekolah, kampus, dan staf media massa), harus aktif dan kreatif mengedukasi masyarakat dalam hal melakukan adaptasi dan literasi terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. *Ketiga*, mengembalikan fungsi pendidikan, yakni pendidikan harus dibangun berlandaskan nilai-nilai objektivitas, keilmiahan (*scientific*), dan kebijaksanaan (*virtue*).
2. Kehidupan masyarakat Hindu Bali, banyak diwarnai oleh kehidupan ritual (upacara keagamaan), seperti, perayaan *galungan*, *kuningan*, *Nyepi*, *anggar kasih*, *tumpek*, upacara *pitra yadnya* (*ngaben*) dan lain-lain yang pelaksanaannya dilakukan, baik secara individu maupun kelompok. Namun, berkembangnya pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan himbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, dan melakukan berbagai kegiatan, seperti bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah (*work from home/whf*). Terhadap kebijakan tersebut munculah berbagai tanggapan dari masyarakat, seperti ada yang menganggap pemerintah membatasi pelaksanaan upacara keagamaan, bahkan ada pula yang menganggap bahwa pemerintah melarang pelaksanaan upacara keagamaan. Untuk menghindari adanya tanggapan yang kurang berimbang terhadap kebijakan pemerintah, maka perlu strategi mengedukasi masyarakat, sehingga tidak terjadi hubungan disharmoni antara masyarakat dengan pemerintah.
3. Beberapa adaptasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi dinamika kehidupan keberagaman adalah *pertama*, harus mentaati protokol kesehatan, seperti wajib memakai masker, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, melakukan *social distancing*, menjaga kesehatan, dan lain-lain. *Kedua*, masyarakat dengan penuh kesadaran harus mampu menjaga kesehatan diri dan lingkungannya, sehingga tidak mudah terserang oleh virus Corona; *Keiga*, masyarakat harus mampu melakukan

literasi terhadap kebijakan negara, dalam arti mampu memahami dan menganalisis bahwa dibatasi dalam melakukan aktivitas bukan berarti dilarang. *Keempat*, masyarakat harus mampu melakukan adaptasi terhadap sistem kerja, yang dulu sebelum berkembangnya wabah Covid-19 cenderung dilakukan secara luring (luar jaringan/*of line*) kini harus dilakukan secara daring (dalam jaringan/*on-line*).

DAFTAR PUSTAKA

Agastia, I.B., 2004. *Ajeg Bali Sebuah Cita-Cita*. Denpasar: PT. Bali Post.

Atmadja, Nengah Bawa, 2010. *Ajeg Bali, Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Yogyakarta: LkiS.

Fakih, Mansour, 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST PRESS.

Fakih, Mansour, 2004. *Bebas dari Neoliberalisme*. Yogyakarta: INSIST PRESS Printing.

Fuad, Hassan, 2004. "Pendidikan adalah Pembudayaan". Dalam Widiastono (*ed.*) Pendidikan Manusia Indonesia. Jakarta: Kompas. Hal 52—66.

Griffin, D. R. 2005. "Pendahuluan Spiritualisme dan Postmodern". David Ray Griffin (*ed.*) *Visi-Visi Post Modern Spiritualitas dan Masyarakat*. (A. Gunawan Admiranto, trj.) Yogyakarta: Kanisius.

Guattari, Felix. 1981. *Molecular Revolution: Psychiatry & Politics*. London Penguin Book.

Hadiwijono, Harun, 1983. *Manusia dalam Kebatinan Jawa Masa Kini*. Jakarta: Sinar Harapan.

<https://www.nusabali.com>

Mulder, Niel, 1981. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Sinar Harapan dan Gajah Mada University Press.

- Piliang, Yasraf, Amir, 2004. *Dunia yang Dilipat Tamsya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jala Sutra.
- Poloma Margaret, M. 1992. *Sosiologi Kontemporer*. (Yasogama, trj.) Yogyakarta: CV. Rajawali bekerja sama dengan Yayasan Solidaritas Gajah Mada.
- Rich, B., 1999. *Menggadaikan Bumi Bank Dunia Pemikiran Lingkungan dan Krisis Pembangunan*. (A.S Burhan dan Benu Hidayat, trj.) Jakarta: INFID.
- Sanjaya, Wina, 2008. *Strategi Pembelajaran, Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Soelaiman, Munandar, 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi, Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perobahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subkhan Edi, 2016. Pendidikan Kritis, Kritik atas Praksis Neo-Libralisasi dan Standarisasi Pendidikan.
- Syaifudin, 2020. Negara, Masyarakat, dan Era New Normal. Dalam <https://kolom.tempo.co>, 10 Juni 2020.

Flexibilitas Pembelajaran Jarak Jauh Sebagai Adaptasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Ni Made Indiani. indianimade@gmail.com

Pascasarjana. Universitas Hindu Indonesia

Abstract

It has been ten months since the corona virus entered Indonesia, starting March 2, 2020, Indonesian people carry out their daily lives by carrying out a health protocol, where the use of masks is a complement to clothing. Furthermore, since March 24, 2020, instructions for learning and working from home were also widely announced. Schools suddenly have to do distance learning with an online system. This is not easy to implement, due to various obstacles, from students, as well as teachers, the environment, and internet access, which are not yet available. As time goes by, online learning is being accustomed to be carried on. The teachers and students have begun to accept the situation and have begun to adapt the situations that epidemiologists find very hostile, so that the health factor takes precedence. The establishment of distance learning is an adaptation of learning during a pandemic as well as accelerating the implementation of the Industrial Revolution 4.0. as the demands of technological progress and also as a preparation for learning independence. The implementation of constructivistic theory is very appropriate to be used in distance learning. Collaboration is paramount for students, teachers and institutions to achieve educational goals. Proper education must be able to equip students with the skills necessary to maintain health, remain productive and live a useful life.

Key words: health protocol; distance learning; industrial revolution 4.0; constructivistic theory; learning independence.

Abstrak

Sudah sepuluh bulan sejak virus corona masuk ke Indonesia yakni mulai 2 Maret 2020, masyarakat Indonesia melaksanakan kehidupan sehari-harinya dengan melakukan protokol kesehatan, di mana penggunaan masker menjadi pelengkap berbusana. Selanjutnya sejak 24 Maret 2020 pula instruksi belajar dan bekerja dari rumah diumumkan secara luas. Sekolah secara tiba-tiba harus melakukan pembelajaran jarak jauh dengan *system online* atau melalui

daring (dalam jaringan). Hal ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan, karena adanya berbagai kendala baik dari siswa, guru, lingkungan, maupun akses internet yang memang secara nyata belum tersedia. Seiring dengan berjalannya waktu, pembelajaran secara *online* sudah mulai terbiasa dilakukan. Para guru, dan siswa sudah mulai menerima keadaan dan mulai beradaptasi dengan situasi yang menurut ahli epidemiologi sangat tidak bersahabat, sehingga faktor kesehatan lebih diutamakan. Penetapan pembelajaran jarak jauh melalui daring merupakan adaptasi pembelajaran di masa pandemic sekaligus mempercepat penerapan Revolusi Industri 4.0. sebagai tuntutan kemajuan teknologi, dan juga sebagai persiapan menghadapi merdeka belajar. Implementasi teori konstruktivistik sangat tepat dipergunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Kolaborasi adalah yang terpenting bagi siswa, guru dan institusi untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan yang tepat harus dapat membekali siswa dengan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan, tetap produktif dan hidup bermanfaat.

Kata kunci: pembelajaran daring; protokol kesehatan; revolusi industry 4.0.; teori konstruktivistik; merdeka belajar.

I. Pendahuluan

Sejak masuknya apa yang disebut dengan wabah covid 19, seluruh penduduk dunia termasuk Indonesia dan Bali mengalami perubahan di dalam menjalani kehidupannya. Baik itu perubahan dalam melakukan kehidupan sehari-hari (seperti makan, tidur, bepergian, berkunjung ke suatu tempat, bersalaman dan lain-lain), maupun kehidupan berusaha untuk mencari penghidupan,(sisi ekonomi) serta untuk mempertahankan kehidupannya, yakni mengubah kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan. Tidak berhenti sampai di situ saja, adaptasi dilakukan dalam kerangka untuk menjaga kesehatan individu dan kesehatan masyarakat, manusia harus berubah secara total. Total dimaksud meliputi aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Sehubungan dengan belum diketahuinya kapan virus Covid 19 ini akan berakhir, maka manusia harus secara sadar melakukan perubahan-perubahan serta dapat beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah disepakati, seperti menjaga jarak, sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, mempergunakan masker, serta selalu menjaga pola makan yang baik dan mengatur aktivitas yang seimbang sehingga terhindar dari penyakit dan senantiasa hidup sehat dan bahagia.

Sejalan dengan hal tersebut hampir semua kegiatan yang dilakukan harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan belajar di sekolah tingkat dasar dan

menengah maupun di tingkat pendidikan tinggi. Paradigma belajar mengalami perubahan yakni, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, tetapi ada sejumlah alternative yang dapat dipergunakan sebagai pendukung sumber belajar seperti penelusuran literature melalui internet atau melalui e-jurnal yang sudah tidak sulit lagi dicari, sepanjang tersedia internet, sebagaimana dikatakan oleh Yuniarti, D., Subiyakto, B., & Putra, M. A. H. (2020) bahwa sumber belajar bisa datang dari mana saja seperti buku, internet, dan lingkungan selama itu terkait dengan materi yang diajarkan. Dunia pengetahuan sudah semakin luas jangkauannya. Masa pandemi covid 19 ini telah mewariskan cara belajar yang disebut dengan pembelajaran dalam system jaringan. Sebetulnya pembelajaran dengan sistem daring atau *online system* ini sudah ada sebelum meluasnya pandemi covid 19, dan telah banyak dipergunakan oleh universitas besar dan terkenal yang memiliki siswa, mahasiswa di seluruh dunia (seperti Stanford University), namun sebagian besar masyarakat sekolah di Indonesia belum melakukannya, terlebih lagi kondisi Indonesia yang merupakan kepulauan sehingga banyak sekali sekolah yang berada di daerah yang tidak terjangkau internet atau

blank spot. Meskipun adanya keterbatasan di beberapa wilayah tersebut, belajar dari rumah adalah satu pilihan yang tidak bisa dielakkan karena menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus lebih menjadi prioritas dalam masa sekarang. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tertanggal 4 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19) yang salah satu pointnya adalah “Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan” .

II. Diskusi Dan Pembahasan

2.1 Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pembelajaran

Sejak diumumkannya wabah virus corona 19 masuk ke Indonesia, sejak itu pula masyarakat sekolah dan perguruan tinggi diliburkan. Artinya siswa dan mahasiswa belajar dan atau ujian dilakukan dari rumah. Seluruh penduduk di Indonesia termasuk penduduk Bali melaksanakan seruan belajar atau bekerja dari rumah/ *work from home*. Hal ini dipertegas melalui “Peraturan Gubernur Bali No.46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru tertanggal 24 Agustus 2020”.

Pada awalnya semua terasa aneh, tidak menyenangkan, betapa tidak, pekerjaan siswa, mahasiswa, guru, dosen sehari-hari berada di sekolah, belajar bersama teman-teman, bertemu dan bercanda atau bahkan berkelahi, di masa covid 19 ini harus tinggal di rumah, hanya bisa bertemu melalui ruang-ruang meeting, seperti *zoom*, *google meet*, atau *whatsApp/video conference*. Meski masyarakat sekolah taat tinggal di rumah namun tetap memiliki rasa kekuatiran, kapan hal ini akan berakhir dan sangat berharap kepada pemerintah agar cepat menemukan vaksin untuk pencegahan covid 19 dan mulai bangkit dari keterpurukan ekonomi. Seiring dengan berjalannya waktu, kejenuhan mulai menghinggapinya setiap insan yang berada di rumah, dan pemerintah menghimbau agar kita mulai bisa berdamai dengan covid 19, dan bersahabat dengan situasi. Pembiasaan diri dengan situasi yang ada, yakni tetap waspada terhadap penularan virus covid 19, untuk itu seluruh masyarakat harus ingat menerapkan protocol kesehatan yakni dengan 1) menjaga jarak satu dengan yang lainnya, 2) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, atau setidaknya mempergunakan handsanitizer, dan 3) memakai masker yang benar. Namun sesungguhnya tidak cukup sampai pelaksanaan 3 M itu saja, lebih jauh lagi kita harus bisa menjaga tubuh tetap imun, segar selalu sehat. Dengan demikian sangat dianjurkan untuk makan dan minum dengan gizi yang cukup plus vitamin C, Vitamin E, dan Vitamin D. seperti yang diajarkan lebih detail lagi oleh Dinas Kesehatan Propinsi Bali di bawah ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Propinsi Bali. 2020

Adapun hal-hal yang perlu digarisbawahi dalam pembelajaran secara daring atau *online* adalah bahwa guru dan siswa/mahasiswa hendaknya tetap produktif melaksanakan pembelajaran, meskipun diakui pembelajaran secara daring dirasakan kurang efektif. Sangat

dituntut adanya kerjasama antara guru, siswa/mahasiswa dan orangtua. Menurut Founder Kelas Pintar, Fernando Uffie, pembelajaran *online* ataupun pendidikan berbasis teknologi sejatinya harus bisa mengakomodir peran guru, sekolah dan orang tua dalam proses pendidikan siswa. Pembelajaran *online* juga harus bisa menghadirkan interaksi diantara mereka, untuk memastikan pendidikan karakter tetap berjalan meski dilakukan secara virtual. (<https://gadgetsquad.id/news/ini-dia-cara-efektif-adaptasi-sistem-pendidikan-di-era-new-normal/>). Pada pembelajaran jarak jauh baik guru maupun peserta didik/mahasiswa mengalami hal-hal yang baru dalam hal proses pembelajaran, karena sudah terbiasa dengan kebiasaan lama yakni, bertemu secara fisik di suatu tempat yang disebut kelas atau sekolah. Pembelajaran yang dilaksanakan secara virtual ini, tidak mudah dilakukan terutama pada anak-anak di tingkat dasar. Sesungguhnya PJJ yakni pembelajaran berbasis teknologi itu mudah dilakukan untuk anak millennial, yakni anak yang sekarang berusia 18 tahun ke atas, atau mereka yang duduk di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan mahasiswa, karena mereka tergolong memasuki masa pendidikan andragogy. Dengan demikian banyak hal-hal yang harus disesuaikan oleh pendidik dan yang dididik, bahkan lingkungan pun harus turut memberi dukungan agar tujuan pembelajaran jarak jauh ini bisa berhasil guna.

2.2. Pembelajaran Jarak Jauh untuk Siapa ?

Fenomena di atas menjadi alasan bagi ranah pendidikan untuk beralih ke pembelajaran *online* daripada belajar tatap muka, demi proses belajar dan mengajar dapat terlaksana secara rutin dan berkesinambungan. Walaupun diakui banyak sekolah dan perguruan tinggi yang telah menerapkan pembelajaran *online* atau *blended learning*, jauh sebelum covid 19 tetapi lebih banyak sekolah dan perguruan tinggi dan atau lembaga pendidikan lainnya terutama di negara Indonesia yang harus mengubah pembelajarannya, pindah ke sistem *online*.

Jika dilihat dari usia mahasiswa yang duduk di Universitas yang dimulai dari usia 17 tahun ke atas, maka dapat dikatakan bahwa mereka lebih mudah beradaptasi, lebih terbuka, dan lebih mobile. Lebih mampu belajar mandiri, sudah mengetahui cara belajar yang baik, dan lebih menyukai tantangan. Tantangan seringkali membuatnya termotivasi untuk belajar. Dengan demikian motivasi dari dalam lebih dominan daripada motivasi dari luar. Mahasiswa juga dapat memahami masalah hukum, sehingga dalam pembelajaran jarak jauh yang menggunakan kecanggihan teknologi, sudah sepatutnya mereka juga harus memahami apa yang disebut dengan peraturan-peraturan tentang ITE (UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Berdasarkan teori belajar Costructivism dari Jean Piaget, 'bahwa individu yang sesungguhnya adalah makhluk yang istimewa / unik. Setiap siswa dinilai memiliki keunikan masing-masing. Hal inilah yang memaksa seorang guru untuk memiliki berbagai strategi alami dalam mengelola kelas, sehingga individu yang tergabung dalam kelas tersebut merasa mendapatkan pelayanan yang optimal. Jika ini terpenuhi, maka yang bersangkutan akan merasa lebih bertanggung jawab dalam belajar. Fungsi guru hanya sebagai pembimbing, kemudian siswa dan mahasiswa diharapkan berkembang sesuai dengan arah dan tingkat kemampuan abstraksinya. Hal inilah yang kemudian menggugah motivasi untuk selalu aktif belajar, hingga tujuan yang ditetapkan oleh guru tercapai.

Selanjutnya apa yang disiapkan oleh guru dalam hal pembelajaran *online*? Guru harus mempersiapkan materi dengan baik, cakupan materi, dan sumber referensi. Begitu pula dalam pemilihan strategi pembelajaran, agar tidak monoton dan membosankan, namun sebaliknya strategi pembelajaran yang dipilih dapat menantang siswa untuk berkreasi. Selanjutnya menentukan alat yang akan digunakan, seperti menggunakan LMS (*learning management system*) di lembaga atau mencoba menggunakan alat yang ditawarkan di media social, seperti WhatsApp Group, Google meet, Zoom meeting dan lain-lainnya. Intinya, antara siswa, mahasiswa, teknologi yang digunakan, dan guru dalam pembelajaran *online* harus saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara sinergis, tentunya dengan dukungan koneksi yang baik.

2.3 Perbedaan antara kelas offline dan kelas online.

Untuk kelas *off line* atau kelas tatap muka, guru serta siswa datang ke *venue* pada waktu tertentu untuk membahas topik yang akan dibahas. Waktu sudah diatur sedemikian rupa sehingga setiap orang harus datang sesuai jadwal, jika tidak acara akan hilang/lewat. Keterlibatan guru dan siswa/mahasiswa dalam situasi nyata, mereka dapat menggunakan kontak mata, gerak tubuh, atau komentar secara langsung untuk menunjukkan tanggapan mereka, bagaimana mereka terlibat. Selain itu lingkungan nyata juga ditampilkan secara *off- line* saat mereka berkumpul, guru dapat melihat apakah siswa sedang dalam situasi yang baik atau tidak (*mood*), apakah mereka termotivasi tinggi atau di sisi lain, bahkan guru akan tahu sekilas, siswa/mahasiswa tertarik dengan materi yang diberikan atau tidak. Dalam beberapa hal pengelolaan kelas yang berhasil dapat dilihat dari sisi guru. Jumlah siswa dalam suatu ruangan harus disesuaikan, tidak terlalu besar agar guru tetap dapat menangani interaksi antara guru - siswa atau antar siswa yang ada.

Seperti halnya kelas *on line*, siswa sebagai peserta *online class* dapat mengikuti kelas dari manapun, tidak dibatasi oleh wilayah geografis (seperti desa atau kota) mereka dipertemukan secara virtual, sehingga alat yang dibutuhkan dalam pertemuan digital ini adalah seperangkat alat berupa PC, ponsel, dan dukungan *wifi*. Jadwal yang diatur juga terkesan lebih fleksibel, bisa sinkronus atau asinkronus, tergantung jadwal yang disepakati. Satu hal yang menjadi pertimbangan guru/ dosen adalah kebiasaan atau latar belakang budaya siswa atau mahasiswa yang menjadi peserta kelas *online*. Maksudnya adalah, jika memilih jadwal *online*, hendaknya dipilih waktu, di mana peserta kelas *online* tidak sedang melaksanakan ibadah, sehingga jumlah kehadiran bisa diupayakan 100 persen. Jumlah kelasnya bisa lebih banyak dari kelas tatap muka, dan juga tidak membutuhkan biaya yang terlalu banyak (murah). Menurut Supriyono, (2020); Michelle Boyle, (2016); Trish Sammer, (2020) ada beberapa kelebihan-kelebihan pembelajaran melalui daring jika dibandingkan dengan pembelajaran di kelas, yaitu: 1) dapat dilaksanakan secara sinkronus atau asinkronus; 2) Biaya lebih murah karena tidak memerlukan tempat, gedung dan semacamnya; 3) tidak dibatasi oleh jarak; 4) tidak memerlukan alat transportasi; 5) melatih *soft skill*; 6) fleksibilitas belajar mandiri; 7).berpusat pada siswa, sejalan dengan konstruktivistik; 8) akses informasi cepat dan mudah, dan masih banyak yang lainnya. Namun pembelajaran melalui daring juga mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain: 1) kecenderungan individual; 2) sinyal internet tidak selalu baik; 3) keterbatasan alat/sarana on line; 4) menimbulkan ambiguitas pemahaman.

Hal yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran Jarak Jauh menurut Gabrielle Rappolt-Schlichtmann, EdD (2020) adalah sebagai berikut.

- a. Laptop, PC, IPods: media minimum yang dibutuhkan untuk mengikuti pelajaran online. Setiap orang sebaiknya memiliki dan menggunakan satu alat.
- b. Jaringan, koneksi: digunakan untuk menghubungkan satu sama lain.
- c. Tujuan pembelajaran: perlu dikomunikasikan kepada siswa, mahasiswa sebagai peserta pembelajaran *online* untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai. Kegagalan mengkomunikasikan tujuan pembelajaran kepada peserta menyebabkan kurang fokus dan juga pencapaian tujuan yang tidak maksimal.
- d. Persyaratan kehadiran: pengaturan kehadiran peserta pembelajaran *online* harus dibuat, agar pembelajaran berlangsung tertib dan legal. Menjadwalkan kehadiran ketika *online* berbeda dengan rapat ruang kelas yang biasanya ditentukan tempat dan waktunya. Namun kehadiran dalam pembelajaran online cenderung fleksibel, bisa secara sinkronus(sesuai dengan jadwal/*real time* , atau asinkronus dengan memberikan tugas-tugas yang dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Perubahan ini dapat dikomunikasikan melalui

- chat room (whatsAap group)* atau kelompok komunitas mahasiswa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehadiran, ketidakhadiran, terlambat menyerahkan tugas, atau bahkan tidak memposting tugas yang diberikan oleh instruktur, semuanya memiliki peraturan dan konsekuensi.
- e. Sangat penting memiliki ruang komunikasi untuk menyampaikan tata cara memposting jawaban, tugas yang disampaikan, diskusi yang akan disampaikan dan lain-lain yang menggambarkan keadaan pembelajaran *online* sedemikian rupa. Ini membutuhkan semacam manajemen *online* yang dikompromikan antara guru dan siswa. Dengan demikian keberadaan alamat email, dan pedoman komunikasi lainnya juga dibutuhkan.
 - f. Penilaian: Penilaian yang menyeluruh dan terintegrasi merupakan akhir dari beberapa pertemuan sebelumnya yang memberikan umpan balik atau hasil pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Ini akan menunjukkan prestasi siswa, pembelajaran aktif, motivasi atau kemajuan yang dibuat oleh siswa. Di akhir setiap sesi pembelajaran, ada baiknya guru memberikan beberapa pertanyaan, atau kuis kecil kepada siswa untuk mengetahui tanggapan mereka. Respon cepat / lambat menunjukkan keinginan terhadap materi yang diberikan, sehingga guru dapat menggunakan respon siswa sebagai umpan balik, apakah pembelajaran yang diberikan melalui pembelajaran *online* sudah sesuai harapan atau belum maksimal.

2.4 Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Apabila kita merenungkan dampak yang ditimbulkan oleh corona virus 19 terhadap masyarakat sekolah dan pendidikan tinggi, maka kita akan mencoba mengambil makna yang berimplikasi positif terhadap pembelajaran di masa pandemi yakni kemerdekaan dan kemandirian. Dua hal inilah yang sesungguhnya terjadi jika proses pembelajaran jarak jauh berjalan seperti yang direncanakan. Instruksi belajar dari rumah (dampak covid 19) memberikan sedikit kebebasan kepada pendidik dan yang dididik untuk berkreasi agar tidak mengalami kejenuhan serta penurunan motivasi belajar. Dengan demikian para pelaku pendidikan secara tidak langsung sudah diajarkan dan dilatih untuk mandiri dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya, menjadikan dirinya cerdas dan bertanggung jawab. Apabila kemerdekaan dan kemandirian ini benar terjadi dan dialami oleh pelajar, mahasiswa, dan pengajar di Indonesia, maka rencana Menteri Pendidikan untuk merealisasi merdeka belajar dan kampus merdeka sudah terlaksana sebagian. Dunia pendidikan di Indonesia mengalami titik balik ke arah yang sangat berbeda justru dimulai saat pandemi dan akan

berlanjut pasca pandemi covid 19. Karena rencana merdeka belajar dan kampus merdeka sudah diwacanakan pada tahun 2019.

Filosofi merdeka belajar menurut Mendikbud (Nadiem Anwar Makarim) sesuai dengan filsafat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kemerdekaan dan kemandirian yang artinya siswa bebas belajar mencari sumber-sumber belajar, menentukan cara belajar dan metode yang tepat bagi dirinya. Di lain sisi, guru juga memiliki kemerdekaan untuk menentukan materi untuk pendukung kurikulum, memilih media pembelajaran, serta berkreasi menentukan metode yang cocok ketika mengajar. Begitu juga kepala sekolah diberikan kemerdekaan dan kemandirian mengelola anggaran untuk kemajuan sekolahnya. (<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/16515301/ini-penjelasan-mendikbud-nadiem-soal-konsep-merdeka-belajar>). Dengan kata lain nuansa pembelajaran akan dirasakan lebih nyaman, tidak terbelenggu, lebih bebas berdiskusi, dapat dilakukan *outing*

class, serta mengarah kepada pembentukan karakter berani, cerdas dalam bergaul cerdas, berkompetensi, disiplin, sopan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Merdeka_Belajar).

Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 yang intinya meliputi: 1. USBN diganti ujian (asesmen): bahwa siswa akan diuji kompetensi dasar yang meliputi literasi dan numerasi serta survey karakter. 2) UN diganti tahun 2021: namun karena situasi covid 19, maka UN telah dihapus lebih cepat dari yang direncanakan yakni pada tahun 2020. Hal ini mempermudah penghapusan UN yang sebetulnya telah mengundang berbagai polemik. 3) RPP dipersingkat : tujuannya adalah mempermudah pekerjaan guru, agar tidak terjebak dalam administrasi yang jelimet, namun pembuatan RPP lebih disederhanakan untuk memberikan kesempatan kepada guru untuk memikirkan kualitas pembelajaran. 4) Zonasi PPDB lebih flexible: komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah ([https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/12/12591771](https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/12/12591771/gebrakan-merdeka-belajar-berikut-4-penjelasan-mendikbud-nadiem?page=all)

[/gebrakan-merdeka-belajar-berikut-4-penjelasan-mendikbud-nadiem?page=all](https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/12/12591771/gebrakan-merdeka-belajar-berikut-4-penjelasan-mendikbud-nadiem?page=all). Motto yang diangkat di sini adalah ‘merdeka belajar, guru penggerak’. Guru penggerak artinya guru yang mengutamakan siswa, yang mengutamakan pembelajaran siswa. Yang disebut guru penggerak adalah guru yang memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dalam mencerdaskan anak bangsa, tanpa harus disuruh-suruh lagi.

Selanjutnya Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai

keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diambil di luar prodi yang masih di lingkungan kampus maupun prodi yang ada di luar kampus mereka. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar program studi meliputi: pertukaran pelajar; magang/praktek kerja; asisten mengajar di satuan pendidikan; penelitian/riset; studi proyek independen; proyek kemanusiaan; kegiatan wirausaha; membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Merdeka belajar – kampus merdeka sesungguhnya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas wawasan maupun pergaulannya untuk terjun ke dunia kerja senyatanya.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Belajar dari situasi pandemi covid 19, setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran jarak jauh/ *online learning* menuju merdeka belajar/ *learning independence*.

- a. Tanggung jawab: semua komunitas harus bertanggung jawab atas situasi ini. Mengingat situasi pandemi covid 19 tidak diketahui kapan akan berakhir, sehingga diharapkan tetap aman di rumah namun tetap beraktivitas dan produktif menjalankan program pendidikan. Peserta pembelajaran jarak jauh, harus siap dengan model pembelajaran yang baru. Bagaimana lembaga/institusi mempersiapkan pembelajaran profesional untuk masa depan? Bagaimana dapat meningkatkan pemikiran kritis untuk kualitas sekolah dan pendidikan tinggi yang lebih baik dengan berbasis pemecahan masalah (*problem based learning*).
- b. Pentingnya kepemimpinan intelektual: menata kembali peran akademisi dan peneliti, serta pemerintah, untuk membuat peraturan, belajar dan bekerja dari rumah, terkait dengan kebebasan dan kemandirian belajar, menuju merdeka belajar-kampus merdeka tentunya dengan memodifikasi kurikulum baru dengan strategi pembelajaran modifikasi.
- c. Kerja tim / Kolaboratif: Dalam situasi ini kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi seseorang harus terhubung dengan orang lain, bekerja dengan kolaborasi untuk mendukung lingkungan pembelajaran *online* yang baru bagi kita.
- d. Etika: Meski semua bekerjasama dengan kolaboratif, namun setiap orang harus mengetahui etika. Siapa yang melakukannya, dan apa yang harus dilakukan, di mana itu dilakukan.

3.2 Saran

- a. Mengingat pembelajaran jarak jauh/*online learning* membutuhkan internet yang stabil, maka sangat disarankan kepada pemerintah untuk membangun jaringan internet di seluruh nusantara dengan kekuatan yang memadai agar semua anak dapat mengenyam pendidikan.
- b. Institusi sudah harus memikirkan langkah-langkah yang hendak dilaksanakan terkait pembelajaran pasca pandemic serta kesiapan merdeka belajar kampus merdeka.
- c. Guru, dosen, siswa, mahasiswa tetap termotivasi dan berkomitmen untuk melaksanakan pendidikan/pembelajaran secara efektif baik itu secara luring (*offline*) apalagi secara daring (*online*) sesuai dengan tanggungjawabnya. Yang ditegaskan lagi oleh *World Bank Publication* bahwa...“*Education should equip students with the skills they need to lead healthy, productive, meaningful lives*”.

References

Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Bali. 2020. Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Covid 19.

Gabrielle Rappolt-Schlichtmann, EdD . 2020. Distance Learning: 6 UDL Best Practices for Online Learning. Series : Reaching and Teaching All Students With UDL. Diakses 24 Juni 2020.

<https://gadgetsquad.id/news/ini-dia-cara-efektif-adaptasi-sistem-pendidikan-di-era-new-normal/>

<https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/12/12591771/gebrakan-merdeka-belajar-berikut-4-penjelasan-mendikbud-nadiem?page=all>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Merdeka_Belajar.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/16515301/ini-penjelasan-mendikbud-nadiem-soal-konsep-merdeka-belajar>.

Mitchelle Boyle. 2016. Why online learning is better Than In Person Learning (diakses 20 Juni 2020) .

PERGUB No.46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol

*Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19
Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru tertanggal 24 Agustus 2020.*

Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

*Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan
Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19)*

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan
Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Tahun 2021 Tahun Ajaran
2021.

Supriyono, 2020. Pembelajaran on Line Dalam Persepektif Pendidikan (makalah berupa
Power Point disampaikan dalam Webinar Nasional Gembira Belajar *On Line* (tanggal 8
Agustus 2020)

Trish Sammer .2020. 8 Reasons Why Online Education is Better than Traditional. Diakses
24 Juni 2020.

UU Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

World Development Report 2018. Learning To Realize Education's Promise. World Bank
Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA;
e-mail: pubrights@worldbank.org.

Yuniarti, D., Subiyakto, B., & Putra, M. A. H. (2020). Economic Activities in Kuin Floating
Market as a Learning Resource on Social Studies. *The Kalimantan Social Studies Journal*,
1(2), 130-140.

EFISIENSI PENGUBURAN JENAZAH COVID-19 PADA LINTAS BUDAYA DI CHINA, JAKARTA, DAN BALI

Oleh

I Wayan Watra, dan I Wayan Martha

Email: w.watra@unhi.ac.id dan marthabadung@gmail.com

Abstrak.

Jumlah kasus kematian covid-19 terus meningkat baik secara Internasional, Nasional, dan di Daerah-daerah di Indonesia. Sehingga Tempat Penguburan Umum (TPU), menimbulkan biaya lebih mahal, dalam situasi pandemi efisiensi perlu ditingkatkan termasuk penguburan jenazah. Tujuan artikel ini untuk melakukan efisiensi melalui Lintas Budaya, sebagai pedoman untuk meningkatkan tingkat efisiensi. Budaya Baru dalam pandemi covid-19 penguburan jenazah di China harus menggunakan kremasi sesuai dengan aturan pemerintah. Hal ini dilakukan dengan baik dan ketat, sehingga di China virus covid-19, sehingga China dinyatakan bebas dari virus. Sementara Budaya baru di Jakarta sebagai tolok ukur di Indonesia tingkat kematian paling tinggi, sehingga terus memperluas lahan penguburan dari 7.000 meter persegi, dan ditambah lagi 6.500 meter persegi, menjadi itupun sudah penuh untuk muslim. Budaya baru di Bali yang terikat oleh Adat, penguburan jenazah dilakukan dengan kremasi dan penguburan yang akan di bakar setiap lima tahun sekali. Sehingga tidak ada penambahan lahan baru, yang dapat dikatakan lebih efisien dari Jakarta.

Kata Kunci: Efisiensi penguburan Jenazah di era pandemi covid-19

1. Pendahuluan.

Masyarakat Indonesia kurang memperhatikan protokol Satgas Covid-19, sehingga jumlah kasus terinfeksi Covid-19 terus meningkat. Mengakibatkan muncul permasalahan baru seperti; banyaknya para garda depan yang meninggal yaitu Dokter dan perawat, masyarakat umum, termasuk masalah kurangnya lahan kuburan jenazah covid-19. Sepuluh Provinsi dengan kasus covid-19 terbanyak di Indonesia adalah:

Tabel 1 Sepuluh Provinsi dengan kasus covid-19 terbanyak di Indonesia

No	Nama Kota	Jumlah Kasus (ribuan)	No	Nama Kota	Jumlah Kasus (ribuan)
1	Jakarta	135.162 (32,73 %)	6	Sumatera Barat	19.949 (4,83%)
2	Jawa Timur	61.843 (14,977%)	7	Riau	19.939 (4,82%)
3	Jawa Tengah	54.997 (13,32%)	8	Kalimantan Timur	19.505 (4,72%)
4	Jawa Barat	51.776 (12,53%)	9	Sumatara Utara	15.308 (3,70%)
5	Sulawesi Selatan	20.552 (4,98%)	10	Bali	13.938 (3,38%)
JUMLAH					412.969 (100%)

Sumber: Bali Post, Halaman Utama, 30 Nopember 2020. (data di olah)

Prosentase kasus terbesar covid-19, pada sepuluh provinsi di Indonesia adalah Jakarta 32,73 % dengan jumlah 135.162 orang, dan kasus terkecil covid-19 adalah provinsi Bali, dengan prosesntase 3.38 % dengan jumlah 13.938 orang. Selanjutnya Koran Bali Post, menjelaskan seperti dibawah ini.

“Kasus baru pada Minggu kemarin bertambah 6.267 orang. Komulatif kasus yang ditanganni di Indonesia mencapai 534.266 orang. Pasien sembuh harian masih dilaporkan. Sayangnya sudah tiga pekan lebih rendah dibandingkan tambahan kasus baru. Jumlahnya tercatat sebanyak 3.810 pasien sembuh. Total kasus sembuh mencapai 445.793 orang (83,4 persen). Kasus meninggal jumlahnya lebih banyak dari sehari sebelumnya. Tercatat ada 1629 kasus meninggal yang dilaporkan , sehingga total jumlah menjadi 16.815 orang (3,1 persen). (Bali Post, pertanggal 29 Desember 2020).

Jakarta yang memiliki kasus covid-19 terbesar sehingga mengalami permasalahan dalam khusus penguburan jenazah, yang hanya menerima pemakaman dengan sistem tumpang, seperti pernyataan di bawah ini.

“Lahan khusus untuk jenazah Covid-19 muslim di TPU Pondok Ranggan, Jakarta Timur penuh. Karena itu, TPU Pondok Ranggan memutuskan hanya melayani jenazah Covid-19 muslim dengan sitem tumpang. “Hingga saat ini, TPU Pondok Ranggan untuk unit muslim Covid sudah *full*, masih ada sisa untuk kurang lebih 100 unit Kristen Copid 100 petak lagi. Jadi

muslim bisa dilayani dengan sistem tumpang”, kata penanggungjawab pelaksana TPUPondok Ranggon, Muhaemin, saat dimintai konfirmasi, oleh detik.news.com (1/12/2020).

Kemudian di Bali masih dilaporkan terhadap pasien meninggal kasus covid-19 bertambah satu orang. Secara kumulatif pasien meninggal seluruhnya mencapai 428 orang. Untuk lebih jelasnya seperti di bawah ini.

“Jumlah pasien meninggal akibat covid-19 bertambah satu orang. Kumulatif pasien meninggal selama pandemi berlangsung di Bali mencapai 428 orang (3,07 persen). Rinciannya, 425 WNI dan 3 orang WNA. (1/12/2020).

Jumlah kepadatan penduduk di Jakarta saat ini mencapai 16.704 jiwa/km² dengan jumlah penduduk tahun 2019 adalah 11.063.324 orang (Statistik.jakarta.go.id). Jakarta pusat menjadi wilayah dengan kasus angka kematian tertinggi yakni 252 orang, disusul Jakarta Timur dengan 249 kasus kematian, Jakarta Barat dengan 248 kematian, Jakarta Selatan dengan 214 kematian, dan Jakarta Utara 195 kematian (Kompas.com, 28 September 2020). Sedangkan Bali memiliki jumlah penduduk migran dan non migran sebanyak 3.890.757 orang. Jika dibandingkan antara Jakarta dan Bali, memang jauh berbeda antara 73, 01 persen dengan 1158 kematian, dan Bali 26,99 persen dengan 428 orang yang meninggal dengan kasus covid-19. Dalam menangi kematian di tidak pernah ada masalah terhadap penguburan jenazah covid 19. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk migran dan non migran seperti di bawah ini.

Tabel 2
Jumlah Penduduk di Provinsi Bali Migran dan Non Migran
Tahun 2018

No	Kabupaten Kota	Non Migran	Migran	Jumlah
1	Jembrana	228 625	33 013	261 638
2	Tabanan	370 203	50 710	420 913
3	Badung	334 271	209 061	543 332
4	Gianyar	408 962	60 815	469 777
5	Klungkung	157 029	13 514	170 543
6	Bangli	206 989	8 361	215 353
7	Karangasem	384 325	12 162	396 487
8	Buleleng	587 808	36 317	624 125

9	Kota Denpasar	373 172	415 417	788 589
	Prov. Bali	3 051 284	839 373	3 890 757

Sumber: Biro Pusat Statistik Provinsi Bali, 2018.

Selanjutnya terkait dengan Budaya dalam Buku yang berjudul, “Filsafat Manusia Dalam Perspektif Hindu”, menjelaskan seperti di bawah ini.

“Manusia memiliki ciri tertentu akan selalu berhubungan dengan faktor-faktor yang terdapat pada lingkungan, seperti: Filsafat, budaya dan faktor-faktor lainnya, sesuai dengan daerah kelahirannya. (Selanjutnya), Manusia untuk berbuat positif dan negatif yang didasari oleh filsafat, dalam merealisasikan budaya; 1). Ilmu, 2).Teknologi, 3).Sosial, 4). Ekonomi, 5). Kesenian, 6). Bahasa, dan 7). Agama” (Watra, 2006:10).

Dari uraian terkait dengan penguburan jenazah di Jakarta dengan Budayanya dan juga di Bali dengan budaya Pitrayadnya. Di Jakarta dengan tingkat kematian di Jakarta mencapai 73,01% (persen) dengan 1.158 kematian, dan di Bali 26,99 % (persen) dengan 428 orang yang meninggal dengan kasus covid-19. Dalam menangi kematian kasus kematian jakarta mengalami permasalahan, akan melakukan penguburan “tumpang”, di Bali tidak pernah ada masalah terhadap penguburan jenazah covid 19. Sehingga akhirnya muncul pertanyaan, mengapa penguburan jenazah pada Budaya di Bali efisien ?

2. Pembahasan

Dalam pembahasan ini menggunakan teori, “Pertimbangan Alternatif dan Implikasi”, yang terdapat dalam Buku 1 Edisi 4. Business Process & Product Communication. seperti di bawah ini.

“Pertimbangan Alternatif dan Implikasi; Ambil kesimpulan dari fakta-fakta yang dikumpulkan dan ajukan solusi. Kemudian pertimbangkan keuntungan dan kerugian setiap alternatif. Apa saja (seperti) biaya, manfaat, dan akibatnya? Apa kendalanya, dan bagaimana menangannya? Yang terpenting solusi yang terbaik jika ditinjau dari tujuan Anda dan organisasi?” (Mary Ellen Guffey, dkk: 2006:14).

Artikel ini mencoba memberi alternatif sebagai pertimbangan dalam penguburan jenazah covid-19, dengan mengumpulkan fakta-fakta tentang penguburan jenazah yang ada di

Jakarta, dan di Bali dalam bingkai lintasan budaya nasional. Dengan sebuah solusi, dengan judul, "EFISIENSI PENGUBURAN JENAZAH COVID-19 PADA LINTAS BUDAYAN JAKARTA DAN BALI". Dengan pertimbangan terhadap biaya, manfaat, dan akibatnya, juga memperhatikan kendala dan upaya untuk mengatasinya. Tujuan utama dari artikel ini, untuk meningkatkan efisiensi dalam penguburan covid-19 dengan mencotoh budaya Bali.

2.1. Konsep Efisiensi

Kata efisiensi artinya, "Ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya); kedayagunaan; ketepatangunaan; kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang-buang waktu dan biaya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993:250). Kemudian istilah biaya terdapat dalam ilmu ekonomi, terkait dengan efisiensi pada tingkat kepentingan seperti pernyataan di bawah ini.

"Tentunya tingkat kepentingan berlainan dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam satu industri, tergantung pada strategi dan kekuatan serta kelemahan masing-masing perusahaan. Sebuah perusahaan dengan strategi produksi biaya rendah, misalnya, akan memandang penting untuk mencapai skala ekonomis dalam segala hal. Demikian pula, perusahaan yang lemah dalam hal pemasaran mungkin akan berhemat lebih banyak dengan menghindari diri dari transaksi pasar" (Michael E. Porter, 1990:267).

Jadi pengertian konsep efisiensi yang dimaksud adalah ketepatan yang berdaya guna dalam melakukan pekerjaan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya secara berlebihan. Tentunya akan terdapat perbedaan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya, dan yang dimaksud dalam hal ini adalah antara Budaya yang satu dengan yang lainnya. Sehingga diperlukan strategi dalam lintas budaya untuk mencapai tujuan secara ekonomis di dalam penguburan jenazah covid-19 di Jakarta maupun di Bali.

2.2. Lintas Budaya Jakarta dan Bali di masa covid-19

Antara Jakarta dan Bali tentu terdapat suatu perbedaan, tetapi masih dalam satu bingkai pada ikatan satu negara, satu bangsa, dan satu lintas budaya nasional. Sehingga dalam hal ini diperlukan konsep lintas budaya, lintas budaya yang dimaksud seperti di bawah ini.

“Komunikasi Lintas Budaya; 1).Membahas tiga tren penting yang berkaitan dengan semakin pentingnya komunikasi antarbudaya, 2). Mendefinisikan kebudayaan, menjelaskan lima kataristik kebudayaan, dan membandingkan serta membedakan lima kunci kebudayaan, 3). Menjelaskan pengaruh etnosentrisme, toleransi, dan kesabaran dalam mencapai kepekaan antarbuday, 4). Menjelaskan bagaimana meningkatkan komunikasi verbal dan lisan dalam lingkungan multibudaya, 5). Menjelaskan bagaimana meningkatkan pesan tertulis dalam lingkungan multibudaya, 6). Membahas etika antar budaya, termasuk di luar negeri, penyusunan, adat istiadat yang berlaku, dan metode untuk menghadapinya...” (Merly Ellen Guffey, dkk 2006:25).

Dari uraian tentang komunikasi lintas budaya terdapat 7 (tujuh) macam, kemudian diantara ketujuh tersebut yang terpenting adalah pada bagian enam, yaitu; membahas etika antar budaya, termasuk di luar negeri, penyusunan, adat istiadat yang berlaku, dan metode untuk menghadapinya. Tujuan dilakukan lintas budaya ini adalah untuk memperoleh titik temu menuju masa depan bangsa yang lebih baik, khususnya dalam hal ini adalah efesiensi. Titik temu yang dimaksud seperti di bawah ini.

“Banyak masyarakat primitif atau praliterasi telah sepenuhnya lenyap sebagai entitas semi-indivenden lantaran terserap oleh unit lain yang lebih besar. Kekaisaran kuno telah telah sebagian besar terlikuidasikan, dan lusinan bangsa telah lahi. Lebih dari semua itu, pertubuhan saling bergantung antarsistem telah cenderung mengubah batasan wilayah ekonomi dan wilayah budaya. Pendeknya, budaya-budaya di dunia tampaknya cenderung bertitik temu menjadi satu tunggal-atau paling kuat menjadi beberapa tipe budaya saja-yang berdasarkan teknologi industri. Seiiring dengan itu, ada peningkatan kecendrungan ke arah saling ketergantungan unit-unit sosial, politik dan ekonomi” (David Kaplan, Albert A. Manners, 2000:278).

Titik temu yang diharapkan dalam artikel ini adalah menteladani nilai-nilai positif yang terdapat pada lintas budaya baik yang ada di luar negeri dalam hal ini adalah China, Jakarta, dan di Bali terkait dengan penguburan jenazah covid-19. Sebab manusia adalah makhluk yang tidak pernah pua, akan selalu berpikir tentang kemajuan di segala bidang yang sangat kritis untuk menjadi yang terbaik.

2.2.1 Budaya Penguburan Jenazah Covid-19 di China.

Menurut detikhealth, menyatakan bahwa ada sepuluh guci abu yang disimpan di sebuah krematorium di Jingzhou Provinsi Hubei Cina, yang belum di ambil oleh keluarganya. Karena keluarganya juga kena virus corona yang sedang di karantina, untuk lebih jelasnya seperti di bawah ini.

“Hanya boleh Kremasi, China larang Acara Pemakaman Jenazah Vius Corona. Sepuluh guci abu yang disimpan di sebuah krematorium di Jingzhou Provinsi Hubei, China, merupakan guci abu jenazah pasien covid-19 yang tak kunjung di ambil keluarga. Keluarga masih menjalani karantia, kata Sheng, direktur krematorium Jingzhou. China tidak hanya melarang warganya untuk dimakamkan keluarga yang meninggal covid-19 tapi upacara perpisahanpun tidak diijinkan untuk digelar” (Ayunda Septiani-detikHealth, 2020)

Orang China yang memiliki keluarga meninggal karena covid-19, selalu mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena masyarakat percaya terhadap pemerintah, yang akan menangani keluarga mereka akan memperoleh pelayan dengan baik, dan lebih baik dari dirinya sendiri. Apalagi keluarga yang memiliki jenazah juga terpapar wabah covid-19. Tidak saja melarang untuk mengadakan pemakan, tetapi melarang pula untuk melakukan upacara-upacara perpisahan, dengan alasan agar tidak tertular wabah penyakit corona covid-19. Kasus covid-19 di China cukup tinggi juga, seperti pernyataan di bawah ini.

“Virus corona covid-19 telah menginfeksi lebih dari 720.000 orang di 199 negara, dimana 33.956 di antaranya meninggal.” (Ayunda Septiani-detikHealth, 2020)

Dari kasus kematian covid-19 yang berjumlah 33.956 tidak diijinkan melakukan upacara, termasuk jenis kematian apapun tidak boleh melakukan upacara. Dimana biasanya bagi keluarga yang meninggal yang mayoritas beragama Buddha dan Tao, upacara pemakaman dilakukan dengan dengan khidmad untuk memastikan perjalanan rohnya damai di alam sana, setelah kematian. Seperti pernyataan di bawah ini.

“Bagi keluarga yang mayoritas penduduknya menganut ajaran Buddha dan Tao, upacara pemakaman biasanya dilakukan dengan khidmad untuk memastikan perjalanan damai ke kehidupan setelah mati”. (Ayunda Septiani-detikHealth, 2020).

Dengan mengikuti perintah Negara, penularan penyakit corona covid-19 menurun dengan drastis, data menunjukkan di China memiliki 81.439 kasus teinfeksi 3.300 meninggal dan 75.448 sembuh. Seperti pernyataan di bawah ini.

“Data saat ini menunjukkan, China memiliki 81.439 kasus covid-19 dengan 3.300 orang di antaranya telah meninggal. Sebanyak 75.448 pasien telah disembuhkan. Meski jumlah covid-19 telah mengalami penurunan, namun krematorium di Jingzhhou belum dapat memastikan bagaimana layanan kremasi akan berjalan kembali seperti semula. Saat ini krematorium hanya bisa menjaga guci-abu di tempatkan mereka sesuai dengan perintah negara. (Ayunda Septiani-detikHealth, 2020).

Masyarakat China dan lembaga-lembaga lainnya seperti kremasi sangat patuh dan taat pada perntah negara, sehingga pemutusan penularan copid-19 segera dapat dihentikan. Negara kita khususnya masyarakat Jakarta dan di Bali, hendak berusaha mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti aturan di bawah ini.

“Indonesia memiliki prosedur penanganan jenazah pasien yang berhubungan dengan corona. Hal ini tertuang dalam pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam pedoman tersebut jenazah pasien yang meninggal akan dikemas dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus. Para petugas yang menanganinya juga diwajibkan menjalankan standar kewaspadaan” (Firdaus Anwar-detikHealth, 2020).

Indonesia telah memiliki prosedur penanganan jenazah pasien yang berhubungan dengan corona, yang sangat baik. Masyarakat Indonesia diharapkan mampu menteladani Budaya China untuk mentaati aturan pemerintah sehingga pemutusan kasus covid-19 segera berakhir, seperti di China saat ini 0% kasus covid-19 sejak bulan Agustus 2020, seperti pernyataan di bawah ini.

“Virus Corona Wuhan Pulih dari Covid-19, warganya Banggakan Ideologi Komunis China. Ratusan pembeli memadati pasar basah pada suatu pagi di bulan Desember 2020 di Kota Wuhan China. Bahkan, ketika banyak negara tetap berada dalam cengkraman pademi, kehidupan di Wuhan sebagian besar telah normal”. (Tribuannews.com 2020).

Jadi budaya China perlu diteladani dalam menangi corona covid-19, khususnya dalam menangi penguburan jenazah baik dengan cara kremasi dan abunya di taruh dalam sebuah guci. Kemudian abu jenazah covid-19 di ambil oleh pihak keluarganya, dan penangannya sepenuhnya diserahkan kepada pihak kremasi tanpa melalukan acara dan upacara adat dan budaya, tetapi menggunakan budaya baru, yaitu semuanya jenazah covid-19 dikremasi sesuai dengan perintah pemerintah. Sehingga penguburan jenazah di China dapat dikatakan paling efisien, cukup dengan melakukan kremasi dan menaruh di guci, tidak memerlukan lahan kuburan.

2.2.2. Budaya Penguburan Jenazah Covid-19 di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hari Sabtu dan Minggu (19-20/9/2020) mengecek pemakaman khusus jeazah Corona di TPU Pondok Ranggon, dengan mengatatakan bahwa.

“Mereka menggali dan memakan jenazah dengan protokol Covid-19. Di bawah teriknya matahari maupun dibawah sorotan lampu. Ditempat ini, tanah-tanah gundukan kuburan itu belum memadat. Ada 45 jenazah hari ini dikuburkan. Malam telah larut, penggali kubur belum akan pulang. Menanti jika kewajiban lagi tengah malam. Jangan tinggalkan rumah dulu. Jika harus pergi keluar, selalu menggunakan masker” (ditiknews, 2020).

Anis Baswedan menyaksikan penggali dan pemakam jenazah covid-19, yang bekerja siang dan malam. Padal gundukan tanah kuburan yang memadat. Pada saat hari tersebut mengubur 45 jenazah. Mereka baru bisa pulang ketika perintah penguburan jenazah masih ada sampai tengah malam. Gubernur juga menghimbau masyarakat Jakarta jagan ditinggalkan rumah dulu, jika tidak penting. Kalau memang harus keluar, harus selalu menggunakan masker.

Terkait dengan lahan tempat penguburan umum khusus covid-19 di Pondok Ranggon, Jakarta Timur semakin menipis Kadis Bina Marga DKI Hari Nugroho (11/9/2020) menjelaskan bahwa.

“Tahap satu kan bulan Maret itu sekitar 7.000 meter persegi (tujuh hetar). (Perluasan) proses masih berjalan sekarang, minggu inilah selesai. Perluasan ini merupakan kedua kalinya. Sedang kita perluas 6.500 persegi (enam setengah hetar)”. (Eva Safitri-detiknews, 11/9/2020).

Menurut pasaran harga tanah di Jakarta Timur disekitar lahan penguburan jenazah covid-19 paling muran di bandingkan dengan di Jakarta lainnya seperti penjelasan Direktur Eksekutif IPW Ali Traghada mengatakan seperti di kutip oleh Koran Sindo, di bawah ini.

“Saat ini ketertinggalan Jakarta Timur dibandingkan wilayah lainnya lebih minimnya jaringan insfrastruktur di wilayah ini dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini membuat pasaran harga tanah perumahan di Jakarta Timur jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain, yaitu rata-rata sebesar Rp. 7,9 juta per meter persegi. Harga ini paling murah dibandingkan Jakarta Barat Rp. 13, 2 juta per meter persegi, Jakarta Utara 17,1 juta per meter persegi, Jakarta Selatan 17,9 juta per meter persegi, dan Jakarta Pusat 18,7 juta per meter persegi” (Okezone Ekonomi.com, 9 Maret 2017).

Penjelasan harga tanah yang diberikan oleh yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif IPW Ali, memberi gambaran bahwa harga tanah di Jakarta Timur paling murah di banding Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan yaitu sebesar 7,9 juta per meter persegi. Kalau dihitung secara ekonomis pada pengadaan tahap pertama lahan tempat penguburan umum (TPU) untuk covid-19 seluas 7.000 meter persegi dikalikan Rp.7,9 juta sama dengan Rp. 55.300 juta. Kemudian pada tahap kedua dilakukan perluasan lagi dengan luas 6.500 meter persegi, kalau 6.500 dikalikan dengan Rp. 7,9 juta sama dengan 51.350 juta, dengan total 1.006.650 juta rupiah.

Pernyataan terakhir terhadap keberadaan TPU di Pondok Sanggon di Jakarta Timur untuk umat muslim sudah habis, dan hanya tinggal 100 liang lahat untuk umat Kristen. Kini umat Islam hanya menerima jenazah covid-19 dengan sistem “tumpang”, yang dimaksud dengan sistem”tumpang” seperti pernyataan di bawah ini.

“Sistem tumpang yang dimaksud yakni dengan menumpangkan jenazah Covid19 ke makam jenazah anggota keluarga atau orang yang dikenal. Namun kata Muhaimin, sistem tumpang hanya bisa dilakukan atas persetujuan atau izin dari pihak keluarga. Jadi gini, kelyarga A misal ata makam di TPU Pondok Ranggan lantas sekarang ada keluarga yang meninggal karena covid, nah jenazah tersebut bisa ditumpangkan di makan Si A, tentunya atas permohonan keluarga dan kesepakatan keluarga semua. Begitupun kalau ada tetangganya yang meninggaldimakamkan disana lalu mau ditumpangkan kesana jenazahnya boleh saja asal ada kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga” (detiknews.com, 2020).

Sistem pemakaman jenazah covid-19 secara “tumpang”, tampaknya agak sulit dan memerlukan proses yang panjang. Setelah melalui proses yang panjang belum tentu bisa dikubur disana, karena memerlukan persetujuan semua keluarga antara yang memiliki makam dan keluarga yang memiliki jenazah yang akan melakkan sistem tumpang. Solusinya pemerintah harus menimbah perluasan lahan TPU yang baru, mengingat, kasus covid 19 terus meningkat di tahun 2020. Sehingga dapat dikatakan penguburan jenazah di Jakarta paling mahal dan kurang efisien.

2.2.3. Budaya Penguburan Jenazah Covid-19 di Bali

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karangasem I Wayan Suardana mengatakan seperti dibawah ini.

“RSDU Karangasem tak ingin kecolongan ada pemakaman pasien covid-19 tanpa menggunakan protokol yang ditentukan, sehingga menyebabkan kasus baru”. Akhirnya setelah mengalami perundingan alot, RSUD Karangasem dan keluarga akhirnya mengambil jalan tengah. Pasien dimakamkan secara protokol covid-19, namun keluarga diberikan kesempatan untuk mau menggunakan alat pelindung diri (APD) yang lengkap” (Yunda Ariesta iNewsBali.id,2020).

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karangasem I Wayan Suardana menjalankan kewajibannya, setiap anggota masyarakat yang terpapar penyakit covid-19 harus dikuburkan dengan cara protokol kesehatan. Untuk mengidari agar virus covid-19 tidak menular kepada masyarakat yang lain. Walaupun terjadi penolakan terhadap penguburan dengan menggunakan protokol kesehatan, akhirnya memperoleh jalan tengah. Bahwa pihak keluarga diberikan melihat proses permandian jenazah, asalkan pihak keluarga menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) agar tidak tertular virus. Kemudi di Singaraja, juga terjadi penolakan atas kremasi jenazah seperti pernyataan di bawah ini.

“Karena warga menolak maka jenazah tidak jadi di kremasi di Yayasan tersebut. Jenazah akhirnya dimakamkan di pemakaman desa setempat setelah Desa Adat memberikan izin. Pasien yang meninggal tersebut saat datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi lemas akibat penyakit diabetes dengan kadar gula yang tinggi. Pasien semula dirawat di rumah sakit swasta.

Kemudian dirujuk ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Buleleng dan emnjalani swab ternyata hasilnya positif” (Yunda Ariesta iNewsBali.id,2020).

Penolakan yang terjadi akibat pihak keluarga tidak memiliki izin dari pihak Sat Gas untuk di kremasi. Akhirnya jenazah tidak jadi dikremasi, karena pihak Desa Adat telah memberi izin, untuk dikuburkan di Desa tersebut. Pada dasarnya masyarakat Bali tidak memperlakukan bagi jenazah covid-19 baik di kremasi maupun dikubur asal mendapat izin dari Satgas maupun dari pihak Desa Adat, dengan mentaati protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Setiap Desa Adat di Bali telah memiliki kuburan, yang berlandaskan konsep agama Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Pura Dalem-lah yang berkaitan dengan kuburan. Penguburan jenazah terkait dengan Pitra Yadnya. Seperti dijelaskan dalam buku yang berjudul, “*Ajaran Agama Hindu Upacara Pitra Yadnya*”, menjelaskan seperti di bawah ini.

“Dengan adanya aturan tersebut (Tri Pramana) sesungguhnya agama Hindu telah memiliki sifat fleksibel dan sangat dinamis terhadap kemampuan umatnya. Tri Pramana hanya bersifat kuantitas saja, namun kualitas dari upacaranya sama tergantung dari Sang pelaksana, karena nilai suatu upacara tergantung dari Cipta, Rasa, Karsa, dan Karya dari pelaksanaan upacara” (Sudarsana, I.P.IB 2009:76).

Dari kutipan Sudarsana tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa masyarakat di Bali sejak jaman dulu sudah melakukan upacara pitra yadnya bersifat fleksibel sesuai dengan kemampuan, karena memiliki kualitas yadnya yang sama. Karna pelaksanaan sangat banyak ragamnya, seperti dijelaskan dalam buku yang sama, seperti dijelaskan di atas terkait dengan jumlah penduduk non migran dan migran berjumlah 3 890 757, di tahun 2018 yang merupakan data updit terakhir yang terakhir. Penduduk non migran pada dasarnya terikat oleh Desa Pekraman, dan Desa Pekraman terikat oleh Pura Kahyangan Tiga, (Desa, Puseh, dan Dalem) sedangkan penduduk migran tidak terikat oleh Pura Kanghyangan Tiga. Tetapi secara kedinasan tetap terikat dengan domisili secara administrasi dalam pembuatan KTP, seperti dijelaskan oleh Guru Besar Hukum Adat Universitas Udayana I Wayan Windia, seperti di bawah ini.

“Di Provinsi Bali ada dua desa, (1) Desa adat atau desa pekraman (yang berjumlah) 1.488, tergabung dalam wadah Desa Pekraman (MDP), (2). Desa atau desa administratif (dinas),

Desa/Perbekelan (berjumlah) 585, Dusun (berjumlah) 3.323, Kelurahan (berjumlah) 89, dan lingkungan (berjumlah) 500 (lima ratus”. (dalam Seminar, 16 Maret 2017).

Pada umumnya penduduk migran tidak termasuk di Desa Pekraman, tetapi mereka akan masuk pada desa administratif, yaitu hanya ikut desa dinas. Untuk lebih jelasnya nampak seperti penjelasan di bawah ini.

“Desa adat atau desa pekraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. (Peraturan Daerah Prov. Bali Nomor 3/2001 tentang Desa Pakraman). Desa adalah desa dan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, atau kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (Pasal 1 nomor urut 1 U.U. Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa). (Wayan.P.Windia, 2017). Makalah Seminar, Desa Adat di Bali Sesudah Berlakuknya U.U. tentang Desa.

Jadi penduduk Desa dinas dapat disebut sebagai migran yang keberadaannya sebatas administrasi kedinasan, dan Desa Pekraman yang keberadaan sebagai penduduk non migran atau penduduk asli yang terikat oleh prahyangan, pawongan, dan palemahan bersama-sama bersatu padu menanganinya musibah yang berada Desa-Desa yang menyebar dalam sebuah kapantiaan di Bali, pada lokasi KKN Mahasiswa Universitas Hindu Indonesia.

Penduduk Bali yang berjumlah 3.890.757, orang yang terdiri dari non migran dan migran. Tim Gugus Tugas percepatan Penangan Covid 19 Provinsi Bali menyampaikan perkembangan penanganan Corona Virus Disease (Covid 19), di Provinsi Bali 5 September 2020. Jumlah kumulatif pasien Covid 19 di Bali 6.071 (enam ribu tujuh puluh satu) orang, hari ini bertambah 165 (seratus enam puluh lima) orang. Hari ini total pasien yang sembuh sebanyak 4.833 (empat ratus delapan puluh tigapuluh tiga) orang, yang meninggal 10 orang. Diketahui dari Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Denpasar, Bangli, dan Buleleng. Data tercatat total meninggal 98 pasien covid 19 atau 17,23 persen. Dalam perawatan sebanyak 1.046 atau 17,23 persen. Sembilan puluh delapan kasus meninggal, diantaranya berasal 4 orang dari Jembrana.

Informan I Wayan Kembar (45 th), Bendesa Adat Sumampan dan juga sebagai Anggota Kepaniatiaan Satgas, menjelaskan konsep kuburan, seperti dibawah ini.

“Setra ring Desa Adat Sumampan, manut ring awig-awig sane sampun kasungkemin antuk krama desa, sane kaiket antuk agama Hindu. Nyabran limang warsa apisen kawenten ngaben, maduluran antuk ngangkid sawa. Selanturnyane katunjel, abunyane ke anyut ke Segara. Nika mawinan Setra ring Desa Adat tityang ten ngakehan, tetep sekadi dumun kirang langkung 10 are. Ngenenin indik sawa sane padem antuk wabah covid-19, dados kapendem tur dados kremasi sekadi mangkine, manut paiguman keluarganyane”. (Tanggal, 8 Desember 2020). Yang artinya kurang lebih.

“Kuburan yang ada di Desa Adat Sumampan, sesuai dengan awig-awig yang sudah dilaksanakan masyarakat desa, berdasarkan agama Hindu. Setiap lima tahun sekali dilakukan upacara pembakaran jenazah, dilakukan dengan menggali kuburan. Selanjutnya dibakar, abunya di buang ke Laut. Itulah sebabnya kuburan di Desa Adat saya tidak pernah bertambah, tetep seperti dulu kurang lebih 10 are. Terkait dengan jenazah yang meninggal akibat covid-19, boleh dikubur dan juga boleh di kremasi sperti jaman sekarang, sesuai dengan keputusan keluarganya.

Penguburan jenazah covid-19 di Bali pada dasarnya tidak ada permasalahan, walaupun pernah terjadi penolakan. Tetapi setelah dilakukan diskusi secara baik, akhirnya masyarakat akan mengikuti program dari pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan. Tempat penguburan jenazah yang disebut dengan “Setra”, terkait dengan Desa Adat, setiap Desa adat memiliki kuburan yang dilakukan pembakaran setiap lima tahun sekali, yang disebut dengan “Ngaben”. Setra tidak pernah bertambah tetap seperti yang dulu. Jadi tempat penguburan jenazah baik covid-19 maupun kematian secara umum, sehingga dapat dikatakan masyarakat Bali cukup efisien dalam memanfaatkan lahan pemakanan jenazah.

3. Kesimpulan dan Saran

- a. Tempat penguburan jenazah baik covid-19 maupun kematian secara umum, dapat dikatakan penguburan jenazah di Jakarta paling mahal dan kurang efisien. Di masyarakat Bali cukup efisien dalam memanfaatkan lahan pemakanan jenazah, dan yang paling efisien adalah di China cukup dikremasi dan abunya di taruh pada guci untuk diserahkan ke pihak keluarga

- b. Bangsa Indonesia dalam artikel ini mengharapkan mampu menteladani China dan Bali, dalam memanfaatkan lahan TPU secara efisien.

Daftar Pustaka.

- Bali Post, Koran Bali 2020. *10 Provinsi dengan Kasus Covid-19 Terbanyak*. Denpasar. Bali Post Jalan Kepundung Denpasar.
- David Kalpan, Abert A. Manners, 2000. *Teori Budaya*. Judul Aslinya *The Theory Culture*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Mary Ellen Guffey, Kathleen Rhodes, Patricia Rogin, 2006. *Komunikasi Bisnis*, Edisi 4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Mechael E.Porter. Agus Maulana, 1990. *Strategi Bersaing Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarsana, I.B. Putu. 1998. *Ajaran Agama Hindu Manifestasi Sang Hyang Widhi*. Denpasar:Penerbit Yayasan Dharma Acarya Percetakan Mandara Sastra.
- Tim. Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bali Pustaka.
- Tribun Bali, 2020. *Waspadai Klaster Keluarga*. Denpasar: Bali. Tri Bun BaliJln. Profesor Ida Bagus Mantra.
- Watra, I Wayan. 2005. *Filsafat Manusia Perspektif Hindu*. Surabaya:Penerbit dan Percetakan Surabaya.

Kutipan di Internet:

- a). Ayunda Septianani-detikHealth, 2020
- b). Eva Safitri-detikHealth, 2020.
- c). Okezone Economi.com, 2020.
- d). Firdaus AnswardetikHealth, 2020
- e). Tim detikcom – detik. News Minggu, 2020.
- f). Yunda AreastaNewsBali, 2020.

KAUTILYA ARTHASASTRA: Strategi Hindu Mambangun Masyarakat Antikorupsi

Oleh

Dr. Drs. I Wayan Sukarma, M.Si.

A. Pendahuluan

Korupsi masih menjadi masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Peneliti *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Wana Alamsyah, mengatakan bahwa terdapat 169 kasus korupsi pada periode semester satu tahun 2020⁴. Perkara korupsi yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan pada 25 November 2020, disusul Menteri Sosial pada 6 Desember 2020 adalah kasus termutakhir yang begitu mencengangkan publik. Betapa tidak, kasus ini justru terjadi ketika masyarakat sedang berjuang menghadapi kesulitan hidup akibat pandemi *Covid-19*. Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap berbagai kasus korupsi tentu patut diapresiasi, walaupun banyaknya kasus tersebut juga menandakan bahwa korupsi di Indonesia masih sulit diberantas.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi memang bukan persoalan yang mudah sehingga diperlukan upaya sistemik, pun sistematis dengan melibatkan segenap elemen bangsa. Apalagi korupsi telah membudaya terutama di kalangan birokrasi, sebagaimana pernyataan Schrool (dalam Hamzah, 2007) berikut ini.

“Indonesia pada periode awal tahun 1960, situasi begitu merosot sehingga bagi sebagian besar kalangan pegawai, gaji sebulan hanya cukup sekadar buat makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan, dan banyak di antara mereka mendapatkan tambahan itu dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan”.

Pernyataan ini menegaskan bahwa rendahnya gaji menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Kebiasaan pegawai mencari penghasilan tambahan di luar gaji membuka peluang berlangsungnya praktik suap, gratifikasi, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya. Praktik-praktik tersebut seolah-olah dilanggengkan dalam struktur dan kultur birokrasi di Indonesia. Faktanya, walaupun gaji pegawai mengalami peningkatan dan muncul generasi baru

⁴ [https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-](https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020)

[sepanjang-semester-i-2020](https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020) (diakses tanggal 17 Desember 2020).

ternyata perilaku korupsi masih saja terjadi. Demikian pula ketika lembaga antirasuah, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reserse kriminal khusus Polri, berhasil memenjarakan sejumlah pelaku korupsi, juga tetap saja muncul kasus-kasus baru.

Budaya korupsi yang mengakar begitu kuat dalam sistem politik dan birokrasi pada puncaknya akan melahirkan kleptokrasi, yakni pemerintahan para pencuri. Hal ini tentu akan menggagalkan cita-cita negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan antitesis bagi upaya membangun negara kesejahteraan (*welfare state*). Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara simultan melalui pembangunan moral antikorupsi sekaligus penegakan hukum. Dalam hal ini, kontribusi agama-agama terutama dalam peran dan fungsi transformasi sosialnya tentu diharapkan untuk menunjang keberhasilan upaya tersebut. Dalam konteks inilah, strategi Hindu dalam membangun masyarakat antikorupsi relevan untuk dieksplorasi secara mendalam melalui kajian ilmiah terhadap *Kautilya Arthashastra* dan interelasinya dengan teks-teks lain. Mengingat *Kautilya Arthashastra* sebagai teks politik dan ketatanegaraan Hindu, menyajikan berbagai fakta menarik tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.

B. Kerangka Konseptual

Korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau dalam bentuk kata kerjanya “*corrumpere*”, berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar-balikkan, dan menyuap. Definisi korupsi yang lebih luas adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun birokrat, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untuk memperoleh keuntungan sepihak (Dreher, Kotsogiannis, dan Corrison, 2004). Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Kemudian, pada Pasal 13 disebutkan tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi, (a) kerugian uang negara; (b) suap menyuap; (c) penggelapan dalam jabatan; (d) pemerasan; (e) perbuatan curang; (f) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (g) gratifikasi (UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001). Secara spesifik, korupsi cenderung dimaknai sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Definisi korupsi dalam *Kautilya Arthashastra* mencakup seluruh tindakan pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, dan/atau penggunaan kekuasaan

dan wewenang untuk mengeksploitasi sumber kekayaan milik negara untuk keuntungan pribadinya. Pandangan *Kautilya Arthashastra* tentang korupsi berangkat dari antitesis bahwa seluruh pejabat berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, setiap pejabat negara harus senantiasa diawasi perilakunya terutama menyangkut, (a) kesetiiaannya kepada negara, (b) adanya penyusupan dari negara musuh, dan (c) tindakan penyelewengan keuangan negara (*I. 13.7.12*). Pengawasan tersebut diperlukan karena manusia tidak tentu jalan pikirannya, seperti kuda yang bergerak liar saat dipekerjakan tuannya (*II.12.27.3*). Jadi, asumsi dasar yang dibangun bahwa seorang pejabat negara dapat melakukan tindakan korupsi kapan saja karena pikirannya berubah-ubah (Shamasastri, 1915).

Bentuk korupsi dalam *Kautilya Arthashastra* dapat dibedakan menjadi tiga, yakni (1) penggunaan jabatan dan fasilitas yang diberikan untuk keuntungan pribadi, seperti memeras, menerima suap atau gratifikasi, meminta perlakuan khusus dalam pelayanan publik dan tindakan hukum, serta menjual atau menyewakan harta milik negara; (2) penggelembungan (*mark-up*) harga dan pengurangan kualitas dalam pengadaan barang-barang kebutuhan negara; dan (3) penyusunan laporan fiktif, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penggunaan fasilitas negara, dengan tujuan mengelabui raja atau pemerintah (Radendra S., 2005:72—73). Untuk mengetahui indikasi seorang pejabat menyelewengkan uang negara atau tidak, *Kautilya Arthashastra* mengajukan hipotesis sebagai berikut, “apabila seorang pejabat berpenghasilan kecil, tetapi memiliki jumlah pengeluaran yang besar, maka dapat diduga bahwa ia menyelewengkan uang negara” (*II.12.27.10*). Hipotesis ini menyerupai penyelidikan potensi tindakan korupsi seorang pejabat negara berdasarkan laporan harta kekayaannya (Shamasastri, 1915).

Uraian di atas menegaskan bahwa pengertian korupsi yang tersirat dan tersurat dalam *Kautilya Arthashastra* memiliki kesamaan prinsip dengan definisi korupsi secara umum. Singkatnya, korupsi mencakup seluruh tindakan yang menyebabkan kerugian negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang pejabat pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. *Kautilya Arthashastra*, membangun gagasan tentang korupsi berdasarkan asumsi bahwa setiap pejabat negara memiliki peluang dan potensi yang sama untuk melakukan korupsi, bahkan manusia yang jujur sekali pun. Mengingat pikiran manusia berubah-ubah sehingga niat korupsi dapat muncul secara tiba-tiba, baik karena paksaan situasi, pengaruh struktural dan kultural, maupun adanya kesempatan. Oleh karena itu, strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara internal melalui pembangunan moral antikorupsi, dan secara eksternal terutama melalui pengawasan serta penegakan hukum secara konsisten.

Strategi tersebut sejalan dengan pentingnya empat jenis pengetahuan yang harus dikuasai seorang raja, termasuk para pejabat pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam *Kautilya Arthashastra*, yaitu *trayi veda* (*Rig, Sama, dan Yajur Veda*), *anviksaksi* (filsafat dan logika), *dandaniti* (penegakan hukum), dan *vartha* (ekonomi). *Trayi Veda* adalah sumber pengetahuan yang dibutuhkan untuk membangun kualitas rohani dan moralitas seorang pejabat negara. *Anviksaksi* penting dipelajari untuk membangun kecerdasan, kebijaksanaan, dan daya nalar pejabat negara sehingga ia mampu menentukan pilihan yang tepat di tengah-tengah berbagai paradoks kehidupan. *Dandaniti* berhubungan erat dengan kemampuan seorang pemimpin atau pejabat negara dalam penyusunan produk hukum, penerapan, sekaligus penegakkannya. Sementara itu, *vartha* adalah pengetahuan tentang cara mengelola perekonomian negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Radendra S, 200; Gunadha, 2012).

Keempat pengetahuan di atas menegaskan bahwa kualitas rohani dan moralitas pejabat negara adalah landasan utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mengingat pejabat negara yang teruji kualitas rohani dan moralitasnya, niscaya mampu mengendalikan dirinya dari tindakan korupsi. Kecerdasan dan kebijaksanaan menjadi syarat selanjutnya, karena seorang pejabat negara juga harus cerdas dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks korupsi, kecerdasan dan kebijaksanaan bertalian erat dengan kemampuan pejabat negara dalam melakukan transformasi struktural ataupun kultural yang menutup ruang bagi terjadinya praktik-praktik korupsi. Kualitas rohani, moralitas, kecerdasan, dan kebijaksanaan saja tidak cukup untuk melenyapkan korupsi pada suatu negara sehingga penegakan hukum menjadi syarat penting yang juga harus dipenuhi. Dalam hal ini, pejabat negara bukan saja harus bersikap tegas dalam menegakkan hukum, melainkan juga menjadi teladan dalam kepatuhan hukum. Pada akhirnya, kemampuan pejabat negara dalam mengelola perekonomian dibutuhkan agar keuangan negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat melalui tata kelola anggaran yang efektif dan efisien, serta meniadakan ruang terjadinya penyelewengan uang negara.

C. Pembahasan

(1) Strategi Politik dan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Kautilya Arthashastra memosisikan masyarakat sebagai komunitas politik yang diatur dalam sistem aristokrasi sehingga raja merupakan pemegang tampuk kekuasaan tertinggi. Negara *Arthashastra* bukan monarki absolut karena raja bukan satu-satunya sumber hukum, melainkan *dharma* adalah hukum tertinggi. Negara merupakan simbol *dharma* universal, yakni

pemahaman utuh tentang kebebasan individu (Rao, 2003:82). Dalam konteks ini, *dharma* adalah konsep etis dalam dunia-kehidupan yang menjamin kebebasan individu dalam melaksanakan *swadharma*, berupa kewajiban dan tanggung jawab menurut *varnāshrama dharma*; kebebasan membangun kehidupan sosial yang selaras dan harmonis; kebebasan mewujudkan realisasi diri yang sempurna (*moksa*); juga kebebasan untuk mendapat keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vyavahara, charitra*) (Rao, 2003:154).

Korupsi bertentangan dengan konsep negara *Arthashastra* sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi bagian dari kewajiban negara. Berkenaan dengan itu, *Kautilya Arthashastra* menegaskan bahwa upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi harus dilakukan di dalam (*in*) sekaligus melalui (*by*) sistem politik, hukum, dan pemerintahan. Upaya sistemik dan sistematis yang direkomendasikan dalam *Kautilya Arthashastra* mencakup seluruh fungsi manajemen dalam pengelolaan keuangan negara, baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, maupun evaluasi, dengan melibatkan seluruh perangkat pemerintah. Pengendalian dan pengawasan terhadap para pejabat negara dilakukan untuk menilai kualitas kinerjanya sekaligus indikasi korupsi yang dilakukan. Sementara itu, penegakan hukum bagi pejabat yang melakukan korupsi dilaksanakan untuk membersihkan struktur birokrasi sekaligus memutus rantai sistemik yang ditimbulkan.

Kautilya Arthashastra mengutamakan asas penghematan keuangan negara dalam seluruh proses pengelolaannya. Penerapan asas ini dimaksudkan agar anggaran yang dihemat bisa digunakan untuk menambah kekayaan negara, menjalankan pemerintahan dengan baik, dan menjamin kehidupan masyarakatnya selama kurun waktu tertentu, terutama ketika negara tidak mendapatkan penerimaan, misalnya dalam situasi perang atau bencana alam yang dahsyat. Tindakan korupsi tentu saja bertentangan dengan azas ini, bahkan berpotensi menggerogoti keuangan negara untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penggunaan keuangan negara harus mendapatkan pengawasan dari lembaga-lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Kautilya Arthashastra, I.12.7.6*, sebagai berikut.

“Raja hendaknya mempekerjakan mereka yang mampu melakukan penyamaran secara meyakinkan dan yang telah teruji loyalitas serta kemampuannya, untuk memata-matai para pejabat tinggi pembantu raja, penasihat dan pendeta istana, panglima tertinggi, putera mahkota (pangeran), kepala pelayan istana, kepala penjaga istana, kepala departemen, administrator, bendahara, hakim, komandan pasukan, kepala daerah, kepala pabrik, dewan menteri, pengawas, kepala staf angkatan perang, komandan

benteng, komandan wilayah perbatasan, dan kepala kehutanan, di wilayah kekuasaannya”.

Petikan teks tersebut menegaskan bahwa pengawasan dilakukan kepada semua pejabat negara tanpa pandang bulu, bahkan terhadap putra mahkota dan pendeta istana sebagai orang yang paling dekat dengan raja. Hal ini berkelindan dengan asumsi dasar yang dibangun dalam *Arthashastra* bahwa setiap pejabat berpotensi menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum, termasuk korupsi. Oleh karena itu, pengawasan menjadi strategi politik dan hukum yang penting dalam rangka pencegahan serta pemberantasan korupsi menurut *Kautilya Arthashastra*. Selanjutnya, hasil pengawasan tersebut menjadi pijakan raja untuk menerapkan proses hukum kepada setiap pejabat negara yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam tugas dan kedudukannya, inilah *dandaniti*.

Memerjarkan, mengikat, dan hukuman badan layak diberikan kepada semua pelanggar hukum termasuk pelaku korupsi. Pelanggar hukum diadili berdasarkan empat sumber hukum yang tata urutannya meliputi, (1) *dharma*, aturan hukum tertinggi yang bersumber dari *Veda* dan *Dharmashastra*; (2) *bhukti* dan *saksi*, bukti dan kesaksian; (3) *silācara* atau kebiasaan, yaitu tradisi yang diwarisi dan dipraktikkan dalam masyarakat; serta (4) *vyavahara* dan *charitra*, hukum tertulis yang dibuat oleh raja. Proses peradilan tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan dalam *Kautilya Arthashastra* telah diatur secara hirarkis, sekaligus menegaskan bahwa raja bukan sumber hukum yang tertinggi. Dalam konteks hukum di Indonesia, tata urutan perundang-undangan tersebut semakna dengan Ketetapan MPRS Nomor XX Tahun 1966 yang telah diganti dengan Ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang menganut sistem hirarki hukum (Radendra S., 2005:82).

Dimensi penting lainnya dalam konteks penegakan hukum menurut *Kautilya Arthashastra* bahwa hukum berfungsi untuk melindungi seluruh masyarakat secara adil. Perlindungan secara adil memiliki makna yang demikian luas, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta agama berdasarkan *dharma*. Tindakan korupsi jelas-jelas mencederai rasa keadilan masyarakat karena uang yang dikorupsi oleh pejabat negara, semestinya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam *Kautilya Arthashastra*, konsep keadilan juga ditetapkan menurut kedudukan dan kewenangan seseorang (*catur warna*). Seorang *sudra* yang melakukan tindakan pelanggaran hukum akan dikenakan hukuman yang lebih rendah, dibandingkan dengan *waisya*, dan seterusnya. Hal ini menegaskan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin tinggi pula hukuman yang akan diberikan kepadanya apabila melakukan pelanggaran hukum. Mengingat mereka dipandang memiliki kualitas dan

kompetensi lebih baik dibandingkan masyarakat yang kedudukannya lebih rendah. Konsep keadilan dalam hukum yang juga dianut *Kautilya Arthashastra* bahwa mereka yang mengetahui dan memahami hukum akan mendapatkan hukuman lebih berat ketika melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut, daripada orang yang tidak mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum. Oleh karena itu, pemberian sanksi hukuman berat kepada pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam dibenarkan menurut *Kautilya Arthashastra* karena seorang pejabat negara dipandang mengetahui dan memahami hukum, bahkan mereka sepatutnya menjadi suri tauladan masyarakat dalam kepatuhan terhadap hukum.

(2) Membangun Masyarakat Antikorupsi

Korupsi sesungguhnya bermuara pada manusia, baik dalam dimensi kesadaran moralnya maupun kepatuhannya pada hukum yang berlaku. Sistem politik dan hukum mungkin saja efektif untuk membatasi ruang gerak para pelaku korupsi, tetapi budaya korupsi niscaya akan terus melahirkan pelaku-pelaku baru dengan pola-pola yang baru pula. Hal ini terbukti bahwa pengawasan ketat dan aturan-aturan yang mempersempit celah korupsi, ternyata melahirkan berbagai modus operandi baru dalam kasus-kasus yang terungkap kemudian. Oleh karena itu, pembangunan karakter antikorupsi menjadi upaya mendasar yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai korupsi dalam sistem birokrasi di Indonesia. Pentingnya pembangunan karakter ini karena manusia memiliki kehendak bebas serta kebebasan untuk menentukan sendiri eksistensinya dalam ruang, waktu, dan tindakan (Katsoff, 1986; Marcell, 2005).

Kebebasan ini pula yang menentukan pilihan manusia terhadap berbagai nilai, ideologi, peluang, dan kesempatan yang hadir dalam kehidupannya. Perilaku korupsi menunjukkan kuatnya pesona materialisme sehingga kepemilikan atas properti-properti material menjadi orientasi kehidupan,. Hal ini berkelindan dengan adanya peluang dan kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut sehingga korupsi menjadi pilihan tindakan yang niscaya, walaupun bertentangan dengan nilai dan norma kebajikan. Oleh karena itu, pengendalian diri menjadi langkah penting dalam membangun karakter antikorupsi dengan memosisikan nilai moral sebagai prinsip tertinggi kehidupan. Pengendalian diri yang bertumpu pada moral harus dimulai dari pikiran, karena pikiran menjadi pemicu hasrat dan kehendak ketika berhubungan dengan objek-objek material. Pikiran bersifat liar, tidak pernah diam, penuh kegelisahan, penuh keinginan, sebagaimana disebutkan dalam *Sarasamuccaya*, 81 berikut ini.

“Keadaan pikiran itu, tidak berkententuan jalannya, banyak yang dicita-citakan, terkadang penuh kesangsian, demikianlah kenyataannya; jika ada orang dapat mengendalikan pikirannya, pasti orang itu mendapat kebahagiaan, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang lain”.

Sloka ini menegaskan bahwa pengendalian diri harus diawali dengan menyadari sifat pikiran yang liar. Pikiran merupakan sumber keinginan yang dapat muncul secara tiba-tiba, ketika berhubungan dengan objek-objek material melalui indera (*indriya*). Perjumpaan pikiran dengan objek material menimbulkan bermacam-macam sensasi dan gejala kejiwaan lainnya yang tercermin dalam tindakan manusia. Sensasi-sensasi inilah yang membelenggu Sang Diri (*Atman*) sehingga ia lupa (*aturu*) pada kesejatiannya. Untuk itu, pikiran harus dikendalikan terlebih dahulu dari keterikatan pada objek-objek inderawi sehingga menjadi pikiran yang berkesadaran (*consciousness mind*). Kesadaran ini menjadikan Sang Diri menemukan kembali hakikat kesejatiannya (*matatur ikang atma ri jatinya*). Sebaliknya, Sang Diri yang kehilangan kesadaran akan terjebak pada objek duniawi dan menjadikan dirinya budak *indriya* (Sura, 1985:35—36).

Pengendalian diri menggambarkan kemampuan manusia mengendalikan dan mengontrol *indriya* sekaligus pikirannya. Apabila *indriya* mampu dikendalikan, maka manusia tidak akan mengalami kemelekatan dengan objek-objek duniawi. Selanjutnya, melalui pikiran yang terkendali manusia mampu memilah dan memilih arti kehadiran objek-objek inderawi dalam kehidupannya sehingga tidak mengikatkan diri pada objek-objek tersebut. Mengingat pikiran (*manah*) juga terhubung dengan institusi kejiwaan, seperti *ahamkara* (ego) dan *buddhi* (kebijaksanaan) yang melahirkan hasrat, kehendak, dan libido (*kama*), maka pengendalian pikiran berhubungan erat dengan cara manusia mengendalikan *kama*-nya. Pikiran-pikiran hedonis yang mementingkan terpenuhinya keinginan tanpa batas dapat dipandang sebagai akibat dari kurangnya pengendalian diri, juga termasuk di dalamnya keinginan untuk mendapatkan keuntungan material dengan cara cepat dan mudah melalui tindakan korupsi.

Kendatipun demikian, *kama* juga merupakan bagian esensial dalam kehidupan manusia karena tanpa *kama* tidak ada tujuan hidup, bahkan eksistensi manusia tidak mungkin terpelihara. Oleh karena itu, transformasi *kama* merupakan syarat mutlak bagi tercapainya tujuan hidup karena *kama* yang mendorong manusia melakukan sesuatu, menjadikan hidupnya bergairah, dan mampu merasakan kenikmatan hidup. Dengan dorongan *kama*, manusia tergerak memenuhi kebutuhan hidup (*artha*), termasuk benda-benda duniawi yang memberinya kebahagiaan. Akan tetapi, memenuhi tuntutan *kama* untuk meraih *artha* tanpa dilandasi *dharma*, justru akan semakin menjauhkan manusia dari makna kebahagiaan sejati, bahkan

menjerumuskannya pada kesengsaraan (*dukha*). Dengan demikian, *dharma* harus menjadi prinsip pengendali dalam pemenuhan *kama* dan *artha*, seperti penjelasan *Sarasamuscaya*, 12 berikut ini.

“Pada hakikatnya, apabila *artha* dan *kama* dituntut, maka seharusnya *dharma* dilakukan lebih dahulu. Tidak dapat disangsikan lagi, pasti akan diperoleh *artha* dan *kama* nantinya. Tidak akan ada artinya, apabila *artha* dan *kama* diperoleh menyimpang dari *dharma*”.

Perilaku korupsi menggambarkan tindakan mendapatkan *artha* dan *kama* tanpa didasari *dharma*, karena korupsi berarti mencuri dan merampas uang rakyat yang bukan haknya. Dalam relasinya dengan *karmaphala*, *Sarasamuccaya* 149, menegaskan bahwa hasil korupsi juga akan terampas dari pelakunya, seperti berikut.

Apabila ada orang yang merampas kekayaan orang lain dengan memanfaatkan kekuatan dan jumlah pengikutnya, bahkan bukan harta kekayaan hasil curiannya saja yang akan terampas darinya, tetapi juga *dharma*, *artha*, dan *kama* akan ikut terampas darinya, akibat dari perbuatannya itu.

Sloka di atas menunjuk pada perilaku koruptor yang merampas kekayaan negara dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang ia miliki. Tindakan tersebut tidak hanya mengakibatkan penderitaan baginya, tetapi juga menghancurkan *dharma*, *artha*, dan *kama*-nya sendiri, atau dengan kata lain, kebahagiaan akan menghilang dari kehidupannya. Walaupun mungkin tindakannya luput dari jeratan hukum negara, tetapi hukum *karma* pasti terjadi, sebagaimana tersirat dalam *Sarasamuccaya* 150 berikut.

“Orang yang tidak pernah mencuri barang milik siapa pun, sesungguhnya tidak ada yang ia takuti, ia akan selalu gembira di mana pun dan kemana pun pergi. Sebaliknya, seorang pencuri, kemana pun ia pergi akan selalu curiga dan penuh rasa takut, demikianlah keadaannya, seperti halnya seekor kijang atau binatang liar yang masuk desa”.

Sloka di atas menegaskan bahwa pelaku korupsi hidupnya tidak mungkin tenang karena selalu dikejar-kejar perasaan bersalah dan selalu dihantui jerat hukum yang akan menimpanya. Inilah maksud dari hilangnya *dharma*, *artha*, dan *kama*, ketika kekayaan yang dimiliki tidak memberi kebahagiaan dalam hidupnya. Dengan demikian, karakter antikorupsi harus dibangun melalui pengendalian diri terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan kebajikan (*dharma*). *Dharma* harus menjadi dasar dalam seluruh upaya manusia meraih *artha* dan *kama*, karena tanpa *dharma* sama saja dengan mencuri. Pengendalian diri menjadi kunci

utama menghindari perilaku korupsi, tatkala peluang dan kesempatan dapat muncul sewaktu-waktu. Apabila karakter ini terbangun dalam diri manusia, maka ungkapan “orang tidak korupsi karena belum mendapatkan kesempatan” tidak berlaku lagi.

D. Penutup

Bangsa Indonesia telah berada pada fase darurat korupsi ditandai dengan kasus korupsi yang masih saja terjadi, walaupun struktur birokrasi telah diisi generasi-generasi baru. Sulitnya memutus rantai korupsi karena budaya korupsi telah mengakar kuat pada struktur dan kultur birokrasi ataupun politik di negeri ini. Strategi Hindu membangun masyarakat antikorupsi berdasarkan *Kautilya Arthashastra* didasari asumsi bahwa setiap pejabat negara memiliki potensi dan peluang sama untuk melakukan korupsi. Maka dari itu, strategi politik dan hukum melalui pengawasan melekat disertai penegakkan hukum kepada seluruh pejabat negara tanpa kecuali adalah strategi yang direkomendasikan. Selain itu, juga tidak kalah pentingnya adalah membangun karakter antikorupsi dengan kesadaran bahwa korupsi adalah merampok uang rakyat dan negara yang bertentangan dengan *dharma*. Dengan demikian, strategi Hindu membangun masyarakat antikorupsi meliputi dua aspek utama, yakni penguatan basis moralitas dan mentalitas, sekaligus pengawasan yang ketat dan penegakan hukum, terutama kepada para penyelenggara negara serta pemerintahan.

4. Daftar Pustaka

- Astana, Made & C.S. Anomdiputro (penj.). 2005. *Kautilya (Canakya) Arthashastra (Masalah Politik, Ekonomi, Hukum, Budaya dsb.)*. Surabaya: Paramita.
- Dreher, Alex, Christos Kotsogiannis, Steve McCorrison. 2004. *Corruption Around the World: Evidence from a Structure Model*. Mimeo: University of Konstanz and University of Exeter.
- Gunadha, Ida Bagus. 2012. *Aneka Politik Hindu*. Denpasar: Penerbit Widya Dharma bekerjasama dengan Program Pascasarjana UNHI Denpasar.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Gramedia.
- Katsoff, Louis O. 1987. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Marcell, Gabriel. 2005. *Misteri Eksistensi Menyelami Makna Keberadaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Radendra S. Ida Bagus. 2005. *Ekonomi dan Politik Dalam Arthasastra*. Denpasar: Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan UNHI Denpasar bekerjasama dengan Penerbit Widya Dharma.

Rao, M.V.Krishna. 2003. *Studies In Kautilya*. Denpasar: Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan UNHI Denpasar bekerjasama dengan Penerbit Widya Dharma.

Sen, Amrit Jit. 1986. *Hindu Political Thought*. Shaktinagar – Delhi: Gian Publishing House.

Shamasastri, R (*Trans.*). 1916. *Kautilya's Arthasastra*. Bangalore: Government Press.

EKOSENTRISME: *MAPAG TOYA* SEBUAH MODEL

Oleh

Ida Bagus Dharmika

Email: gusdharmika@gmail.com

I Gusti Bagus Wirawan

Email : ajikwirawan@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks pemikiran **ekosentrisme** yang berpandangan bahwa manusia merupakan bagian dari fenomena alam, manusia adalah produk dari alam oleh sebab itu dia harus selalu menjaga alam, model pemikiran inilah mulai disadari oleh manusia pada zaman sekarang, terutama ketika masa krisis sedang melanda manusia. Secara empirik menunjukkan bahwa manusia tidak mungkin menghilangkan kehidupan sebagai petani karena sumber makanan manusia semuanya berasal dari usaha petani. Ketika dunia pariwisata terpuruk karena pandemi covid-19 yang melanda dunia telah menyadarkan manusia bahwa pertanian jangan dilupakan, karena itulah sumber utama kehidupan kita. Penelitian kecil ini mencoba membenah dan kembali memikirkan makna dari *mapag toya* dalam upacara siklus pertanian di Bali yang dihubungkan dengan kehidupan kekinian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi terhadap bagian-bagian dari proses upacara *mapag toya* itu. Upacara *mapag toya* dilaksanakan setiap enam bulan sekali pada saat mulai mengairi sawah. *Mapag Toya* ini merupakan suatu upacara menjemput air ke pusat air, seperti di pura Masceti atau *temuka aya*, karena berdasarkan kepercayaan bahwa air yang mengairi sawah subak di areal subak berasal dari sumber air yang ada di gunung, tujuan upacara ini adalah memohon kehadiran Tuhan agar diberikan air yang cukup untuk mengerjakan sawahnya.

1. PENDAHULUAN

Sebagian besar fikiran masyarakat saat ini ketika urusan global atau pariwisata yang menjadi andalan hidup selama ini mengalami masalah, orang-orang mulai berfikir untuk kembali ke alam? Mulai mereka memikirkan manfaat sinar matahari, manfaat air, manfaat tanah, manfaat bergerak, hidup bersih, menjaga interaksi dan relasi antar warga yang sebelumnya model berpikir dan bertindak seperti itu sangat diremehkan dan diasingkan dalam hidup ini yang kita sebut dalam bahasa ilmu yaitu alienansi, ketidakberumahan. Dalam konteks pemikiran ekosentrisme yang berpandangan bahwa manusia adalah bagian dari

fenomena alam, manusia adalah produk dari alam oleh sebab itu dia harus selalu berinteraksi dan menjaga keseimbangan dengan alam, model pemikiran inilah mulai disadari, disikapi oleh manusia pada zaman sekarang. Sebagai contoh misalnya, hidup sebagai petani sangat menjanjikan dalam kehidupan ini, pekerjaan ini sangat dirindukan oleh masyarakat kita, masyarakat agraris demikian banyak orang bilang para ahli antropologi menemukan bahwa ketika masyarakat itu menetap (yang sebelumnya *nomaden*) mulailah dibangun secara bertahap tata nilai, norma hidup, mulailah orang menata matapencarian, kesenian, teknologi dan juga mulai menata dan mendalami unsur-unsur religi yang dipakai sebagai panutan di dalam menjalankan kehidupan ini. Dalam konteks perkembangan kebudayaan Bali, berdasarkan pelacakan prasasti diantaranya prasasti Sukawana (882 M) yang menyebutkan istilah *huma* dan *perlak*, kemudian pada prasasti Bebetin (893 M) ditemukan istilah *undagi pengarung*, yang berarti tukang membuat terowongan air, kemudian prasasti Trunyan (891 M) ditemukan istilah *serdanu*, kemudian prasasti Pandak Badung (1071 M) yang menyebutkan istilah *kasuwakan*, dan juga dalam prasasti Klungkung (1072 M) ditemukan *kasuwakan rawas* (Disbud Denpasar, 2014:2). Struktur petani inilah yang sebenarnya memunculkan berbagai ragam kebudayaan di dunia ini dan bahkan religi muncul dari wujud ini. Berbagai tatwa, susila dan berbagai upacara dimunculkan oleh aktivitas petani yang membentuk peradaban petani. Pesta pada masyarakat petani yang mereka buat sangatlah meriah, dengan melibatkan junjungan mereka yaitu Bhetara-Bhetari, Dewa-Dewi yang mereka puja, dengan timbal balik yang mereka harapkan berupa kesucian dan kesejahteraan dalam hidup ini, yang sebelumnya sangat mendapat perhatian dan menjadi topangan hidup nenek moyang kita. Dalam persembahan itu mereka tidak lupa menghaturkan binatang yang mereka potong seperti misalnya daging babi, babi guling sebagai persembahan utama. Pemikiran Robenson Smith tentang upacara bersaji dalam dunia antropologi sangat membantu dalam memecahkan dan melihat model fenomena ini. Mereka melakukan upacara bersaji itu dengan menyajikan beberapa binatang dan tumbuh-tumbuhan kemudian yang sebagian lagi dinikmati oleh masyarakat itu, dan juga dengan menghadirkan dewa junjungannya pada saat itu, semuanya itu adalah dalam rangka menjaga solidaritas masyarakat dan juga dilakukan dalam rangka mamenuhi kewajiban sosial.

Pertanian salah satunya merupakan pekerjaan yang tidak bisa dilepaskan dalam hidup mereka. Berbagai tatanan, struktur dibentuk untuk menata pekerjaan agar mendapatkan hasil yang akan menyucikan hidup manusia. Ketika kita tengah asik dengan dunia digital, dunia maya menjebak dan bahkan melupakan hakikat sejati dari hidup ini, apabila dunia ini mengalami kekacuan, fasilitas ATM tidak bisa jalan, kekacuan ekonomi, kekacuan sosial semakin mendapat tempat, menyebabkan kita kehilangan jati diri. Ketika suasana itu

menghadapi kita, baru kita mulai lagi berfikir, mensikapi bahwa yang bisa menghidupi kita ketika itu adalah interaksi kita dengan tanah terutama tanah pertanian. Dengan hasil padi, ketela, jagung, air yang terpelihara, alam inilah yang akhirnya menghidupkan kita, janganlah lupa atau melupakan pertanian, mengolah tanah karena dia akan memberikan kesejateraan kepada manusia.

Berinteraksi dengan alam khususnya dunia petani mengajarkan kepada kita tatanan relegi, dunia jiwa yang menghidupkan kita mulai kita sadari. Proses tatanan kehidupan relegi seperti tatwa, susila, dan upacara sebagai suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain kita sadari. Tradisi dan kearifan lokal kita sudah miliki dan hendak diteruskan kepada generasi berikutnya juga mulai kita pelajari, bagaimana kita mencintai tanah, air, udara sebagai sumber kehidupan kita kita sadari, inilah akibat timbal balik dari adanya krisis yang melanda dunia. Ekosistrisme sebagai paham telah mengajarkan dan menuntun kita, bahwa manusia adalah bagian dari alam ini (pertiwi, apah, teja, bayu, akasa), dan harus menjaga keseimbangan dengan alam.



Peru Bedugul didirikan dimasing-masing *pengalapan* sawah
Mohon kepada penguasa alam akan kesuburan dan kemakmuran

2. MAPAG TOYA

Manusia tidak mungkin menghilangkan kehidupan sebagai petani karena sumber makanan manusia semuanya berasal dari usaha petani. Ada beberapa upacara yang dilakukan oleh petani yang tergabung dalam organisasi subak di dalam proses penanaman padi antara lain: (1) *Upacara Mapag Toya*, upacara ini biasanya dilaksanakan setiap enam bulan sekali

pada saat mulai mengairi sawah. *Mapag Toya* ini merupakan suatu upacara menjemput air ke pusat air, seperti di pura Masceti yang disimbolkan sebagai sumber kemakmuran, karena berdasarkan kepercayaan bahwa air yang mengairi sawah subak di areal subak berasal dari sumber air yang ada di gunung, tujuan upacara ini adalah memohon kehadiran Tuhan agar diberikan air yang cukup untuk mengerjakan sawahnya., dan selanjutnya berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan hidup manusia ,(2) *Upacara Ngawit Ngendagin*, upacara ini dilaksanakan di hulu empelan subak yang merupakan pusat sumber air yang mengairi sawah-sawah yang ada (3) *Upacara pengiwit*, merupakan upacara yang dilaksanakan pada saat para petani akan mulai menanam padi. Upacara ini dilaksanakan di Ulun Siwi, di samping upacara di atas yang sifatnya rutin oleh masing-masing krama subak, ada pula upacara yang dilaksanakan secara insidental atau pada waktu-waktu tertentu dengan tujuan tertentu pula yang meliputi: (a) upacara dalam rangka memperbaiki pura-pura penyungsungan atau fasilitas irigasi lainnya, seperti bendungan, yang dilaksanakan dalam waktu tidak tertentu yaitu apabila subak membangun atau memperbaiki bangunan bangunan subak tersebut. (b) Upacara *Nangluk Mrana* atau *Neduh*, upacara ini dilaksanakan apabila subak di arial pewedangan/wilayah subak mengalami serangan hama atau penyakit pada tanaman padi, dan tanaman yang lain. Upacara ini bertujuan untuk memohon kehadiran Tuhan agar segala hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi segera dilenyapkan. (c) Upacara *Nunas Hujan*, dilaksanakan pada saat terjadi kekurangan air akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Tujuannya adalah memohon kepada Tuhan agar diberikan hujan sehingga petani dapat turun ke sawah mengerjakan tanah garapannya (4) *Upacara Ngendagin*, merupakan upacara yang dilaksanakan oleh petani pada saat mulai mengolah atau mengairi sawahnya. Para petani melaksanakan upacara *ngendagin* di pengalapan sawah masing-masing. *Pengalapan* adalah bagian petak sawah yang terletak di bagian hulu, sebagai tempat para petani untuk melaksanakan upacara keagamaan maupun sebagai tempat untuk memulai suatu tahap pekerjaan di sawah. (5) *Upacara Ngurit*, dilaksanakan pada saat petani mulai menyemai atau membuat bibit padi (*bulih*) . Tujuan dari upacara ini adalah memohon agar bibit padi yang dibuat dapat tumbuh dan menghasilkan padi yang baik (6) *Upacara Nandur*, yang dilaksanakan pada saat petani mulai memindahkan bibit padi dari persemaian untuk ditanam di petak sawah. Tujuan dari upacara nandur ini adalah sebagai pemberitahuan bahwa petani akan mulai menanam padinya dan memohon kehadiran Dewi Sri agar beliau berkenan melinggih dan bersemayam di sanggah/pengalapan serta melindungi dan memelihara tanaman padi petani sehingga dapat tumbuh dengan baik dan subur. (7) *Upacara Nyambutin*, upacara ini dilaksanakan pada padi berumur satu bulan tujuh hari (42). (8) *Upacara Biukukung*,

dilaksanakan pada saat padi sedang bunting, dengan tujuan memohon kepada Tuhan agar tanaman padi terhindar dari serangan hama dan penyakit dan memberikan hasil yang baik. (9) *Upacara Nyungsung*, menyambut mulai bermunculannya batir padi. (10) *Upacara Ngusaba*, dilakukan pada saat padi mulai menguning (11) *Upacara Nyangket*, dilaksanakan pada saat menjelang panen. Dua hari menjelang panen, petani membuat Dewi Nini sebagai lambang Dewi Sri dengan mempergunakan beberapa helai tangkai padi. Setelah upacara nyangket dilaksanakan maka petani boleh memulai memetik padi atau panen. (12) *Upacara Mantenin*, dilaksanakan pada tempat penyimpanan padi (lumbung). Tujuan upacara ini adalah sebagai ucapan syukur terhadap Dewi Sri atas anugrahNya yang telah memberikan hasil panen kepada petani dan memohon agar beliau tetap bersemayam atau bertempat tinggal dan menjaga padi di lumbung, serta padi yang tersimpan tersebut dapat berguna bagi kehidupan petani yang bersangkutan.

Rangkaian atau siklus upacara yang dilaksanakan oleh petani di subak secara terus menerus dilaksanakan dengan tujuan para petani mendapatkan hasil padi yang melimpah dan selalu mendapatkan tuntunan dari Dewi Sri dan Dewa Wisnu sebagai penguasa padi dan air. Salah satu yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah upacara *Mapag Toya* yang dilaksanakan paling awal dalam proses penanaman padi di sawah. Upacara ini dilaksanakan di Pura Masceti dan juga di bendungan pembagian air (Temuku Aya), berbagai prosesi dilaksanakan dalam melaksanakan upacara *mapag toya* ini, yang dilakukan oleh semua *pengempon* subak yang bersangkutan.



Foto: Temuku Aya tempat dilangsungkannya upacara Mendak Toya

Ada beberapa bangunan yang termasuk di dalam infrastruktur saluran air di subak yang dikenal oleh warga subak. Bangunan saluran air yang ada pada sawah petani yaitu, *temuku aya* (bangunan bagi primer), *pemaron* (bangunan bagi sekunder), *tembuku penesan* (bangunan bagi kwater), *jengkuwuung* (terowongan), *abangan* (talang), *telabah gede* (saluran sekunder), *telabah pemaron* (saluran tersier), *telabah pesanan* (saluran untuk 10 orang). Demikian juga saluran yang lain seperti *pangkung*, *jelinjingan*, rawa-rawa yang merupakan resapan air sangat dihormati oleh masyarakat agraris yang ada di Bali.

Agar air bisa mengalir pada sawah-sawah dengan baik, maka diadakan ritual, perbaikan dan pembersihan pada saluran air. Pembersihan saluran air ini biasanya dilakukan oleh warga subak di masing-masing munduk. Pembersihan saluran air dilakukan pada saat-saat tertentu terutama pada musim tanam padi. Di dalam *awig-awig* subak aturan tentang gotong royong untuk pembersihan saluran air diatur dengan tegas dinyatakan seperti: “.... *Mangdene nenten jantos kaicalang toya sangkaning karusak sarana pamargin toyane, krama subak makarya magotong royong sangkan rahina sane sampun kapicayang. mecikan ljinjingan miwah temuku-temuku sane rusak*” artinya: agar tidak sampai kehilangan air, karena rusaknya saluran air, maka anggota subak diwajibkan untuk melakukan gotong royong memperbaiki dan membersihkan saluran primer, sekunder, maupun tersier pada saat-saat tertentu.



Foto: upacara *mekekelem guling* di *temuku aya*

Di beberapa subak dilaksanakan upacara *mapekelem* di saluran air *Temuku aya* dengan sarana babi guling yang dipotong-potong, direcah kemudian diajutkan di saluran air itu. Beberapa teks sastra dan cerita rakyat mitologi telah memberikan petunjuk bahwa sifat air adalah mencari tempat ke arah bawah, mengalir dan memang begitu sifatnya (*rta*), dengan segala kesaktiannya dan dibantu oleh pasukannya seperti babi. Demikian juga ada kekuatan yang lain mencari ujung atas yaitu api (*rta*), juga dibantu oleh pasukannya berupa burung yang memiliki sayap, namun kedua kekuatan ini tidak berhasil, karena kedua kekuatan ini

sedang diuji oleh Dewa Siwa. Teks sastra ini telah menjadi referensi masyarakat subak untuk melaksanakan upacara *mapag toya* dengan sarana atau dibarengin dengan *mepekelem babi guling*.

3.SIMPULAN

Ekosistrisme adalah paham yang telah lama diadopsi dalam pemikiran ekologi Hindu bahwa manusia adalah bagian dari alam, manusia tidak bisa melepaskan diri fenomena alam, keseimbangan, kelentingan lingkungan sangat diperhatikan dalam paham ini. Dunia petani adalah dunia yang tidak pernah bisa lepas dari rangkaian matapencapaian, karena segala sumber makanan manusia bersumber dari sana. *Temuka aya* adalah salah satu contoh dalam menjelaskan paham ekosentrisme ini berjalan dalam kehidupan masyarakat petani, *temuka aya* adalah infrastruktur dalam dunia pertanian, pada tempat inilah segala sesuatu yang berhubungan dengan ritual dilakukan termasuk *mepekem babi guling*, dengan makna kecintaan dan penghormatan kepada hakikat air.

Perubahan infrastruktur wajah subak menjadi kota membawa konsekuensi terhadap superstruktur yaitu budaya dan agama, ritual *mapag toya* sebagai contoh sudah ditinggalkan. Paradigma berfikirpun berubah yang pada awalnya ada rasa hormat dan rasa bhakti terhadap dasar eksistensi air sekarang sudah berubah menjadi paradigma rasa 'hormat' kepada uang dan hilangnya manajemen keadilan, kebanjiran saat hujan dan kekeringan saat kemarau dan sering terjadi konflik di masyarakat dengan objek air.

Bahkan seperti dikemukakan Suparlan (1999), Giddens (1999) Konflik-konflik sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat manapun di dunia ini termasuk yang terjadi di berbagai daerah Indonesia dimulai oleh perebutan sumber-sumber daya atau sumber-sumber rezeki. Apabila perebutan ini berjalan sesuai aturan main yang mereka anggap adil, maka konflik tidak terjadi. Namun, jika terjadi hal yang sebaliknya, maka konflik sulit dihindarkan. Jadi, perebutan sumber daya yang mengabaikan nilai keadilan, nilai kejujuran dan nilai religius merupakan sumber konflik yang tak bisa diabaikan.

Kesadaran bersama untuk senantiasa melindungi sumber-sumber air, dan juga memelihara ritual yang berkaitan dengan air seperti '*mapag toya*' misalnya agar senantiasa dienkulturasi, sosialisasi dan internalisasi kepada umat, termasuk di dalamnya para pembisnis yang selama ini memanfaatkan air.

DAFTAR BACAAN

Abdullah, Irwan. 2003. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Umum*. (Bahan Pelatihan Metodelogi Penelitian). Jakarta: Dikti.

Atmadja, Nengah Bawa 2008. “*Kearifan Lokal: Mendekatkan Kesenjangan Antara Teks Ideal dan Teks Sosial Melalui Pikiran Menyintesis dan Multitipeperspektifisme*” (Peper dibawakan dalam seminar nasional Kearifan Sastra dalam Pelestarian Lingkungan), Denpasar: Fakultas Sastra Unud.

Daeng. Hans J. 2008. *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dharmika, Ida Bagus, 2020 “*Air Sawah*”. Dalam Majalah Wartam, Edisi 7/Th.1/September/2015. ISSN : 2442-6911

PELAKSANAAN UPACARA NGABEN BAGI MASYARAKAT HINDU DI BALI PADA ERA PANDEMI COVID-19

Oleh

Ni Made Sukrawati^[1] Wayan Paramartha^[2]

Email : sukrawati@unhi.ac.id^[1] wayan_paramartha@yahoo.com^[2]

Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

Abstrak

Pelaksanaan ngaben bagi Masyarakat Hindu di Bali pada pendemi Covid-19 sangat berbeda dengan pelaksanaan ngaben sebelum masa pandemi Covid -19, akan tetapi tidak mengurangi makna dan tujuan dari upacara ngaben tersebut. Ngaben merupakan suatu tradisi masyarakat bali yang memiliki aspek kesenian dan kebudayaan sebagai salah satu aspek destinasi wisata menunjang perkembangan pariwisata di Bali. Dengan kemajuan pesat dan perkembangan zaman senantiasa pada akhirnya mengalami perubahan gaya hidup. Tujuan ngaben disamping sebagai persembahan juga menjadi suatu objek tontonan akan keunikan tradisi “ngaben” di Bali, bahkan masyarakat yang mengadakan upacara ngaben hingga mengeluarkan uang banyak untuk acara persembahan tersebut. Dengan demikian praktiknya dilapangan, upacara ngaben menjadi ajang kontestaasi yang dapat mempresentasikan status seseorang dan gaya hidup seseorang. Di tengah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia banyak kegiatan yang dibatasi bahkan dihentikan, terutama di Bali. Bali yang dikenal memiliki banyak tradisi dan upacara adat yang biasanya melibatkan banyak orang terpaksa harus dibatasi. Salah satu diantaranya adalah upacara Ngaben.

Kata Kunci : pelaksanaan upacara ngaben, masyarakat hindu bali, pandemi covid-19

Abstract

Implementation Ngaben is a Balinese tradition that has aspects of art and culture as one aspect of tourist destinations that support the development of tourism in Bali. With the rapid progress and development of the times, it always ends up experiencing changes in lifestyle. Besides being an offering, the purpose of the Ngaben is also an object of spectacle for the uniqueness of the “Ngaben” tradition in Bali, even people who hold a Ngaben ceremony spend a lot of money for the offering event. Thus, in practice, the Ngaben ceremony becomes a contestation arena that can present one's status and one's lifestyle. In the midst of the Covid-19

pandemic that hit Indonesia, many activities were restricted and even stopped, especially in Bali. Bali which is known to have many traditions and traditional ceremonies that usually involve many people must be limited. One of them is the Ngaben ceremony.

Keywords : Implementation Ngaben ceremony, balinese hindu community, of the covid-19

I. PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu propinsi yang ada di Indonesia dan menjadi suatu daerah tujuan wisata. Pulau Bali yang sering disebut dengan pulau dewata yang terkenal akan pulau seribu pura dengan potensi wisata yang dimiliki baik berupa alam yang indah, kebudayaannya bahkan penduduk atau masyarakat Bali yang terkenal ramahnya.

Di Bali merupakan mayoritas masyarakatnya beragama hindu, walau banyak ada masyarakat memeluk agama yang berbeda-beda yang dikenal di Indonesia yaitu kristen, protestan, budha, islam maupun konghucu. Realita kehidupan umat hindu di Bali kental akan pelaksanaan upacara-upacara persembahan yang sering menjadi kesibukan orang bali bahkan kehidupan *menyame braya* sudah menjadi tradisi. Surayin Ida Ayu (2017:64) mengatakan secara umum, tujuan agama Hindu yaitu mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan jasmani (*moksartham jagadhitaya ca iti dharma*). Kebudayaan yang menjadi tradisi di bali lahir dan berkembang dalam kehidupan beragama diwujudkan dalam pelaksanaan Panca Yadnya, diantaranya adalah Pitra Yadnya. Dalam melaksanakan upacara Pitra Yadnya dalam hal ini upacara ngaben.

Ngaben merupakan suatu tradisi masyarakat hindu di bali yang memiliki aspek kesenian dan kebudayaan sebagai salah satu aspek destinasi wisata yang menunjang perkembangan pariwisata di Bali. Dengan kemajuan pesat dan perkembangan zaman senantiasa pada akhirnya mengalami perubahan gaya hidup. Tujuan ngaben disamping sebagai persembahan juga menjadi suatu objek tontonan akan keunikan tradisi “ngaben” di Bali, bahkan masyarakat yang mengadakan upacara ngaben hingga mengeluarkan uang banyak untuk acara persembahan tersebut. Dengan demikian praktiknya dilapangan, upacara ngaben menjadi ajang kontestaasi yang dapat mempresentasikan status seseorang dan gaya hidup seseorang.

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia banyak kegiatan yang dibatasi pelaksanaannya, terutama di Bali. Bali yang dikenal memiliki banyak tradisi dan upacara adat yang biasanya melibatkan banyak orang terpaksa harus dibatasi. Salah satu diantaranya adalah upacara Ngaben.

Upacara Ngaben sendiri merupakan sebuah ritual pembakaran jenazah orang yang telah meninggal yang dilakukan umat Hindu di Bali. Upacara Ngaben sendiri memiliki banyak rentetan acara dan melibatkan banyak orang dalam setiap prosesnya. Di tengah wabah Covid-19 ini tidak banyak orang yang terlibat dalam prosesi pengabenan, tidak ada bade maupun lainnya yang melibatkan orang banyak. BPBD juga memberikan bantuan gratis berupa ambulance untuk mengantar jenazah ke setra tujuan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Propinsi Bali, salah satunya di Kota Denpasar. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara mendalam dan terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data berupa ungkapan-ungkapan naratif dari itu sendiri. Informan lainnya ditentukan secara acak (*random*), yaitu siapapun yang dapat memberikan informasi sebagai data pendukung. Kemudian, observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang upacara ngaben di Bali pada saat wabah pandemi Covid-19, bagi umat Hindu di Kota Denpasar. Terakhir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dari sumber non-insani berupa dokumen atau kepustakaan untuk menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori terkait.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan yang saling kait-mengkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (verifikasi) (Milles & Habermen, 1994:10—12). Reduksi data adalah proses memilah, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. *Kedua*, penyajian data bertujuan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Ketiga*, menarik simpulan berdasarkan reduksi data dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya. Ketiga tahapan ini berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah siklus penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan secara sistematis serta mendalam dan data yang dipergunakan sebagian besar adalah data yang terdapat di lapangan. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Hindu Bali pada Era pandemic Covid-19 di Bali. Penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Sutrisno Hadi (2019; 162), penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya mengemukakan kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan data yang sebenarnya, guna memberikan jawaban atau penjelasan terhadap masalah yang Menurut Eva Rufaida (2018;203). Penelitian deskriptif bertujuan untuk

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala dalam masyarakat. Upacara ngaben yang merupakan bagian dari Pitra Yadnya dan dilandasi oleh Pitra Rna (hutang jasa kepada leluhur).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upacara ngaben yang di lakukan pada saat wabah pandemi Covid -19 tidak banyak melibatkan orang banyak, bahkan orang-orang yang bertugas melaksanakan upacara adalah petugas-petugas dari Rumah sakit. Orang yang melaksanakan upacara ngaben khusus yang terkena dampak Covid-19 di bawa kesuatu tempat dimana sudah disiapkan sebelumnya. Keluarga yang memiliki korban pandemi Covid-19 sudah mengikhlaskan. Dari segi makna Ngaben merupakan bagian dari Pitra Yadnya dan dilandasi oleh Pitra Rna (hutang jasa kepada leluhur).

Upacara ngaben secara umum didefinisikan sebagai upacara pembakaran mayat.

1. Bentuk-bentuk Upacara Ngaben

A. Ngaben Sawa Wedana

Sawa Wedana adalah upacara Ngaben dengan melibatkan jenazah yang masih utuh (tanpa dikubur terlebih dahulu) . Biasanya upacara ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3-7 hari terhitung dari hari meninggalnya orang tersebut. Pengecualian biasa terjadi pada upacara dengan skala Utama, yang persiapannya bisa berlangsung hingga sebulan. Sementara pihak keluarga mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara maka jenazah akan diletakkan di balai adat yang ada di masing-masing rumah dengan pemberian ramuan tertentu untuk memperlambat pembusukan jenazah. Dewasa ini pemberian ramuan sering digantikan dengan penggunaan formalin. Selama jenazah masih ditaruh di balai adat, pihak keluarga masih memperlakukan jenazahnya seperti selayaknya masih hidup, seperti membawakan kopi, memberi makan disamping jenazah, membawakan handuk dan pakaian, dll sebab sebelum diadakan upacara yang disebut Papegatan maka yang bersangkutan dianggap hanya tidur dan masih berada dilingkungan keluarganya.

B. Ngaben Asti Wedana

Asti Wedana adalah upacara ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang pernah dikubur. Upacara ini disertai dengan upacara ngagah, yaitu upacara menggali kembali kuburan dari orang yang bersangkutan untuk kemudian mengupacarai tulang belulang yang tersisa. Hal ini dilakukan sesuai tradisi dan aturan desa setempat, misalnya ada upacara tertentu di mana masyarakat desa tidak diperkenankan melaksanakan upacara kematian dan upacara pernikahan

maka jenazah akan dikuburkan di kuburan setempat yang disebut dengan upacara Makingsan ring Pertiwi (Menitipkan di Ibu Pertiwi).

C. Swasta

Swasta adalah upacara ngaben tanpa melibatkan jenazah maupun kerangka mayat, hal ini biasanya dilakukan karena beberapa hal, seperti : meninggal di luar negeri atau tempat jauh, jenazah tidak ditemukan, dll. Pada upacara ini jenazah biasanya disimbolkan dengan kayu cendana (pengawak) yang dilukis dan diisi aksara magis sebagai badan kasar dari atma orang yang bersangkutan.

D. Ngelungah

Ngelungah adalah upacara untuk anak yang belum tanggal gigi.

E. Warak Kruron / Ngelangkir

Warak Kruron / Ngelangkir adalah upacara untuk bayi yang keguguran.

2. Rangkaian Pelaksanaan Ritual Upacara Ngaben

1. Ngulapin, Ngulapin bermakna sebagai upacara untuk memanggil Sang Atma. Upacara ini juga dilaksanakan apabila yang bersangkutan meninggal di luar rumah yang bersangkutan (misalnya di Rumah Sakit, dll). Upacara ini dilaksanakan berbeda sesuai dengan tata cara dan tradisi setempat, ada yang melaksanakan di perempatan jalan, pertigaan jalan, dan kuburan setempat.
2. Nyiramin/Ngemandusin, Merupakan upacara memandikan dan membersihkan jenazah, upacara ini biasa dilakukan di halaman rumah keluarga yang bersangkutan (natah). Pada prosesi ini juga disertai dengan pemberian simbol-simbol seperti bunga melati di rongga hidung, belahan kaca di atas mata, daun intaran di alis, dan perlengkapan lainnya dengan tujuan mengembalikan kembali fungsi-fungsi dari bagian tubuh yang tidak digunakan ke asalnya, serta apabila roh mending mengalami reinkarnasi kembali agar dianugrahi badan yang lengkap (tidak cacat).
3. Ngajum Kajang, Kajang adalah selembar kertas putih yang ditulisi dengan aksara-aksara magis oleh pemangku, pendeta atau tetua adat setempat. Setelah selesai ditulisi maka para kerabat dan keturunan dari yang bersangkutan akan melaksanakan upacara ngajum kajang dengan cara menekan kajang itu sebanyak 3x, sebagai simbol kemantapan hati para kerabat melepas kepergian mending dan menyatukan hati para kerabat sehingga mending dapat dengan cepat melakukan perjalanannya ke alam selanjutnya.

4. Ngaskara, Ngaskara bermakna penyucian roh mendiang. Penyucian ini dilakukan dengan tujuan agar roh yang bersangkutan dapat bersatu dengan Tuhan dan bisa menjadi pembimbing kerabatnya yang masih hidup di dunia.
5. Mameras, Mameras berasal dari kata peras yang artinya berhasil, sukses, atau selesai. Upacara ini dilaksanakan apabila mendiang sudah memiliki cucu, karena menurut keyakinan cucu tersebutlah yang akan menuntun jalannya mendiang melalui doa dan karma baik yang mereka lakukan.
6. Papegatan, Papegatan berasal dari kata pegat, yang artinya putus, makna upacara ini adalah untuk memutuskan hubungan duniawi dan cinta dari kerabat mendiang, sebab kedua hal tersebut akan menghalangi perjalanan sang roh menuju Tuhan. Dengan upacara ini pihak keluarga berarti telah secara ikhlas melepas kepergian mendiang ke tempat yang lebih baik. Sarana dari upacara ini adalah sesaji (banten) yang disusun pada sebuah lesung batu dan di atasnya diisi dua cabang pohon dadap yang dibentuk seperti gawang dan dibentangkan benang putih pada kedua cabang pohon tersebut. Nantinya benang ini akan diterebos oleh kerabat dan pengusung jenazah sebelum keluar rumah hingga putus.
7. Pakiriman Ngutang, Setelah upacara papegatan maka akan dilanjutkan dengan pakiriminan ke kuburan setempat, jenazah beserta kajangnya kemudian dinaikan ke atas Bade/Wadah, yaitu menara pengusung jenazah (hal ini tidak mutlak harus ada, dapat diganti dengan keranda biasa yang disebut Pepaga). Dari rumah yang bersangkutan anggota masyarakat akan mengusung semua perlengkapan upacara beserta jenazah diiringi oleh suara Baleganjur (gong khas Bali) yang bertalu-talu dan bersemangat, atau suara angklung yang terkesan sedih. Di perjalanan menuju kuburan jenazah ini akan diarak berputar 3x berlawanan arah jarum jam yang bermakna sebagai simbol mengembalikan unsur Panca Maha Bhuta ke tempatnya masing-masing. Selain itu perputaran ini juga bermakna: Berputar 3x di depan rumah mendiang sebagai simbol perpisahan dengan sanak keluarga. Berputar 3x di perempatan dan pertigaan desa sebagai simbol perpisahan dengan lingkungan masyarakat. Berputar 3x di muka kuburan sebagai simbol perpisahan dengan dunia ini.
8. Ngeseng, Ngeseng adalah upacara pembakaran jenazah tersebut, jenazah dibaringkan di tempat yang telah disediakan, disertai sesaji dan banten dengan makna filosofis sendiri, kemudian diperciki oleh pendeta yang memimpin upacara dengan Tirta Pangentas yang bertindak sebagai api abstrak diiringi dengan Puja Mantra dari pendeta, setelah selesai kemudian barulah jenazah dibakar hingga hangus, tulang-tulang hasil

pembakaran kemudian digilas dan dirangkai lagi dalam buah kelapa gading yang telah dikeluarkan airnya.

9. Nganyud, Nganyud bermakna sebagai ritual untuk menghanyutkan segala kekotoran yang masih tertinggal dalam roh mendiang dengan simbolisasi berupa menghanyutkan abu jenazah. Upacara ini biasanya dilaksanakan di laut, atau sungai.

Makelud, Makelud biasanya dilaksanakan 12 hari setelah upacara pembakaran jenazah. Makna upacara makelud ini adalah membersihkan dan menyucikan kembali lingkungan keluarga akibat kesedihan yang melanda keluarga yang ditinggalkan. Filosofis 12 hari kesedihan ini diambil dari Wiracarita Mahabharata, saat Sang Pandawa mengalami masa hukuman 12 tahun di tengah hutan. Demikian informasi tentang Upacara Adat Ngaben dari Pulau Dewata Bali, mari kita kenali dan lestarikan budaya bangsa kita sebagai wujud cinta tanah air.

Upacara ngaben yang merupakan bagian dari Pitra Yadnya dan dilandasi oleh Pitra Rna (hutang jasa kepada leluhur). Upacara Ngaben secara umum didefinisikan sebagai upacara pembakaran mayat, kendatipun dari asal-usul etimologi kata kurang tepat. Disamping ada tradisi ngaben yang tidak melalui pembakaran mayat. Ngaben sesungguhnya berasal dari kata “beya” artinya bekal, yakni berupa jenis upacara yang diperlukan dalam upacara ngaben itu. Kata Beya yang berarti bekal, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi biaya atau “prabeya” dalam bahasa Bali. Orang yang menyelenggarakan beya dalam bahasa Bali disebut “meyanin”. Kata Ngaben atau meyanin, sudah menjadi bahasa baku, untuk menyebutkan upacara “sawa wedhana”. Jadi sesungguhnya tidak perlu lagi diperdebatkan akan asal-usul kata itu. Yang jelas ngaben atau meyanin adalah upacara penyelenggaraan sawa (jenazah) bagi orang yang sudah meninggal.

Berdasarkan dari upacara ngaben bagi masyarakat Hindu di Bali di Era pandemi Covid-19, Upacara Ngaben sendiri merupakan sebuah ritual pembakaran jenazah orang yang telah meninggal yang dilakukan umat Hindu di Bali. Upacara Ngaben sendiri memiliki banyak rentetan acara dan melibatkan banyak orang dalam setiap prosesinya. Di tengah wabah Covid-19 ini tidak banyak orang yang terlibat dalam prosesi pengabenan, tak ada bade maupun lainnya yang melibatkan orang banyak. BPBD juga memberikan bantuan gratis berupa ambulance untuk mengantar jenazah ke setra tujuan. Ngaben merupakan salah satu upacara besar di Bali. Salah satu rangkaian upacara Pitra Yadnya ini merupakan upacara untuk orang yang sudah meninggal. Ngaben adalah upacara penyucian atma (roh) fase pertama, sebagai kewajiban suci umat Hindu Bali terhadap leluhurnya, dengan melakukan prosesi pembakaran jenazah. Ngaben sendiri adalah peleburan dari ajaran Agama Hindu dengan adat kebudayaan di Bali.

IV . KESIMPULAN

Pelaksanaan Ngaben bagi Masyarakat Hindu di Bali pada masa pandemic Covid-19 sangat berbeda sebelum adanya Covid-19 . Pelaksanaan upacara ngaben sangat dibatasi dari kerumunan orang-orang, bahkan jenazah langsung di angkut oleh mobil ambulanc, serta orang yang ikut mengantar tidak banyak bahkan di antar oleh pegawai rumah sakit dan keluarga inti, semua nya menggunakan masker sudah tentunya tidak terlepas dari protocol kesehatan. Semua nya ini adalah salah satu cara pencegahan tersebarnya wabah berikutny atau Covid ini bisa menular pada warga yang lain.

Di setiap daerah di Bali adalah hal yang lazim jika urutan acara dalam tata cara pelaksanaan Ngaben akan berbeda walaupun esensi upacara tersebut sama. Ini berkaitan dengan kepercayaan adat Bali yang mengenal adanya Desa Kala Patra yang secara harfiah di terjmhahkan menjadi tempat, waktu dan keadaan.

Jenazah diletakkan selayaknya sedang tidur, dan keluarga yang ditinggalkan akan senantiasa beranggapan demikian (tertidor). Di dalam Panca Yadnya, upacara ini termasuk dalam Pitra Yadnya, yaitu upacara yang ditujukan untuk roh lelulur. Makna upacara Ngaben pada intinya adalah untuk mengembalikan roh leluhur (orang yang sudah meninggal) ke tempat asalnya.

Upacara Ngaben biasanya dilaksanakan oleh keluarga sanak saudara dari orang yang meninggal, sebagai wujud rasa hormat seorang anak terhadap orang tuanya. Upacara Ngaben biasanya dilakukan dengan semarak, tidak ada isak tangis, karena di Bali ada suatu keyakinan bahwa kita tidak boleh menangisi orang yang telah meninggal, karena itu dapat menghambat perjalanan sang arwah menuju tempatnya. Mereka beranggapan bahwa, memang jenasah untuk sementara waktu tidak ada, tetapi akan menjalani reinkarnasi atau menemukan pengistirahatan terakhir di Moksha (bebas dari roda kematian dan reinkarnasi).

Upacara Ngaben sendiri merupakan sebuah ritual pembakaran jenazah orang yang telah meninggal yang dilakukan umat Hindu di Bali. Upacara Ngaben sendiri memiliki banyak rentetan acara dan melibatkan banyak orang dalam setiap prosesinya. Di tengah wabah covid-19 ini tak banyak orang yang terlibat dalam prosesi pengabenan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsana, I Ketut. 2012. *Pelaksanaan Ngaben di Bali Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Budiasa, I Nyoman. 2004. Rekonstruksi upacara Ngaben Di Bali (Disertasi). Program Pascasarjana Universitas Airlangga: Surabaya.
- Cahurel I made 2002. Arti Tirtha Pengentas dalam upacara Yadnya (Tesis). Program Pascasarjana Universitas Diponegoro: Semarang.
- Darmawan 2020 Pandemi Covid-19 Mengubah Kebijakan, Prilaku Masyarakat . Surabaya , Paramita.
- Milles & Haberman 1994. *Tingkat Analisa Data*, Surabaya, Paramita
- Surayin Ida Ayu, 2017, *Panca Yadnya*, Surabaya, Paramita
- Sutrisno Hadi, 2019, *Penelitian Kualitatif*, Surabaya, Paramita

PERAN LEMBAGA AGAMA DALAM MENGHADAPI COVID-19

Oleh

Dr. Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag

Email: idaayuarniati@unhi.ac.id

Abstract

The corona effect does affect all sectors, making us accustomed to staying at home, doing activities at home and working at home. In the end for now whatever the reason if it is felt possible to *Work From Home*. Use this time as the best time to gather with family, if you want to do activities outdoors use personal protective equipment. But in carrying out religious activities of the people can not be separated from interacting with other people and religious institutions. Hindu community institution, Parisada Hindu Dharma Bali in the face of Covid-19 make rules or obligations to make upakara to minimize covid-19. This is in accordance with the role theory of George H Mead (1934) that as a religious lembaga plays a role to carry out a series of rights and obligations, expectations, norms, and behaviors that must be faced and fulfilled. The fulfillment is carried out by making some rules or obligations for Hindus, by encouraging the making of a series of ceremonies to minimize Covid-19 in Bali.

Keywords: *Role, religious institutions, covid-19*

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat Covid-19 adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok di bulan Desember akhir tahun 2019 kemudian mulai menyebar ke berbagai negara, dan tidak terkecuali Indonesia.

Organisasi World WHO sendiri menetapkan Covid-19 sebagai wabah pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 (WHO, 2020). Kecepatan penyebaran wabah Covid-19 ini menjadikan banyaknya korban diberbagai negara. Di Indonesia sendiri jumlah korban Covid-19 semakin bertambah, pertanggal 14 Desember 2020 terkonfirmasi 623. 309 kasus positif dengan 18.956 kasus meninggal dan 510.957 kasus sembuh (Departemen Kesehatan, 2020).

Kejadian luar biasa ini telah berdampak sangat besar pada berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, pariwisata dan aktivitas agama. Aktivitas agama yang dilakukan oleh umat jelas berinteraksi dengan umat yang lain. Berinteraksi umat satu dengan umat lain dan lembaga Agama yang ada di Bali yakni Parisadha Hindu Dharma Provinsi Bali bekerja

sama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat mengeluarkan kebijakan atau kewajiban kepada umat Hindu agar melaksanakan upacara untuk meminimalisir Covid-19. Salah satunya adanya kebijakan tersebut dengan membatasi orang untuk melakukan upacara dengan batas jumlah maksimal 25 orang, atau mengurangi atau meniadakan upacara, artinya hanya orang tertentu yang ditunjuk untuk melakukan upacara dengan skala kecil. Pembatasan sosial yang mengharuskan setiap orang menjaga jarak saat berinteraksi dengan siapapun yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Berdasarkan paparan di atas, apa langkah-langkah Lembaga Agama dalam menghadapi Covid-19 yang masih menyebar sampai saat ini?. Untuk memecahkan masalah digunakan teori peran oleh George H Mead (1934), bahwa sebagai lembaga agama berperan untuk menjalankan serangkaian hak dan kewajiban, harapan, norma, dan perilaku yang harus dihadapi dan dipenuhi. Pemenuhan itu dijalankan dengan membuat beberapa aturan atau kewajiban untuk umat Hindu, dengan mengimbau membuat rangkaian upacara dan pembatasan kerumunan untuk meminimalisir Covid-19 yang ada di Bali.

Lembaga menurut Koentjaraningrat adalah pranata sosial, sistem tata kelakuan dan hubungan berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Tata cara atau prosedur untuk mengatur hubungan antar manusia (Charles H Page dalam Soerjono Soekanto, 1986:179). Berdasarkan paparan di atas, lembaga agama merupakan sikap pemimpin agama dengan bertujuan untuk keteraturan dan berintegrasi dalam masyarakat. Lembaga agama yang dimaksudkan adalah PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dalam mengatur umat untuk menghadapi Covid-19.

PEMBAHASAN

Pembatasan Jarak dan Bekerja Dari Rumah

Penyebaran virus corona atau dikenal juga covid-19 di Indonesia saat ini menjadi sangat mengkhawatirkan. Semua provinsi tanpa terkecuali minimalnya terdapat satu orang tertular virus ini (positif). Pemerintah dengan segala upaya sudah mengimbau masyarakat untuk tetap berada dirumah, tagar-tagar di rumah aja, *stay at home* menjadi ramai di media sosial. Upaya WHO (World Human Organization) atau lembaga kesehatan dunia, dalam mengantisipasi penyebaran virus ini adalah salah satunya dengan melakukan *Social Distance* yang belakangan berganti nama menjadi *Physical Distance*, di mana setiap orang harus menjaga jarak fisik kurang lebih 1-2 meter agar memperkecil penularan virus ini.

Kebijakan *Physical Distance* dan himbauan pemerintah dalam menyerukan untuk tetap di rumah berdampak pada sektor seperti perbankan, pariwisata, pendidikan aktivitas agama dan

lain sebagainya. *Working From Home* (WFH) begitulah istilah yang umum didengar belakangan ini menjadi aktivitas sehari-hari dalam menerapkan *Physical Distance* dan *stay at home*. Semua pekerjaan yang dilakukan dari rumah itu lah yang disebut dengan Working From Home (WFH), bekerja di rumah ini bukan berarti seperti cuci piring, cuci baju atau membersihkan tanaman, meskipun juga bisa dibilang demikian namun istilah WFH ini yaitu menggantikan pekerjaan semula di kantor, di sekolah ataupun di universitas dengan bekerja di rumah saja. Misal seperti rapat, menguji skripsi, tesis, Disertasi yang mesti dilakukan dari rumah.

Perkembangan era digital tidak dapat dipungkiri, sangat-sangat pesat bahkan tidak dapat dibendung. Dengan adanya dunia digital bukan tidak mungkin untuk menerapkan Working From Home (WFH). Semua pekerjaan yang tadinya tatap muka secara fisik, kini dapat bertemu melalui dunia digital. Suka tidak suka, mau tidak mau, corona telah menjadikan Working From Home (WFH) sebagai budaya dalam bekerja.

Era Digital untuk WFH fenomena yang terjadi saat ini adalah setiap orang belajar menggunakan sistem komputer untuk bekerja dari rumah, amunisi seperti paket internet dan aplikasi-aplikasi pendukung juga harus disiapkan. Disaat seperti ini orang-orang bergerak dari yang manual menuju era digital, akibat corona. Guru-guru contohnya yang tadinya tidak mengenal google classroom, kini mengenal google classroom bahkan dikombinasikan dengan *Quizizz* (pertanyaan). Komunitas guru digital menjadi naik daun, aplikasi zoom meroket bahkan para *content creator* mulai merubah alur kontennya untuk WFH. Working From Home apakah efektif ?. Efektif atau tidaknya sebuah pekerjaan lagi-lagi berdasarkan karakteristik dari orangnya, namun ketika dihadapkan dengan situasi Working From Home (WFH) bukan saja orangnya yang tidak siap, namun kantor, sekolah, dan banyak perusahaan juga tidak siap menjalani hal ini, ya suka tidak suka, mau tidak mau, corona telah menjadikan *Working From Home* (WFH) sebagai budaya saat ini. Efek dari WFH ini ternyata dapat membuat seseorang lelah bahkan sampai stress (CNN, 2020), misalkan murid atau mahasiswa yang kebanyakan tugas sehingga membuat WFH si murid tersebut hanya mengerjakan tugas, setiap saat memeriksa email atau WA (whatsharp).

Sektor Pendidikan WFH menjadi tidak efektif mana kala banyak guru atau dosen tidak menggunakan perangkat digital yang membantunya dalam proses pembelajaran secara daring, belum lagi para peserta didik yang pulang ke kampung halamannya di mana terkadang sinyal untuk akses internet sulit. Namun demikian pemerintah mempunyai alternatif seperti mengganti siaran TVRI Corona Picu Budaya Working From Home (WFH) menjadi siaran Pendidikan sejak April 2020 mulai pagi hari sampai siang hari, sampai saat ini. Terlihat pada jadwal tayang

menggunakan motto serunya belajar dari rumah, dan tiap jamnya diberi sesi untuk kelas-kelas tertentu (Kemendikbud RI, 2020). Jika dikatakan apakah WFH efektif ya untuk saat ini efektif, kenapa? Suka tidak suka, mau tidak mau, corona telah menjadikan Working From Home (WFH) sebagai budaya dalam bekerja.

Dalam era digital ini *working from home* menjadi tidak kenal waktu oleh sebab itu perlu adanya manajemen saat *working from home*, manajemen ini digunakan agar kita tidak stress menghadapi pekerjaan yang kini tanpa kenal waktu. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan dalam manajemen WFH : (a) Sebaiknya ketika anda melakukan WFH lakukanlah diwaktu-waktu yang memang sesuai dengan yang dijadwalkan, buat jadwal kerja; (b) Prioritaskan lah apa yang lebih dulu ingin dikerjakan; (c). Tetap memantau perkembangan pekerjaan sembari juga memantau keluarga anda di rumah; (d) Jangan berlebihan dalam melakukan pekerjaan, anda dapat juga bersantai tanpa melihat layar *smart phone* atau laptop, misal cobalah bercocok tanam atau memasak untuk refleksikan diri agar tidak terlalu memaksakan WFH.

Kelebihan dan Kekurangan *Working From Home*

Model pekerjaan apapun mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuk WFH ini. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan dari aktivitas WFH ini adalah: *Pertama* Kelebihan dari WFH adalah; a. Waktu yang fleksibel memungkinkan anda bekerja sesuai dengan waktu yang telah anda tentukan; b. Tidak perlu mempersiapkan penampilan, anda dapat bekerja tanpa perlu mandi dan sikat gigi; c. Lebih hemat uang transportasi; d. Tidak ada macet dan polusi udara; e. Tindakan kriminal tidak ada jika WFH; f. Berkumpul dengan keluarga setiap saat; g. Bisa lebih produktif. (Johnson, 2020; Kiss, 2020)

Kedua kelemahan dari WFH ini adalah: a. Paket internet yang terbatas; b. Banyaknya aplikasi yang digunakan untuk mendukung WFH sehingga beberapa orang yang menjadi *host meeting* menggunakan aplikasiaplikasi yang berbeda-beda; c. Tidak sedikit orang pada saat melakukan *video conference* diganggu oleh anak ataupun keluarga; d. Tidak semua pekerjaan bisa menerapkan WFH, contohnya ojek online, Corona memang memicu budaya Working From Home bukan berarti ini terus menerus terjadi, hal ini hanya terjadi sementara (Johnson, 2020; Kiss, 2020).

Ketika virus yang bernama corona ini musnah maka anda dapat menerapkan dua model pekerjaan yaitu Working From Home maupun Working From Office. Efek corona memang berimbas kesemua sektor, menjadikan kita terbiasa untuk tetap di rumah, beraktivitas di rumah

dan bekerja di rumah. Pada akhirnya untuk saat ini apapun alasannya jika dirasa memungkinkan lakukanlah Working From Home.

Gunakan waktu ini sebagai waktu terbaik untuk berkumpul bersama keluarga, jika ingin berkumpul dengan teman sejawat anda dapat menggunakan banyak aplikasi yang mendukung hal tersebut tanpa harus bertemu fisik. Gunakan waktu ini untuk produktivitas dan berkarya serta banyak belajar untuk meningkatkan skill, masa WFH ini ada banyak sekali pelatihan atau *online course* gratis yang tersedia di internet. Oleh sebab itu suka tidak suka, mau tidak mau Working From Home (WFH) dengan sendirinya menjadi budaya di era pandemi ini, dan langkah-langkah sikap lembaga agama menyikapi Covid-19.

Langkah-langkah Lembaga Agama Menyikapi Covid-19

Pandemi, telah menginfeksi lebih di 100 negara, oleh karena itu, sebuah koordinasi respon global sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan sistem kesehatan terhadap tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya (Callaway, 2020).

Implementasi langkah-langkah sosial yang berguna untuk memperlambat atau menghentikan penyebaran COVID-19 untuk mengurangi transmisi COVID-19 termasuk tindakan individu dan lingkungan, mendeteksi dan mengisolasi, pelacakan kontak dan karantina, tindakan jarak sosial dan fisik termasuk untuk pertemuan massal, perjalanan internasional, dan vaksin serta perawatan. Tindakan jarak sosial dan fisik bertujuan untuk memperlambat penyebaran penyakit dengan menghentikan rantai penularan COVID-19 dan mencegah yang baru muncul.

Negara kita terus berupaya untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Langkah-langkah ini mengamankan jarak fisik agar terhindar dari Pandemi COVID-19. Demikian pula langkah yang dilakukan Lembaga Agama Hindu Di Bali dalam memperlambat penyebaran penyakit dengan menghentikan rantai penularan COVID-19, dengan membuat beberapa upaya atau aturan, yakni:

1. Pemerintah Provinsi Bali bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali. Dalam surat edaran ini masyarakat mengamati menaati dan melaksanakan arahan Presiden RI dan Gubernur Bali terkait dengan penyebaran Covid-19, khususnya di Bali. Khusus kepada Umat Hindu di Bali, kegiatan Malasti Tawur Kasanga Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, (1) Bagi desa adat yang *wewidangan*-nya (wilayah) dekat dengan *Segara, Malasti* di pantai; (2) Bagi desa adat yang *wewidangan*-nya (wilayah) terhubung dengan Danau, Malasti di Danau; (3) Bagi desa adat yang *Wewidangan*-nya bergaul dengan Campuhan, Malasti di Campuhan; (4) Bagi desa adat yang memiliki Beji dan atau Pura Beji, Malasti di Beji; (5) Bagi desa adat yang tidak melaksanakan Malasti menjaga wilayahnya, dapat melakukan Malasti dengan cara Ngubeng atau Ngayat dari Pura setempat (Bali Tribune co.id,17 Maret 2020, diakses tanggal 14 Desember 2020).

Menurut Ketua PHDI Bali, I Gusti Ngurah Suidiana Upakara Malasti bagi desa adat yang Malasti di Segara, Upakara banten Guru Piduka, Salaran ayam itik (bebek) dan tipat kelanan, pakelem itik katur ring Bhatara Baruna. Sedangkan Desa adat yang Malasti ring Danu, Beji, dan Campuhan, upakaranya, Caru Panglebar Sasab Merana (caru ayam ireng). Kemudian desa adat yang Malasti Ngubeng utawi Ngayat, upakara, Caru Panglebar Sasab Merana ring Pangulun Setra, saka sidan (sesuai dengan situasi setempat) (Bali Tribune co.id,17 Maret 2020, diakses tanggal 14 Desember 2020).

Upakara Tawur dilaksanakan serentak pada tanggal 24 Maret 2020 dengan tingkatan Tawur Agung di Pura Agung Besakih, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali

Kedua, Tawur Labuh Gentuh cincin Catus Pata Kabupaten / Kota, dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten / kota bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia. Kabupaten / Kota, dan Majelis Desa Adat Kabupaten / Kota pada pukul 13.00 WITA. Tawur Manca Kelud ring Catus Pata Desa Adat, dilaksanakan oleh masing- masing desa adat setempat pada pukul 16.00 WITA. Biaya Upakara dapat menggunakan dana desa adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020. Upacara lan Upakara setingkat keluarga dan rumah tangga dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Kalau tetap dilaksanakan, maka pelaksanaannya agar mengikuti ketentuan waktu pengarakan ogoh-ogoh bila dilaksanakan tanggal 24 Maret 2020, pukul 17.00 sampai dengan pukul 19.00 WITA. Sedangkan tempat pelaksanaan hanya di *Wewidangan* (wilayah) Banjar Adat setempat dan sebagai penanggung jawab adalah Bandesa Adat dan Prajuru Banjar Adat setempat atau sebutan lain agar berjalan dengan tertib dan disiplin.

Selain itu, nyatanya dalam rangkaian Upacara Malasti, Tawur, Pangrupukan yang dilengkapi dengan Pengarakan ogoh-ogoh agar dilaksanakan dengan memperhatikan imbauan bersama diantaranya, melarang jumlah peserta yang ikut dalam prosesi. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Para Pamangku agar menggunakan "panyiratan" yang sudah bersih untuk "nyiratang tirta" kepada Krama. Tidak mengganggu ketertiban umum, tidak

mabuk-mabukan, memiliki pengurus dan / atau koordinator yang bertanggung jawab kepada Prajuru Banjar Adat atau sebutan lain di Wewidangan Banjar Adat setempat. Bagi umat yang sakit atau merasa kurang sehat, agar tidak mengikuti rangkaian upacara. Guna menghindari berbagai potensi penyebaran penyakit termasuk Virus Corona (Nangunsatkerthilokabalicom, 14/9 2020, diakses 14 Desember 2020)

2. PHDI, MDA dan FKUB terbitkan surat edaran, 14 September 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Upacara Panca Yadnya dan Keramaian di Bali dalam situasi Gering Agung dan Surat Edaran FKUB Provinsi Bali No; 42/IX/FKUB/2020 berisi tentang Pengaturan Kegiatan Keagamaan dan Keramaian. Mengacu pada data penyebaran Pandemi Covid-19 di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Bali, kembali meningkat dengan tingkat kesembuhan yang melambat, serta kluster kemunculan kasus Covid-19 banyak bersumber dari interaksi masyarakat, perlu adanya Pembatasan Kegiatan Upacara Panca Yadnya dan Keramaian di Bali dalam Situasi Gering Agung.

3. PHDI Imbau Umat Hindu Sembahyang-Tetap Produktif di Rumah dan pentingnya penerapan 3 M dalam ritual. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mengimbau seluruh umat Hindu di Indonesia tinggal di rumah selama masa pandemi Corona (COVID-19). Umat Hindu diminta melakukan kegiatan sembahyang dan berdoa dari rumah. Dalam rangka mencegah COVID-19 ini, kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan ritual persembahyangan cukup dari rumah saja, melakukan doa, melakukan meditasi untuk kesembuhan kita sendiri untuk melakukan perbaikan pada bangsa kita (Bisnisdetik com, Sabtu (28/3/2020, diakses 14 Desember 2020).

Sesuai dengan teori yang digunakan teori peran dari George H Mead (1934), bahwa sebagai lembaga agama berperan untuk menjalankan serangkaian hak dan kewajiban, harapan, norma, dan perilaku yang harus dihadapi dan dipenuhi. Paparan aturan dari PHDI, Pemerintah Provinsi Bali, MDA serta termasuk Forum Umat Beragama menunjukkan hanya sifatnya memberitahukan atau mewajibkan umat Hindu untuk melaksanakan. Namun ada beberapa umat yang tidak menerima, seperti wawancara penulis dengan beberapa umat Hindu, seperti Ibu Supi yang tinggal di Denpasar asal Singaraja (wawancara, 10 Desember 2020) menyebutkan:

Parisada dan lembaga lain hanya mengeluarkan aturan atau kewajiban untuk membuat upacara, namun Covid-19 tetap bertambah dan tidak hilang sampai sekarang. Jangan hanya membuat aturan atau kewajiban yang memberatkan umat, buatlah upacara yang gampang dan yang terpenting menjalankan protokol kesehatan, seperti bekerja dari

rumah, cuci tangan dan menggunakan masker kalau berinteraksi dengan orang lain. Saya tidak bisa membuat banten yang sulit-sulit seperti banten pengenteg Hyang, saya hanya membuat pejati atau canang saja. Sekarang mencari uang makan saja susah, jangan memberatkan umat.

Hal yang sama disebutkan oleh ibu Matria, beliau adalah domisili Gianyar (wawancara, 9 Desember 2020)

Saya tidak lagi mengikuti kewajiban atau aturan dari Parisada, karena waktu ini sudah melaksanakan upacara sasih keenam (Tilem ke enam dari jumlah Tilem dalam satu tahun) yang dilakukan oleh Desa Adat untuk mengurangi Virus Corona. Aturan dari Parisada, Desa Adat saya tidak mengikutinya karena terus disuruh membuat upacara tanpa pernah turun ke desa memberi nasehat atau memberi saran kepada umat. Lembaga hanya di atas kertas saja bagaimana keadaan umat pengurus tidak tahu dan orangnyapun saya tidak tahu. Untuk mencari uang makan saja sulit kenapa lagi menyusahkan, ya kalau mampu tidak masalah bagaimana yang tidak mampu. Sebenarnya cukup hanya imbauan untuk berdoa dan sembahyang dari rumah dan dengan aktivitas berkebun di rumah. Seperti saya berjualan setiap hari ke pasar sampai pukul 10 pagi agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa umat berani melanggar aturan dari Parisada karena katanya memberatkan umat. Kalau membuat aturan masalah pelaksanaan upacara bikin yang gampang karena umat sudah merasa susah dalam menghadapi Covid-19. Artinya peran lembaga tidak sepenuhnya ditaati seperti teori peran yang disebutkan oleh George Head, untuk menjalankan hak dan kewajiban. Jadi lembaga Parisada tidak dapat mengikat norma-norma yang dikeluarkan untuk mengatur umat, hal dikatakan oleh Pemuda milenial, (I Made Supat, wiraswasta)

Beragama atau Lembaga yang mengatur umat jangan menyusahkan umat berilah bimbingan spiritual atau praktek keagamaan yang baik dan benar serta simpel. Jangan hanya mule keto (memang begitu dari dulu) karena anak sekarang yang penting ingat pada Ida Hyang Widhi, baru bangun berdoa dan sembahyang tanpa menggunakan upacara-upacara yang besar (wawancara 8 Desember 2020).

Paparan di atas menunjukkan bahwa penyimpangan terhadap aturan Lembaga tidak akan mengakibatkan hukuman bagi yang tidak mematuhi, demikian pula kebiasaan yang

dilakukan tidak ditaati oleh umat karena kelakuan umat berbeda satu dengan yang lain. Kalau aturan sudah kuat dan terintegrasi dengan umat akan menjadi kebiasaan atau kekuatan namun ada beberapa umat yang tidak mengikuti aturan lembaga (Soejono Soekamto, 1986:181).

Kesimpulan

Virus corona ini merupakan sekelompok jenis virus yang mengganggu saluran pernapasan dan salah satunya pernah menyebabkan munculnya wabah Severe Acute Respiratory Infection (SARS) di dunia. Virus yang mulanya teridentifikasi menyerang ratusan warga di Wuhan, Tiongkok, kini semakin merajalela di dunia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan pencegahan dan pengendalian virus COVID-19, di antaranya meniadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah kemudian menggantikannya dengan belajar daring di rumah, menerapkan kerja dari rumah dan meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan serta Lembaga agama memberikan kewajiban untuk umat dengan aturan tentang pelaksanaan upacara untuk mencegah Covid-19, namun ada yang menjalankan dan beberapa ada yang menolaknya.

Referensi

- Agus Nana Nuryana, M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan. <https://kabar-priangan.com/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-dunia-pendidikan/>.
- Andrian, 2020. Jokowi: *Kebijakan Sekolah di Rumah Dibantu Google hingga Microsoft*. Tirto.id. URL <https://tirto.id/jokowi-kebijakan-sekolah-dirumah-dibantu-google-hingga-microsoft-eFtV>
- Annisa, 2020. *5 Cara Mencegah Virus Corona Yang Disarankan Kemenkes RI dan WHO*. SehatQ. URL <https://www.sehatq.com/artikel/5-caramencegah-penyebaran-virus-korona-yang-disarankan-kemenkes-ri>
- Dian, 2020. *Pemerintah: Kunci Pencegahan Penularan Covid-19, Jaga Jarak dan Cuci Tangan Pakai Sabun*. Kompas.
- Bisnisdetik com, PHDI Imbau Umat Hindu Sembahyang, Sabtu (28/3/2020, diakses 14 Desember 2020).
- Johnson, C (2020). *20 Reasons to Let Your Employees Work From Home* . Available at: <https://www.entrepreneur.com/article/253896> (Accessed: 14/12 2020).

- CNN (2020), *Tanda Stres dan Kelelahan saat 'Work From Home'*, CNN Indonesia. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20200415162230-255-493865/tanda-stres-dan-kelelahan-saatwork-from-home> (Accessed: 10 April 2020).
- Kemendikbud RI (2020). *Jadwal Acara Program Belajar dari Rumah di TVRI Minggu Kedua*, Available <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/jadwal-> (Accessed: 10/12/ 2020).
- Kiss, M.(2020). *Top 10 Advantages and Disadvantages of Working from Home*. Available at: <https://www.clicktime.com/blog/top-10-advantagesdisadvantages-working-from-home/> (Accessed: 10 /12/2020).
- NangunSat Kerti, com. Surat Edaran Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali. (14/9/2020, diakses 10/12/2020).
- Prodjo, W. A. (2020) *Ini Alasan Mendikbud Nadiem Hadirkan Belajar dari Rumah lewat TVRI Halaman all* - Kompas.com. Tersedia pada <https://www.kompas.com/edu/read/2020/04/10/161558071/ini-alasanmendikbud-nadiem-hadirkan-belajar-dari-rumah-lewat-tvri?page=all> (Diakses: 10/12/2020).
- Soerjono Soekanto, 1986: Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali, edisi kedua.
- Tedy, 2020. *5 Langkah Cegah Corona di Lingkungan Sekolah. Ruang Guru*. URL <https://blog.ruangguru.com/5-langkah-cegah-corona-di-lingkungan-sekolah>.

